

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teluk Jakarta merupakan salah satu kawasan strategis di Indonesia, yang mencerminkan Ibukota Indonesia, meliputi Kawasan Pantai Pesisir Tangerang, Jakarta dan Bekasi, yang berada di tiga provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Oleh karenanya Teluk Jakarta digolongkan sebagai “Pengembangan Wilayah Khusus”, yakni mewujudkan satu konsepsi pengembangan yang menyeluruh, menyangkut kegiatan konservasi, preservasi dan pembangunan, sebagai berikut : (1). Konservasi : mempertahankan daerah penghijauan yang masih mungkin, sekaligus mengurangi tingkat pencemaran khususnya daerah pesisir pantai Teluk Jakarta; (2). Preservasi : meningkatkan lingkungan – lingkungan yang memiliki nilai – nilai historis untuk kepentingan aspek – aspek edukatif dan rekreasi; (3). Pembangunan : memberikan ruang gerak bagi kegiatan pembangunan yang memiliki nilai khusus dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional, tanpa menambah beban pencemaran baru pada lingkungan sekitarnya; (4). Mengembangkan sarana – sarana rekreasi bagi kepentingan umum.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1995 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Enam memuat arahan untuk mengembangkan Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan. Selanjutnya Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta. Di dalam Keputusan Presiden tersebut ditetapkan batasan tentang reklamasi pantai utara dan kawasan pantai utara, yaitu :

- a. Reklamasi Pantai Utara adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta;
- b. Kawasan Pantai Utara Jakarta adalah sebagian wilayah administrasi Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta menjabarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 ke dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Kebijakan penyelenggaraan reklamasi kawasan Pantura Jakarta ditujukan untuk mewujudkan lahan hasil reklamasi seluas 2.700 Ha dan memanfaatkannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010, serta dilaksanakan secara terpadu dengan penataan kembali (revitalisasi) daratan pantai lama Jakarta seluas 2.500 Ha untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Revitalisasi merupakan serangkaian program penguatan dan pemberdayaan fungsi kawasan melalui penataan kembali, perbaikan, pemugaran,

pembangunan, konservasi dan preservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi juga menyusun rencana pengembangan kawasan pantai utara. Rencana pengembangan kawasan pantai utara di Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang. Keputusan Presiden ini Nomor 73 Tahun 1995 ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2006. Disamping pembangunan melalui reklamasi pantai/lahan, pemerintah daerah juga berupaya untuk mengembangkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti daerah pariwisata, pelabuhan dan lain-lain.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur maka Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan Keppres Nomor 73 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku, namun Perpres Nomor 54 Tahun 2008 juga membuka peluang dilakukannya pembangunan melalui reklamasi, oleh karena itu diperlukan perencanaan ulang (*re-planning*).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Mengingat tingginya kebutuhan terhadap pengembangan kawasan Teluk Jakarta, berdasarkan pembahasan - pembahasan yang telah dilakukan antara pihak Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Bappenas, dalam rangka *re-planning* Teluk Jakarta, disepakati perlunya dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta yang terintegrasi meliputi Kawasan Pantai Utara Tangerang, Jakarta dan Bekasi, sebagai solusi yang paling mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, antara lain lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, yang disepakati berbagai pihak terkait.

KLHS dimaksud diharapkan mampu menyeimbangkan pemenuhan kepentingan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta memberikan rekomendasi (mitigasi dan alternatif) kebijakan dan rencana pengembangan kawasan Teluk Jakarta yang paling menguntungkan semua pihak terlibat atau yang tidak memberikan dampak lingkungan hidup yang terlalu negatif.

1.2 Tujuan

Tujuan utama kegiatan ini adalah tersedianya pilihan atau alternatif pengembangan Teluk Jakarta yang paling optimal dalam arti menguntungkan semua pihak dan tidak memberi dampak lingkungan hidup yang terlalu negatif melalui :

- (1) tersajinya hasil assessment lingkungan hidup terhadap kebijakan pengembangan Teluk Jakarta;
- (2) disepakatinya isu prioritas dan strategis serta rambu – rambu pengembangan Teluk Jakarta; dan
- (3) tersajinya rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan disepakati oleh tiga propinsi dan dua kabupaten.

1.3 Pendekatan Kajian

a. PerPres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat (2), KLHS Teluk Jakarta wajib dilaksanakan pada saat penyusunan atau mengevaluasi RTRW dan pada saat akan menyusun RPJP dan RPJM dan/atau KRP lainnya. Penyusunan RTRW Prov. DKI Jakarta, Kab. Bekasi dan Kab. Tangerang didasarkan pada PerPres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sehingga PerPres tersebut merupakan subjek / ruang lingkup KRP yang dikaji dalam KLHS Teluk Jakarta.

b. Kawasan Pantai Utara Tangerang, Jakarta, dan Bekasi

Kawasan Teluk Jakarta merupakan bagian dari Kawasan Jabodetabekpunjur di wilayah Pesisir yang terdiri dari Kawasan Pantura Tangerang, Jakarta dan Bekasi.

c. Kebijakan Penataan Kawasan dan Reklamasi

Terdapat dua aspek lingkup kajian yaitu kebijakan dan isu strategis.

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah kebijakan penataan kawasan (daratan) dan reklamasi.

d. Isu Strategis Kawasan Pantura

Yang dimaksud dengan isu strategis adalah isu lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup isu lingkungan hidup bio fisik dan isu lingkungan hidup sosekbud.

e. Pengaruh KRP terhadap Isu Strategis

Pengaruh KRP terhadap isu strategis adalah kajian pengaruh KRP yang terdapat dalam RTRW terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Pantura Teluk Jakarta sesuai dengan isu lingkungan hidup.

f. Alternatif

Alternatif adalah strategi penanggulangan yang merupakan perbaikan KRP RTRW di tiga (3) daerah.

g. RTRW DKI Jakarta dan Rinciannya

RTRW DKI Jakarta dan rinciannya adalah RTRW yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya RTRW DKI Jakarta dan rinciannya telah mengakomodasi isu strategis lingkungan hidup sesuai KLHS Teluk Jakarta. Namun bagi yang belum terakomodasi direkomendasikan agar diintegrasikan dalam KRP lainnya seperti *Re Planning*, RDTR, RPJP dan RPJM.

h. RTRW Kabupaten Tangerang dan Rinciannya

RTRW Kabupaten Tangerang dan rinciannya adalah RTRW yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RTRW Kabupaten Tangerang dan rinciannya telah mengakomodasi sebagian isu strategis lingkungan hidup sesuai KLHS Teluk Jakarta. Bagi isu strategis lingkungan hidup yang belum terakomodasi direkomendasikan agar diintegrasikan dalam RTRW dan KRP lainnya seperti *Re Planning*, RDTR, RPJP dan RPJM.

i. RTRW Kabupaten Bekasi dan Rinciannya

RTRW Kabupaten Bekasi dan rinciannya adalah RTRW yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RTRW Kabupaten Bekasi dan rinciannya telah mengakomodasi sebagian isu strategis lingkungan hidup sesuai KLHS Teluk Jakarta. Bagi isu strategis lingkungan hidup yang belum terakomodasi direkomendasikan agar diintegrasikan dalam RTRW dan KRP lainnya seperti *Re Planning*, RDTR, RPJP dan RPJM.

j. KRP Lain :

- **Sektoral**

KRP lain ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan permasalahan yang timbul selama proses KLHS dilaksanakan. Antara lain sinkronisasi perencanaan antar

sektor, sinkronisasi perencanaan antar daerah dan sinkronisasi perencanaan antar sektor dengan daerah.

Rekomendasi meliputi :

- Perlu adanya sinkronisasi perencanaan antar sektor seperti : Pipa gas, Telkom, PLN, Prasarana
- Perlu adanya sinkronisasi perencanaan antar daerah dalam rencana RTRW seperti : rencana pembangunan reklamasi, pelabuhan samudra, pelabuhan nelayan antar daerah di tiga wilayah
- Perlu adanya sinkronisasi perencanaan antar sektor dengan daerah seperti : PLN dengan Reklamasi

Dari hasil kajian KLHS Teluk Jakarta direkomendasikan kepada BKPRN untuk mensinkronkan KRP antar daerah, antar sektor dan antar sektor dengan daerah.

- Perda
Perda dimaksudkan untuk melengkapi upaya penanggulangan isu strategis lingkungan hidup pada tataran yang lebih operasional, seperti : Perda Sempadan Sungai, Perda Kebersihan dll.
- PerGub
Sebagai upaya penanggulangan isu strategis lingkungan hidup pada masa transisi sebelum perda-perda KRP disahkan, dapat ditetapkan berupa Peraturan Gubernur.

1.4 Pemangku Kepentingan

	TANGERANG	JAKARTA	BEKASI
Instansi Pemrakarsa	Dinas Tata Ruang	Bappeda	Bappeda
Instansi yang Terkait dengan Pelaksanaan RTRW Pusat		<ul style="list-style-type: none"> • KLH • Bappenas • Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam • Ditjen Ketenaga lautan • Dirjen Migas • Ditjen Pelpeng • Ditjen Hubla • Ditjen Bangda • Ditjen Ketenagalistrikan • BPN • PLN • PAM 	

	TANGERANG	JAKARTA	BEKASI
Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bina Marga • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Perhutani 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tata Ruang • Dishidros TNI AL • Dinas Kelautan dan Pertanian • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pertanian dan Kehutanan • Dinas Pertamanan dan Pemakaman • Dinas Sosial • Dinas Perindustrian dan Energi • Dinas Pertambangan dan Energi • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Pertambangan dan Energi • Dinas Perhubungan • Dinas Kebersihan • Walikota Jakarta Utara • BKSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kelautan • Dinas Perhubungan • Distarkim • BKSP
Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • BLHD Banten • BLHD 	<ul style="list-style-type: none"> • KLH Jakut • BPLHD 	<ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Jabar • BPLH
Perseorangan dan/atau Kelompok Orang yang Mempunyai Informasi dan Keahlian		<ul style="list-style-type: none"> • PPSML UI • BPPT • Deltares • Dishidros • ILGOS • DHI • JCDS • Witbo • P₂O – LIPI • PKSPL – IPB 	
Perseorangan dan/atau Kelompok Orang yang Terkena Dampak Penerapan Rtrw	<ul style="list-style-type: none"> • PT. KNI • PT. TIC • PT. A Konsultindo • Teluk Naga 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PJB Muara Karang • PT. Angkasa Pura II • PT. Pelindo II • PT. Pembangunan Persada • PT. Kawasan Berikat Nusantara • Pembangunan Jaya Ancol • PT. Indonesia Power Priok • PT. Jaladri Kartika Paksi • PT. BBM 	<ul style="list-style-type: none"> • PT PJB UP Muara Tawar • Marunda Center

	TANGERANG	JAKARTA	BEKASI
		<ul style="list-style-type: none"> • PT. Kapuk Naga Indah • PT. NP • PT. PJB UP MKR • PT. Manggala Krida Yudha • PT. Taman Harapan Indah • PT. Bhakti Bangun Era Mulia • PT. Jakarta Propertindo • PT. Jakarta Konsultindo • PT. A Konsultindo • PT. Nusantara Regas • WALHI • Maspedling Jakut • Inswa • HNSI • Tempo • Kompas • Sinar Indonesia • ETF 	

1.5 Pelaksanaan Kajian

Pelaksanaan kajian diawali dengan rapat konsolidasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan tim Pendamping KLHS, rapat-rapat persiapan antar tim Pendamping KLHS, rapat-rapat koordinasi antar tim Pendamping KLHS dengan tim KLHS daerah Tangerang, Jakarta dan Bekasi, yang dilaksanakan pada akhir Oktober 2010 sampai dengan pertengahan November 2010.

Pelaksanaan Seminar yang dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD), dilaksanakan pada bulan November 2010, dilanjutkan dengan pelaksanaan Workshop di masing-masing daerah dan rapat evaluasi hasil pelaksanaan Workshop.

Penyusunan rekomendasi KLHS dilaksanakan bulan desember 2010 yang rapat pembahasan dan penyempurnaan rekomendasi dilaksanakan dan disesuaikan dengan agenda KLH.

BAB II

LINGKUP KAJIAN

2.1 Hasil Identifikasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan

a. Gambaran Umum Wilayah

Kajian lingkungan hidup strategis Teluk Jakarta mencakup daerah pesisir yaitu:

1) Kabupaten Tangerang, meliputi :

- Kecamatan Mekarbaru
- Kecamatan Kronjo
- Kecamatan Kemiri
- Kecamatan Mauk
- Kecamatan Sukadiri
- Kecamatan Teluk Naga
- Kecamatan Kosambi

2) Provinsi DKI Jakarta, meliputi :

- Kecamatan Penjaringan
- Kecamatan Pademangan
- Kecamatan Tanjung Priok
- Kecamatan Koja
- Kecamatan Cilincing

3) Kabupaten Bekasi, meliputi :

- Kecamatan Tarumajaya
- Kecamatan Babelan
- Kecamatan Muaragembong

b. Pengumpulan Data

1) Luas wilayah dan kepadatan penduduk

(a) Luas wilayah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan yang berada di wilayah Pantura Tangerang dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Wilayah Pantura Tangerang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Mekar Baru	8	2.382 Ha	38.232 orang	1.605 orang/km ²
Kronjo	10	4.423 Ha	57.482 orang	1.300 orang/km ²
Kemiri	7	3.270 Ha	43.101 orang	1.318 orang/km ²
Mauk	12	5.142 Ha	79.543 orang	1.547 orang/km ²
Sukadiri	8	2.414 Ha	55.826 orang	2.313 orang/km ²
Pakuhaji	14	5.187 Ha	103.493 orang	1.995 orang/km ²
Teluk Naga	13	4.058 Ha	128.737 orang	3.172 orang/km ²
Kosambi	10	2.976 Ha	109.403 orang	3.676 orang/km ²

Sumber Data : Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2009

(b) Luas wilayah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan yang berada di wilayah Pantura DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Wilayah Pantura DKI Jakarta

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Penjaringan	5	3.548,70 Ha	186.528 orang	5.256 orang/km ²
Pademangan	3	991,87 Ha	120.286 orang	12.127 orang/km ²
Tanjung Priok	7	2.512,55 Ha	312.113 orang	12.422 orang/km ²
Koja	6	1.320,33 Ha	233.109 orang	17.655 orang/km ²
Cilincing	7	3.969,96 Ha	240.791 orang	6.065 orang/km ²

Sumber Data : Jakarta Utara Dalam Angka 2009

(c) Luas wilayah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan yang berada di wilayah Pantura Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Wilayah Pantura Bekasi

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Tarumajaya	8	5.463 Ha	86.381 orang	1.581 orang/km ²
Babelan	9	6.360 Ha	154.301 orang	2.426 orang/km ²
Muaragembong	6	14.009 Ha	37.780 orang	270 orang/km ²

Sumber Data : Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2008

2) Penggunaan lahan

(a) Luas Tanah sawah dan tanah kering menurut kecamatan dan penggunaannya yang berada di wilayah Pantura Tangerang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tangerang

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)			
			Pekarangan	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara Tidak diusahakan
Mekar Baru	2.382	-	201	18	-	-
Kronjo	4.423	2.097 *	356	82	-	-
Kemiri	3.270	1.172	780	250	-	-
Mauk	5.142	1.758	750	501	-	-
Sukadiri	2.414	504	436	68	-	-
Pakuhaji	5.187	1.542	871	147	-	-
Teluk Naga	4.058	1.582	1.350	24	13	-
Kosambi	2.976	2.814	1.990	58	-	193

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tangerang (Lanjutan)

Kecamatan	Lahan Kering (Ha)					
	Lain- Lain	Rawa2 yg Tidak Ditanami	Tambak	Kolam/ Empang	Hutan Negara/ Rakyat	Total Lahan Kering
Mekar Baru	18	-	70	-	-	-
Kronjo	469	-	871	12	-	4.728 *
Kemiri	-	-	143	-	-	1.600
Mauk	-	-	507	-	-	2.878
Sukadiri	-	-	-	-	-	1.733
Pakuhaji	14	14	496	-	-	3.386
Teluk Naga	145	11	24	15	-	1.987
Kosambi	146	-	427	-	-	496

Sumber Data : Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2009

(b) Luas tanah sawah dan tanah kering menurut kecamatan dan penggunaannya yang berada di wilayah Pantura Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)			
			Pekarangan/ Bangunan	Tegal/ Kebun	Hutan Negara	Hutan Rakyat
Babelan	6.360	3.430	979	469	-	-
Tarumajaya	5.463	3.195	1.107	78	-	251
Muaragembong	14.009	1.930	750	156	234	-

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi (Lanjutan)

Kecamatan	Lahan Kering (Ha)					
	Rawa-rawa	Tambak	Kolam/ Empang	Sementara Tidak diusahakan	Lainnya	Jumlah Total
Babelan	-	465	17	-	1.000	2.930
Tarumajaya	-	494	19	-	319	2.268
Muaragembong	-	9.784	31	852	172	12.079

Sumber Data : Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2008

2.2 Kebijakan Rencana dan/atau Program pada Raperda RTRW

2.2.1 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2008

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, menyatakan bahwa Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur adalah **kawasan strategis nasional** yang meliputi **seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, sebagian wilayah provinsi Jawa Barat yaitu **seluruh wilayah Kabupaten Bekasi**, seluruh wilayah Kota Bekasi, seluruh wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur dan sebagian wilayah Provinsi Banten yaitu **seluruh wilayah Kabupaten Tangerang** dan seluruh wilayah Kota Tangerang. Yang dimaksud kawasan strategis nasional dalam Perpres tersebut adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk :

- a. Mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan;
- b. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir, dan
- c. Mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang yang diamanatkan pada Perpres tersebut terdiri atas rencana distribusi ruang untuk kawasan lindung yang dikelompokkan dalam zona non-budi daya (zona N) dan kawasan budi daya (zona B) serta zona pada kawasan budi daya di perairan laut yang juga disebut Zona Penyangga (zona P).

Tabel 2.6. Rencana Pola Ruang Jabodetabekpunjur Menurut Perpres 54/2008

Jenis	Kriteria
Zona Non-Budi Daya/ Kawasan Lindung	<p>Zona N1 terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kawasan hutan lindung; • kawasan resapan air; • kawasan dengan kemiringan di atas 40 %; • sempadan sungai; • sempadan pantai; • kawasan sekitar danau, waduk dan situ; • kawasan sekitar mata air; • rawa; • kawasan pantai berhutan bakau; • kawasan rawan bencana alam geologi. <p>Pemanfaatan ruang Zona N1 diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencegah abrasi,erosi, amblesan,bencana banjir dan sedimentasi; • Menjaga fungsi hidrologi tanah untukmenjamin ketersediaan unsure hara tanah, air tanah dan air permukaan; dan • Mencegah dan/atau mengurangi dampak akibat bencana alam geologi. • Pemanfaatan ruang Zona N1 dilaksanakan dengan cara mempertahankan dan mengembalikan fungsi Zona N1. <p>Zona N2 terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cagar alam; • Suaka margasatwa; • Taman nasional; • Taman hutan raya; • Taman wisata alam; dan • Kawasan cagar budaya. <p>Pemanfaatan ruang Zona N2 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi budaya; • Perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, serta gejala dan keunikan alam untuk kepentingan perlindungan plasma nuftah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan • Pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologis bagi peningkatan kualitas

Jenis	Kriteria
	<p>lingkungan sekitarnya, dan perlindungan dari pencemaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang Zona N2 dilaksanakan dengan cara mempertahankan dan mengembalikan fungsi Zona N2.
Zona Budidaya	<p>Zona B1 merupakan zona dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi; • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi; • Bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal. <p>Pemanfaatan ruang Zona B1 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan hunian padat; • Perdagangan dan jasa; • Industri ringan non-polutan dan berorientasi pasar; • Difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan; • Dilaksanakan melalui penerapan rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. • Yang berada di pantai utara Jakarta dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan/atau revitalisasi kawasan. • Dilarang membangun industri yang mencemari lingkungan dan banyak menggunakan air tanah. <p>Zona B2 merupakan zona dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang; dan • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang. <p>Pemanfaatan ruang Zona B2 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan hunian sedang; • Perdagangan dan jasa; • Industri padat tenaga kerja; • Diupayakan berfungsi sebagai kawasan resapan air. • Dilaksanakan dengan cara pengendalian pembangunan perumahan baru; • Pengendalian kawasan terbangun dengan menerapkan rekayasa teknis; • Koefisien zona bangunan yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. • Dilarang membangun industri yang mencemari lingkungan dan banyak menggunakan air tanah. <p>Zona B3 merupakan zona dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah; • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan • Merupakan kawasan resapan air

Jenis	Kriteria
	<p>Pemanfaatan ruang Zona B3 diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan hunian rendah; • Pertanian; • Untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air; • Dilaksanakan dengan cara pengendalian pembangunan dengan intensitas lahan terbangun rendah dengan menerapkan rekayasa teknis; • Koefisien zona bangunan yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. • Dilarang melakukan pembangunan yang mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam, mengurangi daya resap air dan/atau mengubah bentang alam. <p>Zona B4 merupakan zona dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah tetapi subur; • Merupakan kawasan resapan air; • Merupakan areal pertanian lahan basah bukan irigasi teknis dan pertanian lahan kering. <p>Pemanfaatan ruang Zona B4 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan hunian rendah; • Pertanian lahan basah; • Pertanian lahan kering; • Perkebunan; • Perikanan; • Peternakan; • Agroindustri; • Hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dilaksanakan dengan cara pengendalian pembangunan dengan intensitas lahan terbangun rendah dengan menerapkan rekayasa teknis; • Pelaksanaan kegiatan budi daya pertanian lahan basah, lahan kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri dan hutan produksi dengan teknologi tepat guna; dan • Koefisien zona bangunan yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. • Dilarang melakukan pembangunan yang mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam, mengurangi daya resap air dan/atau mengubah bentang alam. <p>Zona B5 merupakan zona dengan karakteristik :</p> <p>Kawasan yang mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian dan mempunyai jaringan irigasi teknis.</p>

Jenis	Kriteria
	<p>Pemanfaatan ruang Zona B5 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian lahan basah beririgasi teknis; • Dilaksanakan dengan cara intensifikasi pertanian lahan basah dengan teknologi tepat guna. • Dilarang melakukan pembangunan yang mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam, mengurangi daya resap air dan/atau mengubah bentang alam. <p>Zona B6 merupakan zona dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah dengan kesesuaian untuk budi daya; dan • KLB yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah. • Merupakan kawasan resapan air; <p>Pemanfaatan ruang Zona B6 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman dan fasilitasnya dan/atau penyangga fungsi Zona N1; • Dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 50 %. • Dilarang melakukan pembangunan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, parawisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. <p>Zona B7 merupakan zona yang berdekatan dengan Zona N1 pantai dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki daya dukung lingkungan rendah; • Rawan intrusi air laut; • Rawan abrasi; • Merupakan kawasan resapan air; • Dengan kesesuaian untuk budi daya dan KLB yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah. <p>Pemanfaatan ruang Zona B7 diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman dan fasilitasnya; • Penjaga dan penyangga fungsi N1; • Berfungsi sebagai pengendali banjir terutama dengan penerapan system polder; • Dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40 %. • Dilarang melakukan pembangunan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, parawisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Jenis	Kriteria
<p>Zona Penyangga (Zona pada Kawasan Budidaya di Perairan Laut)</p>	<p>Zona P1 merupakan : Zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai.</p> <p>Pemanfaatan ruang Zona P1 dilaksanakan melalui upaya : Menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, khususnya dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1.</p> <p>Zona P2 merupakan : Zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai yang mempunyai potensi untuk reklamasi.</p> <p>Pemanfaatan ruang Zona P2 dilaksanakan melalui upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, khususnya dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1. • Penyelenggaraan reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40 % dan/atau konstruksi bangunan di atas air secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman 8 meter, dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan. • Dilaksanakan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari ketua badan yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penataan ruang nasional <p>Zona P3 merupakan : Zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B1 pantai.</p> <p>Pemanfaatan ruang Zona P3 dilaksanakan melalui upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Zona B1 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai dan tidak mengganggu fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, muara sungai, dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran; dan • Penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 300 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman 8 meter, kecuali pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan jarak dapat diminimalkan, dan dengan mempertimbangkan

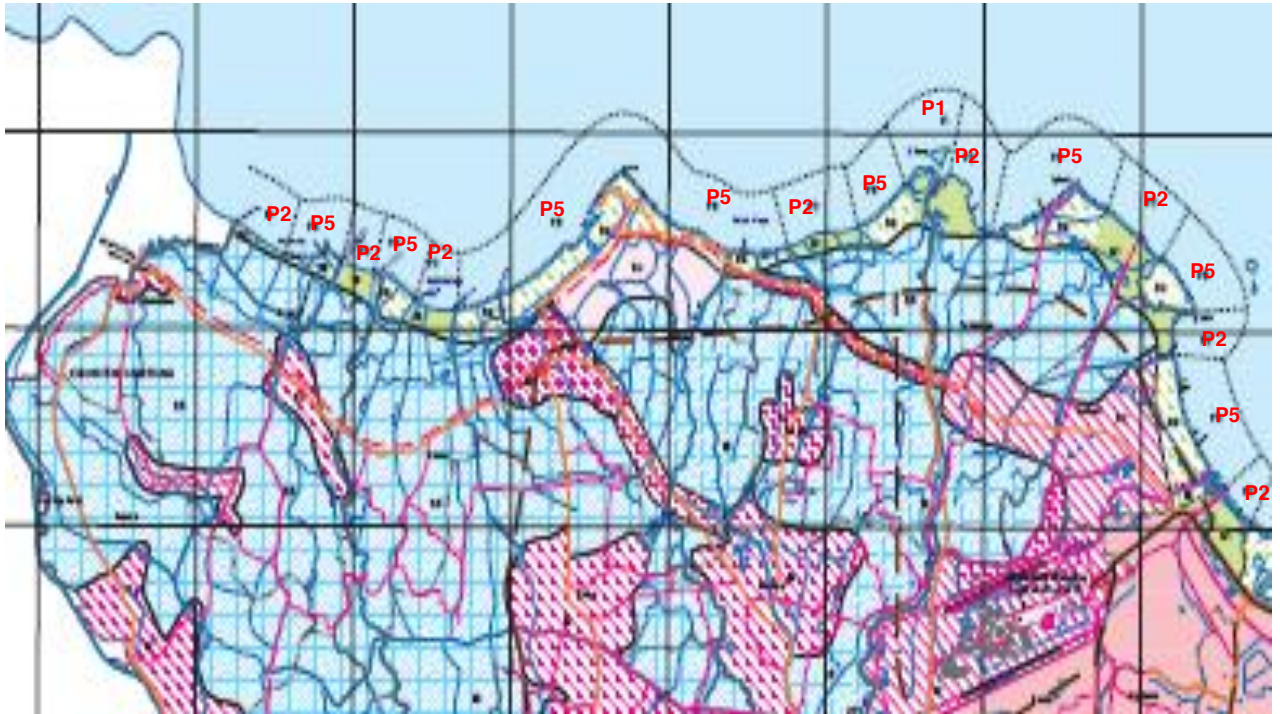
Jenis	Kriteria
	<p>karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, dan pelabuhan.</p> <p>Zona P4 merupakan : Zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai.</p> <p>Pemanfaatan ruang Zona P4 dilaksanakan melalui upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Zona B2 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai, tidak mengganggu fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, dan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; dan • Penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman 8 meter dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan. <p>Zona P5 merupakan : Zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6 dan/atau B7.</p> <p>Pemanfaatan ruang Zona P5 dilaksanakan melalui upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Zona B6 dan/atau B7 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai, dan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; • Penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 45 % dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman 8 meter, dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Kabupaten Tangerang

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur terdapat arahan terhadap penataan ruang untuk Kabupaten Tangerang khususnya kawasan Pantura Tangerang antara lain :

1. Arahan zonasi di kawasan Pantura Kabupaten Tangerang, meliputi :
 - Kawasan Pesisir Pantai Pantura meliputi zona N1, B2, B4, B6, P1, P2, dan P 5 dan pemanfaatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - Rencana Kawasan Pelabuhan International berada pada zona P2&P5.

Gambar 2.1. Penataan Ruang Kawasan Pantura Tangerang



Provinsi DKI Jakarta

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur terdapat arahan terhadap penataan ruang untuk Provinsi DKI Jakarta khususnya kawasan Pantura Jakarta antara lain :

2. Arahan zonasi di kawasan Pantura Jakarta, meliputi:
 - Kawasan Pesisir Pantai Pantura Jakarta meliputi zona N1, B1, B6, B7, P2, P3, dan P5. Pemanfaatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Bekasi

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur terdapat arahan terhadap penataan ruang untuk Kabupaten Bekasi khususnya kawasan Pantura Bekasi antara lain :

3. Arahan zonasi di kawasan Pantura Bekasi, meliputi:
 - Pemanfaatan kawasan pesisir pantai Pantura Bekasi meliputi zona N1, B1, B2, B4, B7, P1 dan P4. Pemanfaatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Raperda RTRW Kabupaten Tangerang

Dalam raperda RTRW Kabupaten Tangerang, khususnya yang menyangkut penataan ruang di kawasan Pantai Utara (pantura) terdapat beberapa kebijakan antara lain :

1. Pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura dilakukan dengan strategi :
 - a. Melaksanakan reklamasi sepanjang pantai utara kabupaten yang berjarak lebih dari 200 meter dari garis pantai.
 - b. Menyiapkan regulasi operasional pelaksanaan reklamasi.
 - c. Mengendalikan dampak penyelenggaraan reklamasi.
 - d. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan wilayah daratan kabupaten.
2. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten ditetapkan antara lain :
 - a. Menetapkan Kecamatan Teluknaga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp).
 - b. Menetapkan Kecamatan Kronjo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - c. Menetapkan Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kosambi sebagai Pusat Kegiatan local promosi (PKLp).
 - d. Menetapkan Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Sukadiri sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Fungsi dari setiap pusat kegiatan sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- a. PKWp Teluknaga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang dan kawasan pantai berhutan bakau.
- b. PKL Kronjo berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan dan kawasan pantai berhutan bakau.
- c. PKLp Mauk berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang dan kawasan pantai berhutan bakau.
- d. PKLp Kosambi berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang dan kawasan pantai berhutan bakau.
- e. PPK Mekar Baru berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan rendah.
- f. PPK Kemiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan kawasan pantai berhutan bakau.

- g. PPK Pakuhaji berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan kawasan pantai berhutan bakau
 - h. PPK Sukadiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan kawasan pantai berhutan bakau
3. Rencana sistem transportasi laut antara lain :
- a. Pengembangan fungsi pelabuhan perikanan di Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kronjo dan kecamatan teluknaga;
 - b. Pengembangan fungsi pelabuhan perikanan untuk skala besar di Kecamatan Sukadiri;
 - c. Rencana pembangunan pelabuhan khusus berada di kawasan reklamasi pantura, Teluknaga sebagai bagian dari pengembangan terminal pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta);
 - d. Rencana pembangunan pelabuhan curah batu bara di Kecamatan Kronjo dan Kemiri sebagai pendukung kegiatan dari PLTU Lontar;
 - e. Rencana pembangunan industri maritim untuk perbaikan kapal-kapal nelayan yang berlokasi di desa Kohod Kecamatan Pakuhaji.
4. Rencana pengembangan sistem air bersih, meliputi :
- a. Zona Pakumas melayani Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk dan kecamatan Sukadiri;
 - b. Zona Bojongered melayani Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi;
 - c. Zona IKK/Kejori melayani Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri.
5. Rencana pengembangan kawasan lindung :
- Kawasan lindung yang berada di Kabupaten Tangerang yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jabar Banten-KPH Bogor seluas 1.591,98 ha tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kosambi.
6. Rencana pengembangan kawasan budidaya:
- a. Kawasan Pertanian :
Kawasan pertanian lahan basah terdapat di Kecamatan pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mekar Baru, Mauk, Kemiri dan Sukadiri;
 - b. Kawasan Peternakan :
Kawasan peternakan terdapat dikecamatan Teluknaga dan Kecamatan Mauk.
 - c. Kawasan Perikanan :
Kawasan perikanan tambak terdapat dikecamatan Kronjo, Kecamatan Mekarbaru dan Kecamatan Mauk dengan luas lahan lebih kurang 2.789 ha.

d. Kawasan Industri :

Kawasan industri sedang terdapat di kecamatan Kosambi.

e. Kawasan Pergudangan :

Kawasan pergudangan dan industri terbatas terdapat di kecamatan Kosambi, Teluknaga.

7. Kawasan reklamasi pantai yang merupakan kawasan hasil kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut wilayah utara mulai dari Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadir, Mauk, Kemiri dan Kronjo, serta berjarak 200 meter dari garis pantai ke arah laut dengan luas lebih kurang 9.000 ha diperuntukan sebagai pengembangan kota pantai terpadu, meliputi :
- a. Kawasan permukiman perkotaan;
 - b. Kawasan pelabuhan terpadu;
 - c. Kawasan Industri.

2.2.3 Raperda RTRW PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang menyangkut penataan ruang di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) terdapat beberapa kebijakan, antara lain :

1. Kawasan pesisir Pantura ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pantura dengan ketentuan :
 - a. Pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.
 - b. Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan kepelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan pantura.
 - c. Penyelenggaraan reklamasi Pantura diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.
 - d. Penataan kembali kawasan daratan Pantura diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.
 - e. Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura, dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.

2. Pengembangan kawasan pantura harus menjamin :
 - a. Terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut;
 - b. Pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum;
 - c. kepentingan perikehidupan nelayan;
 - d. Kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah;
 - e. Kepentingan dan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanan negara;
 - f. Terselenggaranya pengembangan sistem prasarana sumber daya air secara terpadu;
 - g. Tidak memberikan tambahan resiko banjir di daerah hulunya baik akibat rob, kenaikan permukaan laut/sungai;
 - h.** Terselenggara/berfungsinya objek/instalasi vital di kawasan Pantura dengan memperhatikan aspek-aspek ekologis lingkungan.
3. Pengembangan kawasan Pantura harus memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. Peningkatan fungsi Pelabuhan;
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi;
 - c. Pengembangan areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk pusat wisata, pusat perdagangan/jasa, dan pelayaran rakyat secara terbatas;
 - d. Dilaksanakan serasi dengan penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu;
 - e. Pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan konservasi nilai budaya daerah dan bangsa serta kebutuhan wisata nasional dan internasional; dan
 - f. Didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu.
4. Pengembangan kawasan Pantura dibagi menjadi beberapa sub-kawasan dengan memperhatikan kondisi kawasan daratan Pantura dan perairan di sekitarnya. Sub-kawasan tersebut merupakan satu kesatuan perencanaan yang dikembangkan dengan sistem infrastruktur terpadu.
5. Sumber daya air di Kawasan Pantura diatur sebagai berikut :
 - a. Sistem prasarana sumber daya air di kawasan reklamasi Pantura merupakan bagian dari sistem prasarana sumber daya air makro dan jalur perpanjangan saluran dan sungai yang melalui kawasan daratan pantai.
 - b. Untuk mencegah banjir yang mungkin terjadi pengembangan kawasan Pantura harus mengembangkan sistem jaringan drainase dan sistem pengendalian banjir yang direncanakan secara teknis termasuk waduk penampungan air dengan rasio minimal per pulau sebesar 5 %.
 - c. Waduk penampungan air sebagaimana dimaksud pada huruf c, berfungsi sebagai ruang terbuka.

- d. Penyediaan air bersih di kawasan Pantura dilakukan dengan cara-cara ramah lingkungan dan mengarah kepada *sustainable solution* dengan memanfaatkan alternatif sumber air baku baru dan dilengkapi dengan sistem jaringan perpipaan secara terpadu.
 - e. Pengelolaan penyediaan air bersih dapat dilaksanakan secara mandiri dengan mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang ada dan/atau membangun sistem pengolahan teknologi yang baru.
6. Pengelolaan limbah cair di Kawasan Pantura diatur sebagai berikut :
- a. Limbah cair rumah tangga dan/atau limbah cair yang bersumber dari kegiatan lain wajib memenuhi baku mutu limbah cair yang pengelolaannya dilakukan dengan cara modul dan/atau terpusat.
 - b. Limbah cair yang memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, disalurkan ke saluran umum dan tidak berakibat pada penurunan kualitas air laut, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pantura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurang-kurangnya mencakup :
- a. Rencana teknik reklamasi;
 - b. Rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi;
 - c. Rencana rancang bangun;
 - d. Rencana penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. Analisis dampak lingkungan;
 - f. Rencana kelola lingkungan;
 - g. Rencana pemantauan lingkungan;
 - h. Rencana lokasi pengambilan bahan material;
 - i. Rencana pembiayaan; dan
 - j. Rencana pengelolaan air bersih dan air limbah serta pengendalian banjir.
8. Pengembangan dan perencanaan reklamasi dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. Pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena kenaikan muka air laut, penurunan muka air tanah dan muka tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara serta persoalan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan dan air tanah;
 - b. Reklamasi dilakukan dalam bentuk pulau yang ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci dengan memperhitungkan masa perancangan, keandalan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir, dan tindakan mitigasi, perlindungan hutan bakau, serta jalur lalu lintas laut, pelayaran dan pelabuhan;

- c. Dalam perencanaan reklamasi tercakup rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengerukan sungai/kanal;
 - d. Setiap pulau reklamasi menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau yang berfungsi sebagai penampungan air sementara ketika hujan, persediaan air untuk beberapa kebutuhan harian sumber air yang mungkin untuk di kembalikan ke dalam lapisan akuifer, tempat hidupnya beberapa flora dan fauna, serta untuk rekreasi; dan
 - e. Ruang perairan di antara pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir;
9. Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan :
- a. Relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar;
 - b. Revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah;
 - c. Perbaikan lingkungan, pemeliharaan kawasan permukiman dan kampung nelayan;
 - d. Peremajaan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
 - e. Peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai untuk mengantisipasi banjir akibat rob dan meluapnya air sungai;
 - f. Perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan;
 - g. Relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun;
 - h. Pelestarian hutan bakau dan hutan lindung;
 - i. Perluasan dan peningkatan fungsi Pelabuhan; dan
 - j. Pengembangan pantai untuk kepentingan umum.
10. Pusat kegiatan tersier sebagaimana, di Kota Administrasi Jakarta Utara/Kawasan Pantura ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kantor Walikota Jakarta Utara sebagai pelayanan fungsi khusus;
 - b. Kawasan Sunter sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran;
 - c. Kawasan Pasar Kojas sebagai fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya; dan
 - d. Kawasan Pasar Pluit sebagai pusat perdagangan, jasa dan perkantoran.
11. Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :
- a. Pembangunan jaringan prasarana air limbah dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan sekitar waduk dan/atau kawasan reklamasi Pantura;

- b. Pengembangan sistem prasarana air bersih melalui jaringan perpipaan pada tiap kecamatan;
 - c. Rehabilitasi Waduk Sunter, Don Bosco, Pluit, Muara Angke, Teluk Gong, dan Tol Sedyatmo dan pembangunan Waduk Marunda sebagai tempat penampungan air sementara;
 - d. Pembangunan septiktank komunal di kawasan padat sedang terutama di perumahan kumuh.
12. Rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :
- a. Normalisasi Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Sunter, Kali Ciliwung, Kali Kamal Muara, Kali Tanjungan, Kali Banglio, dan Kali Baru;
 - b. Memantapkan Banjir Kanal Timur sebagai prasarana pengendali banjir;
 - c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air di kawasan Jalan Tol Sedyatmo, Kawasan Pluit, Kelapa Gading, Tugu Utara, Kebon Bawang, Rawa Badak, dan Pademangan;
 - d. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di kali Kamal, Banjir Kanal Barat, Kali Sunter, Kali Cakung dan Kali Ciliwung;
 - e. Pembangunan fisik diarahkan menghadap sungai (*river front development*);
 - f. Pembangunan sistem polder baru dan pemulihan sistem polder yang sudah ada di sistem polder terutama di Sunter Timur III, Kelapa Gading, Tunjungan, Yos Sudarso, Muara Angke, Pluit, Sunter Selatan, Sunter Timur I, Sunter Utara, Teluk Gong, Bimoli, Gaya Motor, Kapuk Muara;
 - g. Pemulihan Situ Rawa Kendal;
 - h. Pelarangan pembuangan sampah ke dalam sungai dan kanal dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
 - i. Pengelolaan situ Sunter Barat, Sunter I, Sunter II, Teluk Gong dan Pluit
13. Rencana kawasan budi daya di Kota Administrasi Jakarta Utara/Kawasan Pantura meliputi :
- a. Kawasan terbuka hijau budi daya;
 - b. Kawasan perumahan dan fasilitasnya;
 - c. Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - d. Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman;
 - e. Kawasan pariwisata;
 - f. Kawasan pemerintahan daerah;
 - g. Kawasan terbuka biru;
 - h. Kawasan perikanan; dan
 - i. Kawasan industri dan pergudangan.

14. Rencana pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. Perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang melalui program tribina;
 - b. Mengembangkan peremajaan lingkungan perumahan kumuh berat;
 - c. Mendorong pengembangan kawasan permukiman vertikal dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. Mengembangkan perumahan menengah-atas di areal reklamasi Pantura;
 - e. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan;
 - f. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa sekaligus melestarikan lingkungan;
 - g. Mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan di kawasan pantai lama;
 - h. Mempertahankan fungsi perumahan di kawasan mantap di Kota Tua, dan Pluit;
 - i. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman horizontal;
 - j. Mengembangkan kawasan permukiman di Kawasan Pantai Lama;
 - k. Pengendalian pembangunan perumahan baru di Pademangan, Cilincing dan Penjaringan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - l. Pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun sederhana di perumahan kumuh berat sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kalibaru, Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjaringan dan melengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan sosial;
 - m. Pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, dan Penjaringan yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir; dan
 - n. Rencana pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan tingkat kepadatan lingkungan
15. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan;
 - b. Mengembangkan kawasan perdagangan di Pantura dengan pola pengembangan multifungsi atau super blok dengan fasilitas bertaraf internasional;
 - c. Menata fungsi kawasan kota tua untuk mendukung kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan pariwisata;

- d. Mengembangkan kawasan perdagangan, jasa, dan perkantoran di Tanjung Priok dan sebagian Kelapa Gading;
 - e. Membatasi pengembangan perdagangan, jasa. dan perkantoran sepanjang jalan arteri primer dengan memperhatikan lalu lintas dan penyediaan parkir;
 - f. Pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum berdasarkan arahan penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Yos Sudarso untuk menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan
 - g. Mengembangkan pusat perdagangan dengan KDB rendah di Kamal, Kapuk, Pademangan, Ancol, Cilincing, dan sebagian Kelapa Gading.
16. Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa taman dilaksanakan pada kawasan Marunda dengan penerapan intensitas rendah dan meningkatkan daya resap air pada kawasan terbangun.
17. Rencana pengembangan kawasan campuran dilaksanakan berdasarkan arahan pengembangan kawasan campuran, perdagangan, dan jasa dengan perumahan vertikal dan horisontal terutama di kawasan sebagai berikut :
- a. Jalan Lodan;
 - b. Jalan Martadinata;
 - c. Jalan Yos Sudarso;
 - d. Kawasan Cilincing; dan
 - f. Kawasan Sunter.
18. Rencana pengembangan kawasan pariwisata diarahkan untuk pengembangan kawasan destinasi wisata pesisir, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sentra Perikanan Muara Angke;
 - c. Masjid dan Makam Luar Batang;
 - d. Pelabuhan dan Kota Tua Sunda Kelapa;
 - e. Pusat Perbelanjaan Mangga Dua;
 - f. Taman Impian Jaya Ancol;
 - g. Bahtera Jaya dan Yacht Club;
 - h. Stasiun Tanjung Priok;
 - i. Masjid Islamic Center;
 - j. Gereja Tugu;
 - k. Kampung Tugu;
 - l. Cagar Budaya Rumah si Pitung;
 - m. Masjid Al Alam; dan
 - n. Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading

19. Rencana pengembangan kawasan perikanan dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :
 - a. Pelarangan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi pada tiap kecamatan yang berbatasan dan/atau memiliki kawasan perairan laut;
 - b. Pengembangan prasarana budi daya perikanan di Muara Baru dan Muara Angke sesuai dengan klasifikasinya; dan
 - c. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup pada tiap kecamatan.
20. Rencana pengembangan kawasan industri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membatasi kegiatan industri di kawasan yang sudah ada di Penjaringan dan Cilincing;
 - b. Mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing; dan
 - c. Penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal.
21. Pemanfaatan ruang kawasan industri dilaksanakan berdasarkan arahan:
 - a. Penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing dan Kali baru; dan
 - b. Relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dari Ancol Barat, Marunda, dan Cilincing.
22. Rencana pengembangan kawasan pergudangan dengan cara :
 - a. Mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengatasi perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa;
 - b. Relokasi kawasan pergudangan dari Kawasan Kota Tua; dan
 - c. Penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal
23. Pemanfaatan ruang untuk mengembangkan kawasan pergudangan dilaksanakan berdasarkan arahan melalui penyediaan fasilitas pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa yang dilaksanakan di Penjaringan, Koja dan Cilincing.
24. Pengembangan tatanan kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai dengan fungsinya, dilakukan di:
 - a. Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Pelabuhan Marunda (Pelabuhan Ali Sadikin);
 - c. Pelabuhan Sunda Kelapa;

- d. Pelabuhan Muara Baru; dan
- e. Pelabuhan Muara Angke.

2.2.3 Raperda RTRW Kabupaten Bekasi

Dalam raperda RTRW Kabupaten Bekasi, khususnya yang menyangkut penataan ruang di kawasan Pantai Utara (pantura) terdapat beberapa kebijakan antara lain :

1. Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas, meliputi :
 - a. Mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Tamajaya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Babelan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - c. Mempercepat perwujudan pengembangan Desa Bahagia-Kecamatan Babelan, Desa Pusaka Rakyat-Kecamatan Tarumajaya dan Desa Pantai bahagia-Kecamatan Muaragembong untuk mengemban fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
2. Strategi peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung, meliputi :
 - a. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan dan merehabilitasi secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - b. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung melalui pengembangan wanafarma, ekowisata, agroforestry.
3. Strategi optimalisasi pendayagunaan kawasan budidaya secara sinergi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, meliputi :
 - a. Mendayagunakan dan meningkatkan fungsi utama hutan produksi melalui pengelolaan hutan yang dapat dikonversi menjadi budidaya lainnya serta pemanfaatan jasa lingkungan;
 - b. Mempertahankan kawasan pertanian lahan basah dan/atau beririgasi teknis;
 - c. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah menjadi kegiatan budi daya lainnya;
 - d. Mengembangkan fungsi kawasan pertanian lahan kering secara terpadu dengan kawasan peternakan dan perkebunan;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan hunian vertikal bersubsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah di kawasan perkotaan untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh perkotaan;
 - f. Mengembangkan permukiman mandiri yang berwawasan lingkungan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman;

- g. Mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketersediaan sarana dan prasarana;
 - h. Mendorong penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Bekasi;
 - i. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri manufaktur di luar kawasan industri pada kawasan sekitar koridor jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Bekasi – Kabupaten Karawang;
 - j. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri berbasis agro dan agribisnis melalui dukungan insentif perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan agribisnis;
 - k. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan sumber daya buatan melalui pengembangan wanafarma, ekowisata, *agroforestry* untuk pengembangan potensi kepariwisataan
4. Rencana sistem perkotaan, meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kecamatan Tarumajaya;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Babelan, dan Muaragembong;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Desa Bahagia – Kecamatan Babelan, Desa, Pusaka Rakyat – Kecamatan tarumajaya dan Desa Pantai Bahagia – Kecamatan Mauragembong.
 5. Rencana pengembangan transportasi laut yaitu pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;
 6. Rencana pengembangan transportasi udara, yaitu pembangunan bandar udara barang perintisan di utara Kabupaten Bekasi.
 7. Rencana pengembangan pelayanan energy listrik meliputi :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan uap (PLTGU) Muara Tawar Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Batubara di Kecamatan Babelan.
 8. Pengembangan pemanfaatan gas alam SPPBE di Kecamatan Cikarang Utara, **LNG Terminal di Kecamatan Muaragembong, PLTGU di Muara Tawar Kecamatan Tarumajaya, dan LPG Plant di Desa Hurip Jaya di Kecamatan Babelan;**

9. Pengembangan jaringan air baku untuk air minum, meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas produksi 11 (sebelas) instalasi pengolahan air (IPA) di Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah IPA Babelan.
 - b. Peningkatan jangkauan distribusi pelayanan jaringan air minum dengan sistem perpipaan hingga enam puluh persen.
 - c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10. Sistem pengendalian banjir, meliputi :
 - a. Normalisasi sungai;
 - b. Pembangunan banjir kanal;
 - c. Pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);
 - d. Pembangunan dan pengembangan pintu air;
 - e. Pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman;
 - f. Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri;
 - g. Penanaman pohon di sepadan sungai, situ, rawa dan lahan-lahan kritis.
11. Rencana jalur evakuasi bencana meliputi :
 - a. Jalur evakuasi **bencana alam gelombang pasang/abrasi** di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana gelombang pasang/abrasi;
 - b. Jalur evakuasi **bencana alam banjir** di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir.
12. Rencana pengembangan Kawasan lindung seluas kurang lebih 5.449 Ha, meliputi:
 - a. Mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. Mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;
 - c. Merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan hutan lindung;
 - d. Mengembangkan ekowisata dan agroforestri.
13. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang terdapat di kawasan mangrove Kecamatan Muaragembong dengan luas kurang lebih 5.311 Ha atau sekitar 4 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten;

14. Kawasan peruntukan hutan produksi terdapat di Kecamatan Muaragembong, Babelan dan Cabangbungin dengan luas sekitar 5.239 Ha. Kawasan hutan produksi dapat dikonversi menjadi permukiman baru, kegiatan agroindustri, pergudangan, pelabuhan, pariwisata, dan kegiatan perkotaan lainnya.
15. Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :
 - a. Kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong;
 - b. Kawasan perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya;
16. Kawasan peruntukan pertambangan golongan strategis yaitu pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Babelan.
17. Pengembangan Kawasan peruntukan industri, meliputi :

Pengembangan industri besar di Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan;
18. Kawasan peruntukan pesisir dan laut, meliputi Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan;
 - a. Pengembangan kawasan peruntukan pesisir dan laut meliputi pengembangan kawasan permukiman nelayan dan bisnis kelautan;
 - b. Pengembangan kawasan permukiman nelayan terdapat di Kecamatan Tarumajaya;
 - c. Pengembangan kawasan bisnis kelautan diarahkan untuk :
 - Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan di Muara Bendera Kecamatan Muaragembong;
 - Pengembangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan;
 - Pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan di kecamatan Muaragembong;
 - Pengembangan kawasan pertambangan migas di Kecamatan Muaragembong;
 - Pembangunan terminal khusus Marunda Center di Kecamatan Tarumajaya;
19. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK):
 - a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi yaitu Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya;
 - b. KSK bidang social budaya adalah Kecamatan Babelan;
 - c. KSK bidang kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, berupa sumber alam minyak dan gas bumi adalah Kecamatan Babelan, Kecamatan Muaragembong dan Kecamatan Tarumajaya.

BAB III
PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1 Land Subsidence, Rob, Banjir dan Genangan

- Land Subsidence, Rob, Banjir dan genangan merupakan masalah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi
- Banjir erat hubungannya dengan wilayah ekologis antara daerah atas/hulu dan daerah hilir yang saling berhubungan. Peningkatan air laut dan intensifnya kejadian land subsidence menyebabkan terjadinya rob yang makin intens dan akan merupakan fenomena yang menonjol kedepan sejak tahun 2009
- Banjir, genangan dan rob akan semakin mengancam pantura mengingat : wilayah pesisir teluk Jakarta merupakan daratan delta yang terbentuk akibat sedimentasi Cisadane dan Citarum yang sangat tinggi sedangkan di bagian tengah (jakarta) sedikit mengandung sedimen, dan cenderung merupakan tanah lunak; letak 40 % daratan jakarta dibawah muka laut; penyedotan air tanah yang sangat intensif dan berlebihan; pengaruh pemanasan global yang semakin nyata dan peningkatan muka air laut
- Lonjakan penduduk akan melonjakan pengambilan air tanah. Daerah delta, lokasi yang rendah dengan tanah lunak dan pengambilan air tanah yang intensif akan menyebabkan Land subsidence semakin intens. Hal tersebut merupakan skenario yang sudah disadari dari thn 1994, namun skenario tersebut tidak pernah terkontrol pada tahun tahun selanjutnya, dan LS terus terjadi dengan data 5-10 cm/tahun (jica) Kondisi diatas membuktikan bahwa efek dari tindakan akan menyebabkan efek akibat (walaupun LS ini tidak sepenuhnya linier)
- Masalah sekaligus tantangan yang erat dengan tata ruang adalah ruang biru yang sangat tidak memadai; terjadinya erosi; sedimentasi dan pemeliharaan
- Pengerukan mempunyai efek menurunkan muka air laut. Pengerukan di areal muara akan menurunkan muka air laut, sehingga rob dapat dikurangi dampaknya
- Faktor kontrol sesungguhnya ada di manusia, hal ini sangat penting dipahami dalam menentukan kebijakan
- Faktor manajemen sangat penting dengan mempertimbangkan faktor surplus dan faktor defisit air sehingga kunci manajemen air adalah WATER BODY RATIO.
- Laut haruslah lebih tinggi dari daratan. Hal ini menjadikan tanggul sebagai ide untuk penanggulangan rob, sehingga pembangunan reklamasi harus dipandang bukan semata mata utk meperluas dan memperoleh lahan baru tapi harus diintegrasikan bahwa reklamasi sebagai upaya utk mengatasi penurunan muka air tanah.
- Dalam hal kebijakan pembuatan tanggul ini aspek keamanan lingkungan harus menjadi pertimbangan. Sanitasi yang masih buruk perlu ditingkatkan dengan adanya treatment treatmen khusus, sedimentasi harus ditekan, juga dampak terhadap marine aqualive harus dijaga

- Jadi Reklamasi yang akan dilakukan harus dipadukan dengan/sebagai upaya penurunan banjir dan penurunan terhadap dampak Rob juga diimbangi dengan penyimpanan air dimusim surplus sbg upaya penyediaan air dimusim kering
- Dari uraian uraian diatas diusulkan tahapan kebijakan adalah : 1. penyediaan air perpipaan untuk menekan penggunaan air tanah 2. konservasi air 3. penyediaan ruang biru 4. peningkatan kualitas air 5. pembuangan tanggul (terakhir)

3.2 Abrasi, Sedimentasi dan Degradasi Ekosistem Mangrove

- Pengelolaan Wilayah pesisir merupakan potret wilayah, oleh karena itu prinsip /acuan nya harus sama. Yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah coastal zone yang terdiri dari wilayah laut dan wilayah darat. Permasalahannya adalah sampai dimana batas batas nya dan batas ini tidak sama disetiap daerah
- Wilayah pesisir ini penting untuk dikelola karena hubungannya dengan konteks pemanfaatan
- Terdapat beberapa pendekatan : 1. pendekatan ekologis di Darat adalah : batas laut berpengaruh ke darat (melalui Intrusi) di Laut adalah batas darat (seperti sedimen) berpengaruh ke laut. Batas wilayah pesisir menjadi sangat luas maka biasanya ditentukan batas perencanaan. 2. Pendekatan DAS yaitu batas sejauh hubungan hulu–hilir. Pantura teluk jakarta meliputi 3 propinsi dan wilayah Jabodetabekpunjur 3. pendekatan administrasi (yang dianut UU no 27/2008) wilayah pesisir mempunyai batas darat kecamatan dan batas laut 12 mil
- Batas horizontal Pantura teluk jakarta mudah ditentukan (90 KM) namun batas vertikal sulit ditentukan yaitu mulai dari tanjung Kait sampai Tanjung Kerawang. Kep seibu merupakan pulau pulau sangat sangat kecil dan termasuk dalam wilayah pesisir patura teluk Jakarta
- Masalah Tata Ruang adalah konflik yang terjadi antara perikanan budidaya dengan perhubungan laut dan industri dan konflik industri dengan pariwisata
- Dalam kaitannya dengan KLHS diusulkan secara bertahap seperti pada gambar
- Terdapat 6 isu utama bio-fisik di pantura yaitu : 1. degradasi ekosistem wilayah pesisir (mangrove) 2. pencemaran perairan 3. abrasi pantai 4. pemanfaatan ruang 5. perikanan budi daya 6. perikanan tangkap
- Degradasi mangrove disebabkan oleh 1. alih fungsi lahan menjadipelabuhan, tamak dan wisata 2. pencemaran perairan oleh sampah dan 3. tingginya abrasi sp 30 cm/tahun
- Abrasi banyak terjadi disepanjang pantai dan juga akibat konflik pemanfaatan ruang
- Sebagai upaya mengatasi abrasi dilakukan penanaman mangrove. Namun penanaman mangrove ini perlu dilakukan dengan soft capture padahal yang ada sekarang hard capture sehingga rehabilitasi yang dilakukan tidak berhasil. Sebanyak mangrove yg ditanam sebanyak itu pula yang mati. Penanaman soft capture adalah memanfaatkan

rekayasa teknologi dengan system penemon apaung dan buis beton/bambu sehingga kualitas/kuantitas sedimen terkontrol seperti di kamal muara.

- Perikanan Budi daya seperi kerang hijau di jakarta sangat bagus karena high organik, namun banyaknya industri penghasil logam berat merupakan ancaman terhadap kualitas kerang budi daya. Bagan/ rakit rakit juga mengganggu alur pelayaran. Saat ini tidak ada jaminan utk alih profes
- Perikanan tangkap mempunyai masalah mengingat TPI TPI yang ada menampung ikan ikan dari luar teluk jakarta. Untuk itu perlu ada pengalihan pendekatan kearah industri perikanan

3.3 Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih

- Luas lahan di DKI Jakarta dibandingkan dengan besarnya penduduk Jakarta (9.6 juta jiwa) menyebabkan Jakarta tidak lagi dapat menampung penduduknya secara layak.
- Salah satu masalah yang menjadi isu adalah kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih ini disebabkan karena kelangkaan air baku air minum.
- 82 % (?) supply air baku air minum DKI berasal dari luar DKI Jakarta yaitu dari Tarum Barat dan dari Cisadane. Hanya sebagian kecil saja (2.2 %) yang berasal dari jakarta sendiri seperti Instalasi Krukut dan condet yang seakan akan mati suri.. Hal ini menyebabkan tarif air bersih tertinggi di bandingkan jepang dan korea dan kualitasnya terendah dibandingkan vietnam.
- Kondisi tersebut disebabkan pencemaran yang tinggi; kebocoran yang besar dan tidak adanya air baku air minum yang layak.
- Kondisi air perpipaan tersebut mendorong masyarakat semakin besar memanfaatkan air tanah khususnya di Jakarta Utara dimana Jakarta Utara merupakan sumber knflik, sumber kemiskinan dan tidak terlayani oleh air perpipaan.
- Pelayanan air bersih di Jakarta baru mencapai 44% dan Peta kerawanan air bersih pada tingkat kelurahan menunjukan hampir seluruh kelurahan rawan air bersih. Hanya 2 kelurahan yang tidak termasuk rawan air bersih dari 31 kelurahan di jakarta utara, yaitu kelapa gading Barat dan kelapa gading timur. Kelurahan yang terparah berada di bagian Barat (kamal) yang berada di depan Bandara.
- Dari data diatas maka target tahun 2015 air perpipaan mengcover 80 % penduduk sangat tidak memungkinkan.

3.4 Pengendalian Pencemaran dan Penanganan Sampah

- Pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ratio debit sungai 13 sungai sangat tinggi sehingga semua sungai di jakarta sudah mengalami kerusakan secara ekosistem yang berdampak pada tingginya pencemaran dimana tidak ada satu sungaipun di DKI Jakarta yang memenuhi kelas airnya atau peruntukannya. Oleh karena itu pengelolaan air pada musim hujan (surplus) dan

musim kemarau (defisit) merupakan satu paket manajemen. Melihat situasi dan kondisi yang hampir sama dengan Jakarta maka kab. Bekasi dan Kab. Tangerang mengalami hal yang sama.

- Pencemaran air sungai di daratan mempengaruhi kualitas air laut. Pada jarak ke satu (+/- 5 km dari pantai) perairan laut telah mengalami pencemaran berat khususnya organik yang tinggi dan di beberapa lokasi telah mengalami septik, dimana pada musim peralihan terjadi turbulensi yang berdampak terhadap kematian ikan. Fenomena kematian ikan frekuensinya cenderung makin tinggi
- Selain Pencemaran organik yang perlu diwaspadai adalah pencemaran logam berat seperti tembaga (Cu) dan Cadmium (Cd) yang keberadaannya semakin merata diseluruh lokasi dan sifat dampaknya yang kumulatif.

3.5 Pemanfaatan Ruang Laut

3.6 Sosial Ekonomi

Berikut adalah uraian beberapa aspek mendasar kebijakan yang terkait langsung dengan isu strategis yang terungkap dalam FGD KLHS Pantura Teluk Jakarta. Aspek tersebut bisa terdapat baik dalam dokumen RTRW, RUPE, RUPS dan berbagai program kebijakan yang lebih spesifik lainnya.

Aspek Visi Pembangunan

Isu Strategis : Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta

Saat ini belum ada satu pun dokumen kebijakan baik di tingkat provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Jawa Barat maupun di tingkat nasional yang cukup meyakinkan mengenai visi besar, strategi dan skenario peningkatan daya saing wilayah Jabodetabek (*Greater Jakarta*) termasuk kawasan urban pesisir utara Teluk Jakarta dalam menghadapi persaingan global maupun regional yang semakin nyata. Sebagai contoh pelabuhan laut di Teluk Jakarta atau di wilayah Jabodetabek tidak bisa secara efektif mengambil manfaat ekonomi dan sosial dari besarnya arus lalu-lintas kontainer barang yang melalui perairan Indonesia yang notabene sekitar 40 % dari seluruh arus kontainer barang dunia. Hampir semua manfaat dan nilai tambah diambil oleh pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Pertanyaannya bagaimana pengembangan pelabuhan di Indonesia khususnya di pulau Jawa dan wilayah greater Jakarta mengantisipasi hal tersebut. Adakah kaitan reklamasi terhadap peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan agar menjadi jauh lebih kompetitif? Adakah kaitan antara jaringan jalan raya dan kereta api yang akan dibuat berkaitan dengan isu peningkatan daya saing regional tersebut?

Sementara itu efektivitas peran sentral wilayah DKI Jakarta sebagai hub nasional juga patut diwaspadai keberlanjutannya. Banyak komoditi nasional baik yang berupa barang maupun jasa yang proses peningkatan nilai tambahnya dalam rangkaian rantai pasok justru terjadi di luar Indonesia seperti pengolahan komoditi cacao di Singapura dan penyelenggaraan pertunjukan budaya adiluhung Indonesia yang justru terjadi di gedung konser di Singapura.

Pertanyaan strategisnya apakah seluruh kebijakan pengembangan infrastruktur ekonomi, perdagangan dan sosial budaya yang ada baik itu pelabuhan kontainer, pelabuhan curah, pendaratan ikan, pengembangan waterfront dan reklamasi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan sebagainya hanya sekedar merespon tekanan internal dan domestik saat ini saja?

Jika ternyata jawabannya hanya sekedar merespon tantangan dan tekanan internal saja maka hal ini tentu belum memberi jaminan keberlanjutan prospek pengembangan ekonomi wilayah ini dari tantangan dan tekanan persaingan regional maupun global. Selayaknya setiap pengembangan yang ada hakekatnya merupakan suatu upaya konsolidasi asset/sumberdaya yang terpadu guna lebih meningkatkan daya saing dan keberlanjutan peradaban kota di wilayah Greater Jakarta khususnya di wilayah Pesisir Teluk Jakarta.

Aspek Keterpaduan Pengembangan Wilayah Teluk Jakarta

Isu Strategis : Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup

Salah satu tantangan terbesar pada era reformasi saat ini adalah merebaknya iklim keterbukaan dan peningkatan aspirasi otonomi daerah yang sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan mewujudkan perencanaan pengembangan aset secara terpadu dan lintas wilayah. Akibatnya secara spasial saja dengan mudah diidentifikasi betapa parsialnya pengembangan yang telah terjadi. Pengembangan yang terbentuk lebih merupakan cluster-cluster yang tidak terkoneksi dengan baik, tidak terpadu dan bahkan seringkali saling bertentangan. Sebagai contoh pertentangan yang terjadi tersebut antara lain:

- *Pertentangan peruntukan.* Di wilayah Dadap Kosambi Tangerang adalah zona industri dan pergudangan sementara bagi DKI Jakarta daerah Kamal merupakan zona konservasi
- *Ketidakharmonisan cluster pengembangan.* Di Muara Angke merupakan cluster pendaratan ikan, pengolahan ikan dan pemukiman sederhana yang sangat sulit dalam pengelolaan limbahnya langsung bertetangga dengan cluster hutan angke yang merupakan area konservasi
- *Ketidak paduan cluster.* Cluster Kemayoran dengan cluster Ancol yang sama-sama merupakan kawasan pengembangan bernilai tambah tinggi ternyata hanya dipisahkan

oleh sepenggal area pemukiman padat horizontal Pademangan dan Pesanggrahan. Ketidak paduan ini menghilangkan potensi nilai tambah yang lebih besar bagi DKI Jakarta secara umum

- *Ketidakseimbangan struktur sosial.* Hampir di sepanjang area pesisir Jakarta terjadi ketidakseimbangan struktur sosial pemukiman dalam pemanfaatan ruang wilayahnya. Kenyataan hari ini kawasan pemukiman yang terdapat di area ini hanyalah kawasan pemukiman terencana dari golongan sangat kaya dan kawasan pemukiman kelas bawah yang sebagian besar berupa perkampungan kota yang padat-horisontal dan tumbuh nyaris secara otonom. Nyaris tidak ada pemukiman kelas menengah terencana yang ada, secara observasi visual hanya daerah Pluit yang terdapat pemukiman kelas menengah. Kondisi ini menyebabkan pertentangan antar kelas mudah terjadi sebab kelas sangat atas langsung berhadapan dengan kelas sangat bawah. Kelas bawah sangat mudah mengidap kecemburuan sosial sementara kelas atas mengidap paranoia sosial. Kecenderungan semakin maraknya fenomena “gated communities” di pemukiman atas membuktikan hal ini. Ketimpangan struktur sosial ini dapat menjadi lahan subur bagi radikalisme sosial. Jika fenomena ini dibiarkan terus maka kerukunan sosial yang merupakan modal sosial negara Pancasila yang sudah sejak lama kita pupuk dan pelihara ini akan semakin tergerus bahkan bisa menjadi kenangan belaka.

Pada kesempatan perencanaan pengembangan kawasan pantura Teluk Jakarta berikutnya selayaknya diupayakan peningkatan keseimbangan, keterpaduan dan harmonisasi jenis peruntukan antar cluster pengembangan di area yang akan direvitalisasi maupun di area baru hasil reklamasi.

Aspek Pengelolaan Pertumbuhan dan Kepadatan Wilayah Pesisir Teluk Jakarta

Isu Strategis : Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal

Gejala urban sprawl di wilayah Jabodetabek secara umum terutama ditandai dengan meluas secara tidak terkendalinya wilayah pemukiman horizontal. Sebagai contoh wilayah pemukiman DKI Jakarta berdasarkan statistik BPS meliputi hampir 65% seluruh total wilayahnya (total wilayah 670 km²). Seluruh areal pemukiman di DKI Jakarta menampung sekitar 9 juta penduduk maka kepadatan di area pemukimannya sekitar 207 orang per hektar. Bandingkan dengan 4 juta penduduk Singapura yang hanya ditampung di 12 % saja dari total wilayahnya (total wilayah hampir serupa yaitu 680 km²) atau dengan kepadatan sekitar 497 orang per hektar. Perbandingan ini membuktikan bahwa kepadatan bukanlah isu pokoknya melainkan cara kita mengelola kepadatan lah yang menjadi isu pokok yang harus dijadikan arahan kebijakan. Wilayah pemukiman Singapura yang lebih padat dan berorientasi vertikal ternyata memiliki kualitas lingkungan binaan yang jauh lebih baik mutunya dari kebanyakan pemukiman padat horizontal di Jakarta.

Kepadatan yang efisien memungkinkan suatu tatanan kawasan campuran dan kehadiran ruang terbuka. Semua ini juga bermula dari paradigma perencanaan kota dan wilayah yang lebih mengutamakan pejalan kaki dan transportasi massal daripada kendaraan pribadi. Pelajaran berharga yang dapat ditarik bagi kebijakan perencanaan wilayah pesisir utara Teluk Jakarta yang baru, seperti di area yang akan direklamasi ataupun peremajaan area yang akan direvitalisasi, adalah sangat jelas yaitu tidak ada ruang lagi untuk pengembangan pemukiman yang bersifat horizontal.

Pengembangan wilayah kota selanjutnya diarahkan menjadi pemukiman vertikal kompak dan terpadu dengan kawasan campuran yang memungkinkan hadirnya berbagai fasilitas penting kota hanya dalam jangkauan pejalan kaki. Ruang terbuka publik dan taman-taman pun akan lebih mungkin dialokasikan secara signifikan. Konsolidasi dan keterpaduan utilitas dan infrastruktur publik pun akan lebih mudah diwujudkan dan idealnya terkoneksi langsung pula dengan jaringan transportasi massal.

Aspek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir Teluk Jakarta

Isu Strategis : Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah

Karena tiadanya visi pengembangan kawasan yang kuat di wilayah Pantura dan juga di sepanjang DAS dan badan air lainnya maka arah pertumbuhan pengembangan di Pantura khususnya Jakarta sejak kita merdeka tidak lagi berorientasi pada laut maupun sungai. Akibatnya arah pengembangan banyak yang menjadikan wilayah ini sebagai area *back of the house*, area yang terlupakan, sehingga bisa dimengerti mengapa area sepanjang DAS dan pesisir pada akhirnya justru banyak diisi oleh kantung-kantung kemiskinan yang berwujud pada pemukiman padat kelas bawah dan aktivitas sentra ekonomi rakyat bernilai tambah rendah semacam pelabuhan rakyat dan pendaratan nelayan tradisional.

Menyikapi dan merespon fenomena ini hanya dengan pendekatan bantuan sosial hanya akan membuat wilayah tersebut menjadi beban sosial berkepanjangan padahal seharusnya wilayah pesisir dan DAS tergolong area bernilai tambah tinggi. Setiap upaya pemberdayaan seyogyanya dapat memutus lingkaran kemiskinan dan degradasi lingkungan tersebut secara sistematis dan terpadu. Prioritas utama bagi warga miskin perkotaan tersebut sesungguhnya bukanlah penyediaan fasilitas pemukiman di wilayah tersebut yang lebih baik melainkan penyediaan sentra perekonomian dan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang lebih baik, terpadu dan lebih kompetitif yang tetap menjadikan mereka sebagai subyek pelaku ekonominya. Jika sentra ekonomi dapat dikembangkan di wilayah lain yang lebih ekonomis dan lebih luas maka merelokasi sentra perekonomian rakyat dan menyiapkan pemukiman yang lebih terpadu dan baik akan menjadi solusi yang lebih rasional dan membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi golongan tersebut. Sebaliknya jika

kebijakan yang diambil hanya kebijakan memukimkan minus skenario pemberdayaan ekonomi yang lebih rasional maka yang terjadi adalah kemungkinan perpindahan kepemilikan rumah atau justru melestarikan kemiskinan itu sendiri.

Aspek Kegentingan Permasalahan Sosial di Wilayah Pesisir Teluk Jakarta

Isu Strategis : Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada

Uraian berbagai isu strategis sebelumnya sesungguhnya sudah cukup memberi sinyal kegentingan permasalahan sosial yang ada. Jika respon kebijakan yang ada belum secara mendasar mengacu dan merespon secara positif dan sistematis permasalahan tersebut maka niscaya beban permasalahan akan terus meluas dan semakin kompleks. Sebagai gambaran kota Jakarta yang pertumbuhan ekonominya berbasis industri jasa maka sumberdaya utamanya adalah manusia, manusia unggul (*high skilled labor*) tentunya. Muara seluruh kebijakan pemerintah tidak terkecuali kebijakan penataan ruang seyogyanya adalah pada strategi penataan dan konsolidasi aset sumberdaya manusia yang berkelanjutan. Dalam setiap perencanaan wilayah harus dipikirkan bagaimana mobilitas manusia dapat difasilitasi dengan lebih efisien, andal dan terkoneksi ke pusat-pusat kegiatan baru maupun lama. Harus dipikirkan dan direncanakan bagaimana sumber daya manusia unggul dapat dimukimkan kembali di tengah kota. Harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan lebih seksama upaya revitalisasi kawasan pemukiman yang ada, memperbaiki keseimbangan dan keselarasan antar cluster pengembangan, antar cluster kelas sosial dan mencegah potensi-potensi sistemik konflik sosial yang mewujud secara spasial.

3.7 Sosial Budaya

- Saat ini di kawasan Teluk Jakarta bukan saja sedang terjadi suatu **krisis lingkungan fisik** yang mencemaskan, tetapi sekaligus dibarengi oleh krisis sosial-ekonomi dan budaya yang ditandai oleh kemiskinan, kesenjangan sosial yang semakin menajam, perebutan sumber-sumber kehidupan yang mendasar seperti perebutan lahan pemukiman, ruang usaha, hak pemakaian/akses terhadap pantai dan sebagainya yang dapat menjurus pada suatu konflik sosial yang besar dan eksplosif.
- Kondisi ini berakar pada persoalan yang lebih mendasar yaitu: tidak adanya **sistem nilai** yang mendasari kehidupan masyarakat di kawasan ini dalam bentuk **visi pembangunan** kota:
 - *“Apa cita-cita bangsa ini terhadap kawasan Teluk Jakarta (yang mencakup wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang)?”*.
 - *“Peradaban kota seperti apa yang akan dikembangkan di Jakarta, Bekasi, Tangerang?” (misalnya: Megapolitan?, waterfront city?, kota bahari? dsb.)*

- *“Bagaimana Kawasan Teluk Jakarta ini dimasa depan akan kita persaingkan dengan kota-kota pelabuhan lainnya di kawasan Pasifik?”*
- Didalam RTRW DKI memang sudah ada rumusan: “budaya kota yang tertata dan terkendali” serta “mengembangkan **tataruang yang mendisiplinkan masyarakat**”. Pernyataan ini sebenarnya sangat melegakan, karena sudah sejalan dengan konsep: **“Educating City”** yaitu kota yang mampu mendidik warganya untuk mengarah pada cara hidup atau peradaban kota yang ditandai pola sikap yang **“sadar/cerdas lingkungan”** dan perilaku yang **“partisipatif”**.
- Kerusakan alam di Teluk Jakarta disebabkan oleh cara pandang dan cara hidup **seluruh strata** penduduk kota (baik Jakarta, Tangerang dan Bekasi) terhadap lingkungan (tanah, sungai, laut dsb.). Ini bukan hanya kesalahan penduduk kawasan itu saja, tetapi seluruh kota. Karena itu perbaikan fisik di Teluk Jakarta tidak akan bertahan lama tanpa adanya konsep Pembangunan Kawasan yang sistemik dan punya visi.

Isu Strategis : Tidak adanya visi tentang arah pembangunan masa depan Teluk Jakarta dalam menghadapi persaingan global, sehingga kebijakan pembangunan fisik serta pengembangan sosial-ekonomi-budaya masyarakat kota Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya tidak memiliki arah Peradaban yang jelas (lihat: Mindmap).

Analisis :

- 1) Tidak adanya visi Pembangunan Kawasan Teluk Jakarta yang didukung oleh visi pembangunan seluruh kota (baik di Jakarta, Tangerang dan Bekasi) ini telah menyebabkan kawasan Teluk Jakarta tidak terencana secara sistemik dan siap menghadapi persaingan global.
- 2) FGD yang diselenggarakan dalam kajian ini mempersoalkan hal-hal berikut ini :
 - Sehubungan dengan budaya bahari, apa orientasi pembangunan wilayah laut di Kepulauan Seribu?
 - Penduduk kota Jakarta telah berorientasi global, tetapi cenderung melupakan potensi budaya lokal/nasional, sehingga kekayaan budaya tidak dapat dikembangkan/dijual. Di daerah Teluk Jakarta misalnya banyak terdapat situs-situs budaya lama dan tradisi senibudaya yang masih dapat dikembangkan untuk wisata bahari (termasuk tradisi budaya nelayan).
 - Tidak adanya visi tentang persaingan antar Negara di kawasan Pasifik dimasa sekarang dan masa depan (Malaysia, Singapore, Korea, Taiwan, Hongkong, Cina Daratan dsb.).
 - Konsep “waterfront city” tidak pernah diturunkan menjadi suatu konsep “pengembangan budaya kota” baik di Jakarta maupun Tangerang dan Bekasi secara terinci dan diimplentasi.

Karena konsep masa depan itu tidak disusun dan dijadikan kebijakan, Masterplan (RTRW), UU dan sebagainya maka kebudayaan kota di Teluk Jakarta tidak mengarah pada cita-cita itu

dan pola hidup masyarakat (baik kelas bawah menengah maupun atas) sama-sama menjadi faktor kehancuran lingkungan. Apalagi pada dasarnya kota Jakarta adalah suatu “Delta City” yang merupakan muara dari 13 sungai.

Saran :

Rencana pembangunan reklamasi di kawasan Teluk Jakarta harus diintegrasikan dengan perumusan secara komprehensif visi pembangunan kawasan Teluk Jakarta (oleh Badan Pengelola) dan ditunjang oleh visi masing-masing kota: Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Pembangunan wilayah ini harus mengacu pada persaingan global dengan kota-kota lain di tepian Pasifik, lebih berparadigma “bahari” dan bersifat “waterfront”.

Isu Strategis : Kebijakan pembangunan yang ada belum secara sensitif mengantisipasi dan merespons ancaman sosial-budaya

Analisis :

Kondisi kerusakan lingkungan dan sosial-ekonomi-budaya yang akut di kawasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan misalnya RTRW belum sensitif terhadap ancaman permasalahan sosial-budaya masa depan karena kurang dilandasi oleh analisis yang mendalam dan komprehensif tentang potensi dan kondisi sosiologis (struktur sosial, proses sosial dan kultur) masyarakat setempat , serta analisis tentang potensi pembangunan ekonomi yang sesuai kondisi masyarakat setempat.

Saran :

Master Plan (RTRW) yang lebih berorientasi pada pembagian Ruang sebaiknya dilengkapi dengan Rencana Umum Pembangunan Sosial-Budaya (RUPSB) dan Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) agar potensi sosial-ekonomi-budaya masyarakat di kawasan Teluk Jakarta lebih teridentifikasi sejak awal dan dapat dirumuskan perencanaan pembangunannya secara lebih realistis. Dengan kata lain secara inheren grand design kota telah mempertimbangkan dan mengidentifikasi potensi dan kondisi semua bidang kehidupan secara komprehensif dan sistemik.

Isu Strategis : Pemanfaatan lahan untuk pemukiman di kawasan Teluk Jakarta belum efisien karena masih didominasi oleh pemukiman horizontal yang berkepadatan tinggi.

Analisis :

Posisi kawasan Teluk Jakarta yang merupakan muara dari 13 sungai jauh lebih kritis dari segi lingkungan fisik daripada wilayah kota lainnya, karena itu penataan lahan terutama pemukiman di kawasan ini perlu menerapkan konsep keserasian lingkungan yang lebih ketat. Hal ini akan terkait dengan kesiapan sosial budaya penduduknya, sehingga untuk kawasan ini diperlukan suatu Perencanaan Sosial yang khas.

Saran :

Perlu mulai dibudayakan “pemukiman vertikal”, tetapi jangan dimulai dari kelas bawah, melainkan dari kelas atas, menengah dan menengah bawah dengan “*system land consolidation*” (untuk menghindari penggusuran). Perbaikan perumahan kelas bawah (kampung kumuh) yang tidak liar sebaiknya dilakukan dengan pendekatan “Perbaikan Kampung”, bukan “*urban renewal*”, karena kemiskinan mereka masih sangat dalam, mereka belum siap untuk menghuni rumah susun (bisa terjadi “*vertical slum*”). Konsep perbaikan kampung merupakan pendekatan yang realistis dan akomodatif bagi kaum miskin tetapi sekaligus merupakan mekanisme “pembelajaran masyarakat” (kebersihan, ketertiban, keamanan dan pembatasan jumlah penghuni dan kepadatannya).

Isu Strategis : Pola penataan spasial dan ekonomi yang kurang mempertimbangkan keselarasan sosial dan integrasi sosial-ekonomi antar strata sosial yang mengakibatkan segregasi sosial, tersingkirnya kelas menengah (urban sprawl), kerawanan konflik sosial, penurunan daya saing kawasan.

Analisis :

Integrasi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan ini sangat rawan. Masyarakat kelas menengah cenderung berpindah kepinggir kota (*urban sprawl*), hal ini disebabkan karena kepadatan tinggi dari pemukiman yang horizontal serta proses kekumuhan. Daerah ini memiliki struktur kependudukan yang kontras yakni dihuni oleh masyarakat lapisan atas dan masyarakat lapisan terbawah yang tidak terjembatani secara sosial maupun ekonomi oleh lapisan menengah. Proses segregasi sosial bahkan sudah menimbulkan fenomena “komunitas berpagar” yang rawan konflik sosial serta radikalisme.

Untuk menjembatani kelas menengah dan atas dengan kelas bawah, sebaiknya dimulai dengan mengembangkan/memperkuat fungsi ekonomi kelas bawah terhadap kelas menengah (misalnya PKL ditingkatkan dengan konsep Pujasera), sehingga terjadi peningkatan lapangan usaha dan penghasilan. Disamping itu juga perlu membuka akses ke Pantai bagi masyarakat kelas bawah serta mengembangkan wisata Pantai bersama mereka (partisipasi ekonomi).

Kehadiran masyarakat lapisan menengah di kawasan ini perlu didorong dengan pembangunan daerah pemukiman vertikal.

Isu Strategis : Meningkatnya kemiskinan & kecenderungan hilangnya kesempatan berusaha dikalangan strata ekonomi lemah (terutama nelayan).

Analisis :

- Kesenjangan antar kelas sosial di kawasan ini semakin tinggi. Salah satu masalah “pemiskinan” di kawasan ini yaitu masalah nelayan, karena mereka telah mengalami penurunan kapasitas dan mulai membutuhkan suatu perubahan profesi berkaitan

dengan masalah perubahan iklim. Masalah kedua adalah pengembangan sector ekonomi informal.

- Tanpa adanya konsep pengembangan ekonomi yang komprehensif (dikaitkan dengan penataan ruang dan pengembangan SDM), kesenjangan ini akan menorah pada konflik social yang eksplosif di kawasan ini.

Saran :

- Perlu dikembangkan suatu perencanaan ekonomi yang secara efektif memberi jalan keluar bagi program alih profesi bagi para nelayan.
- Perlu dikembangkan konsep pembangunan bahari yang memberdayakan daerah Kepulauan Seribu. Konsep pembangunan saat ini sangat terfokus ke daratan yang nota bene telah mengalami banyak kebuntuan (perlu suatu paradigm pembangunan yang baru).
- Jumlah penduduk lapisan bawah yang berlebih dan arus migrasi ke kawasan ini perlu diakomodasi melalui kerjasama perencanaan pemukiman yang lebih terpadu antar ketiga kota (Jakarta, Bekasi dan Tangerang). Hal ini harus dikaitkan dengan penyebaran potensi ekonomi dari Jakarta ke kedua kota lainnya.

BAB IV ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM

4.1 Rumusan Alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program

REKOMENDASI ISU STRATEGIS KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP KABUPATEN TANGERANG		
ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kawasan Strategis Nasional, meliputi: Perpres 54 tahun 2008 Kabupaten Tangerang termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>(2) Kawasan Strategis Provinsi Banten, meliputi: Kawasan Strategis Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Tangerang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan penyangga Bandara untuk kepentingan daya dukung lingkungan. 2. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) Balaraja untuk kepentingan ekonomi. 3. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) Teluknaga untuk kepentingan ekonomi. 4. PLTU Lontar untuk kepentingan teknologi tinggi. <p>(3) Kawasan strategis di kabupaten, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis Kawasan Pusat 	<p>Raperda RTRW Kabupaten Tangerang 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>Beberapa lokasi di Pantura masuk dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. Belum ada pengaturan lebih lanjut.</p> <p><u>Land Subsidence</u> Dalam RTRW perlu ada pengendalian pemanfaatan air bawah tanah</p> <p><u>Rob dan Kenaikan Muka Air Laut</u> Perlu ada ketentuan mengenai strategi penanggulangan rob/kenaikan muka air laut</p> <p><u>Banjir/Genangan</u> - Pasal 27 ayat (1) huruf b ditambahkan pembangunan tandon air di 8 Kecamatan - Daerah genangan direncanakan sebagai daerah tampungan air</p> <p><u>Abrasi dan Kerusakan Pantai</u> - Perlu ditambahkan strategi tentang penanggulangan abrasi - Perlu ditambahkan strategi tentang</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis :</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Balaraja dan Teluknaga</p> <p>c. Kegiatan Utama : Perdagangan dan jasa, industri, Perumahan, dan perdagangan</p> <p>2. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis :</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Tigaraksa dan Kronjo</p> <p>c. Kegiatan Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKL Tigaraksa : Pusat pemerintahan kabupaten, perkerentoran, permukiman, perdagangan dan jasa - PKL Kronjo : Pemerintahan kecamatan, permukiman, pertanian dan perikanan. <p>3. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP)</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis :</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Mauk, Kosambi, Sepatan, Cikupa, Kelapadua dan Curug.</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pemerintahan</p>	<p>penanggulangan kerusakan pantai akibat penambangan pasir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditambahkan strategi tentang pengendalian penambangan pasir - Perlu diawali dengan penentuan garis pantai - Perlu ditambahkan ketentuan tentang kawasan yang berfungsi untuk pengendalian banjir, dan pengendalian rob, tidak dialih fungsikan <p><u>Degradasi Ekosistem Mangrove</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 ditambahkan Kecamatan Mekar Baru - Perlu ditambahkan ketentuan tentang penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai <p><u>Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditambahkan arahan mengenai water front city - Pasal 24 ayat (6) ditambahkan Kecamatan Mekar Baru <p><u>Sedimentasi</u></p> <p>Perlu ditambahkan strategi normalisasi muara sungai sebagai upaya penanggulangan sedimentasi</p> <p><u>Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri</u></p> <p>Perlu ditambahkan strategi penanggulangan/penanganan sampah di perairan secara terintegrasi</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>kecamatan, pertanoran, permukiman, industri, pertanian perdagangan dan jasa.</p> <p>4. Kawasan Strategis Dryport</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Jambe</p> <p>c. Kegiatan Utama : Transportasi dan Pergudangan</p> <p>5. Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi</p> <p>b. Lokasi : Perluasan Bandara Soekarno Hatta</p> <p>c. Kegiatan Utama : Transportasi Udara dan Pergudangan</p> <p>6. Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Kosambi</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pergudangan, industri, perdagangan dan jasa</p> <p>7. Kawasan Strategis PLTU Lontar</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Desa Lontar Kecamatan</p>	<p><u>Penanganan Sampah (Perairan)</u></p> <p>Perlu ditambahkan strategi penanggulangan/penanganan sampah di perairan secara terintegrasi</p> <p><u>Pemanfaatan Ruang Laut</u></p> <p>- Pasal 3 ayat (2) perlu ditambahkan dengan strategi untuk penanggulangan penurunan permukaan tanah, rob dan kenaikan muka air laut, banjir dan genangan, abrasi, erosi, sedimentasi, intrusi air laut, pengendalian pencemaran, kerawanan air bersih, pencemaran air, kerusakan pantai</p> <p>- Perlu ditambahkan Kecamatan Kemiri, perlu konfirmasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan mengenai Kecamatan Mauk</p> <p>- Pasal 38 ayat (3) a ditambahkan Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi (perlu konfirmasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan)</p> <p><u>Pengelolaan Ruang laut antara hasil reklamasi</u></p> <p>Kawasan strategis pantura Tangerang pasca reklamasi harus dikelola secara terpadu oleh satu manajemen pengelola dan mencakup juga bagian pesisir pantura yang ada sekarang, sehingga masalah pengelolaan sampah dan pengurangan sedimen, keamanan, ketertiban dapat dilakukan secara rutin dan terpadu</p> <p><u>Kemungkinan alih fungsi lahan di daratan</u></p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kemiri</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pembangkit Listrik untuk Provinsi Banten dan DKI</p> <p>5. Kawasan Strategis Rencana Reklamasi Pantai</p> <p>a. Klasifikasi kawasan strategis : Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan wilayah pantai.</p> <p>b. Lokasi : Kawasan reklamasi seluas ± 9.000 ha berjarak 200 meter dari garis pantai Kabupaten Tangerang</p> <p>c. Kegiatan Utama : Perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.</p> <p>(4) Beberapa program yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program penataan ruang b. Program pembangunan prasarana dasar dan transportasi c. Program pembangunan sarana pelayanan sosial ekonomi d. Program pengembangan usaha <p>(5) Program pengembangan investasi</p> <p>(6) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p><u>Pasca reklamasi</u></p> <p>Pasca reklamasi, Tanah daratan di sekitar Pantura diprediksi akan naik nilai jualnya, peruntukan lahan di daerah tersebut pada umumnya untuk pertanian/RTH yang pada umumnya bukan milik masyarakat lokal tetapi milik orang luar Tangerang dan Perhutani. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pengawasan terhadap kemungkinan alih fungsi lahan. Perlu dijabagi dan diperkenalkan kebijakan insentif seperti <i>transfer development of rights</i> bagi mereka yang tetap mempertahankan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau, ataupun lahan pertanian manakala area mereka menjadi berhadapan atau berimpit langsung dengan area pengembangan baru berintensitas tinggi seperti pengembangan di lahan hasil reklamasi.</p> <p><u>TIC dan Perhutani, Nara Sumber</u></p> <p>Mengingat di kawasan Pantura banyak situs budaya seperti Makam Panjang di Kampung Bahari, tempat ziarah orang Tionghoa di Tanjung Kait serta potensi wisata lainnya seperti di Pantai Tanjung Kait, sementara di Perda RTRW kurang diperhatikan.</p> <p><u>Dinas Pemuda, Budaya dan Pariwisata</u></p> <p>Potensi PAD Kab. Tangerang dari sektor nelayan cukup besar dengan jumlah kapal mencapai 2600 armada namun potensi tersebut menjadi tdk optimal mengingat sistem ijon yang marak juga berimbas pada</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kebijakan dan Strategi</p> <p>Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah, dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan ruang kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan b. Meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri. 2. Pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fungsi kegiatan sekitarnya di seluruh wilayah kabupaten dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian; b. Mewujudkan pusat-pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan kabupaten; c. Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya d. Meningkatkan intensitas pembangunan perumahan dan permukiman di tiap kecamatan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan 	<p>rendahnya PAD kab. Tangerang dari sektor nelayan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada pembinaan sistem ekonomi nelayan khususnya dalam pengembangan kawasan minapolitan.</p> <p><u>Perhutani</u></p> <p>Di kec. Kronjo di dalam RTRW ditetapkan sebagai lahan pertanian basah/tambak. Akan tetapi kondisi tambak sudah tidak produktif akibat adanya pencemaran. Mengingat pencemaran disebabkan oleh perilaku masyarakat termasuk masyarakat dunia usaha dibutuhkan kebijakan pengawasan yang mengatur perilaku pencemar.</p> <p><u>Kec. Kronjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya kegiatan reklamasi maka kegiatan nelayan yang ada di sekitar areal reklamasi akan terganggu mata pencahariannya. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk mencegah disintegrasi sosial dan ekonomi. - Sungai-sungai di Kab. Tangerang berpotensi ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di bagian utara kab. Tangerang, dibutuhkan kebijakan yang sensitif terhadap masalah-masalah sosial di sekitar areal sungai. <p><u>Area yang berimpit dengan badan Air</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Area yang berimpit sepanjang badan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<ol style="list-style-type: none"> e. Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten Tangerang; f. Menata dan mengembangkan kawasan wisata; dan g. Membuat rencana rinci kawasan permukiman. 3. Pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan reklamasi sepanjang pantai utara kabupaten yang berjarak kurang lebih 200 meter dari garis pantai. b. Menyiapkan regulasi operasional pelaksanaan reklamasi. c. Mengendalikan dampak penyelenggaraan reklamasi dan d. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan wilayah daratan kabupaten 4. Pengembangan pertanian berkelanjutan di bagian utara wilayah dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten. b. Menetapkan kawasan Minapolitan di kecamatan Kronjo dan kawasan Agropolitan di Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur dan 	<p>(sungai, danau, pantai) harus dinyatakan sebagai area utama bernilai tambah tinggi baik bagi kepentingan publik maupun ekonomi, khususnya bagi area yang belum terlanjur menjadi permukiman padat horisontal. Sehingga pembangunan harus berorientasi pada badan air (waterfront) bukan justru membelakangnya. Ketiadaan regulasi tata ruang yang mengatur orientasi ini akan mengakibatkan badan air akan dibelakangi sehingga menjadi kumuh, tidak sesuai untuk fungsi publik dan tidak diminati untuk investasi , menimbulkan problem sosial dan pencemaran air yang sulit dokontrol.</p> <p>- Bagi area sepanjang badan air yang sudah terlanjur padat horisontal perlu diperkenalkan program peremajaan lingkungan antara lain dengan memperkenalkan jalan inspeksi / jalan publik di sepanjang area berimpit badan air di luar sempadan serta instrumen konsolidasi tanah untuk peremajaan kawasan</p> <p><u>Bina Marga Dan Pengairan Kab. Tangerang</u></p> <p>Pembangunan PLTU harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar areal proyek pengembangan PLTU agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat nelayan, serta pencemaran terhadap areal pertanian.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, meliputi sungai lintas provinsi dalam wilayah kabupaten, wilayah sungai kabupaten, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih, dan sistem pengendalian banjir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sungai lintas provinsi terdiri dari Cisdane, Cidurian, dan Cimanceuri; b. Sungai lintas kabupaten/kota terdiri dari Citarab, Kali Sabi, dan sungai kecil lainnya; <p>(2) Sistem jaringan irigasi terdiri dari irigasi Cisdane dan Cidurian;</p> <p>Pengelolaan sumber daya air dan jaringan pengairan di Kabupaten Tangerang dikembangkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan kawasan hulu sungai melalui kegiatan pelestarian kawasan, pengamanan kawasan penyangga, pengamanan sumber air dan pencegahan banjir; b. Pengelolaan irigasi strategis yakni prasarana irigasi yang terdapat pada sentra-sentra produksi pangan; c. Peningkatan koordinasi antar provinsi untuk sinkronisasi program sektoral maupun program bersama; 	<p><u>Manajemen Tata Ruang Daerah Pengaliran Sungai Situ dan Pantai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada regulasi spesifik yang mengatur zona area yang berimplik dengan badan air (waterfront, seafont, lakeside, riverside, dsb) sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai area bernilai tambah tinggi. Pengembangan bernilai tambah tinggi lebih layak mendapat prioritas di zona tersebut. Hal ini diharapkan akan mengubah paradigma apresiasi terhadap badan air sehingga waterfront menjadi area muka bangunan bukan belakang bangunan. - Perlu juga dikenali terminologi area dapat dikontrol dan area yang relatif sulit dikontrol (terkait dengan potensi pengelolaan limbah cair dan padat) dalam kebijakan pola ruang. Area yang berimplik sepanjang badan air (sungai , danau, pantai) seyogyanya ditempatkan area yang tergolong mudah dikontrol. Sebagai contoh Kawasan permukiman padat sederhana horizontal tergolong kawasan yang sulit dikontrol sehingga harus dicegah pertumbuhannya sepanjang area yang berimplik dengan badan air. - Prioritas utama lain di area waterfront adalah untuk ruang terbuka publik, infrastruktur dan fasilitas publik sehingga memberi publik akses lebih pada area waterfront.

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. Pengembangan struktur ruang dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas jaringan prasarana serta dengan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air dan penetapan sumberdaya air wilayah sungai;</p> <p>(3) Pemanfaatan sumber air diarahkan pada air permukaan dengan intake di sungai terdekat yang potensial;</p> <p>(4) Pada kawasan permukiman pusat kegiatan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai atau air permukaan;</p> <p>(5) Pada kawasan permukiman perdesaan dikembangkan sistem air bersih perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang ada meliputi mata air, air tanah dan air sungai dengan sistem jaringan air sederhana.</p> <p>(6) Rencana pengembangan sistem air bersih, meliputi:</p> <p>a. Zona Cibaja Utara melayani Kecamatan Cikupa, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Panongan dan Jambe;</p> <p>b. Zona Cibaja Selatan melayani Kecamatan Cisoka, Tigaraksa, Panongan dan Jambe;</p> <p>c. Zona Cipacul melayani Kecamatan Cisaik , Pagedangan, Curug dan Legok;</p> <p>d. Zona Sepatan Plus melayani Kecamatan Sepatan, Pasar Kemis dan Rajeg;</p> <p>e. Zona Pakumas melayani Kecamatan Pakuhaji, Mauk, dan Sukadiri;</p> <p>f. Zona Bojonggeded melayani Kecamatan Teluknaga, Kosambi; dan Zona IKK / Kejori</p>	<p><u>Perlindungan kawasan konservasi dan kebijakan umum keseimbangan tata ruang</u></p> <p>Setiap upaya revitalisasi kawasan pantura Tangerang yang ada harus berupaya memperbaiki keseimbangan zona sehingga dapat mengurangi koneksi frontal antara kawasan konservasi langsung dengan kawasan hunian padat, kawasan hunian mewah langsung dengan kawasan hunian padat sederhana. Gradasi zona dan penerapan zona buffer patut dipertimbangkan.</p> <p><u>Penilaian Pengembangan industri perikanan terpadu dengan program pemberdayaan ekonomi nelayan</u></p> <p>- Perlu diuji potensi pengembangan area industri perikanan strategis di beberapa kawasan perikanan yang ada. Arah pengembangan pendaratn ikan menjadi area terpadu dengan industri pengolahan ikan yang tertata secara modern.</p> <p>- Upaya pengentasan kemiskinan khususnya kaum nelayan harus harus dimaknai dan di selesaikan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi nelayan dan sektor industri perikanan secara terpadu dan progresif. Perlu diujiuji kerjasama dengan DKI sebagai sentra pasar utama.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>melayani Kecamatan Kresak, Kronjo, dan Kemiri.</p> <p>Pasal 25 Ayat (1)</p> <p>Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, rencana pengelolaan sampah Kabupaten Tangerang sampai tahun 2030 meliputi :</p> <p>a. Menyiapkan akses dari kawasan sumber penghasil sampah menuju lokasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang ada di setiap kawasan dengan kondisi sampah sudah terpilah antara sampah organik dan non organik.</p> <p>b. Penentuan daerah pelayanan setiap jenis alat angkutan sehingga tercipta suatu sistem pengumpulan sampah yang terhirarki dengan baik.</p> <p>c. Menyiapkan suatu pengelolaan dan pengumpulan yang terhirarki dengan baik.</p> <p>d. Pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah dengan menyiapkan armada angkut dari gerobak sampai truk.</p> <p>e. Penyediaan dan pengelolaan TPS dengan menyiapkan suatu TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah perkotaan yang akan meningkat seiring dengan peningkatan perkembangan fisik dan kegiatan perkotaan.</p> <p>f. Peningkatan kapasitas TPST Jatiwaringin di kecamatan Mauk;</p> <p>g. Pembangunan TPS secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan;</p> <p>h. Mewajibkan setiap pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus,</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>umum, sosial lainnya menyediakan fasilitas penyediaan fasilitas pemilahan sampah;</p> <p>i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan</p> <p>j. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.</p> <p>k. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.</p> <p>Pasal 25 Ayat (2)</p> <p>Rencana sistem persampahan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 26 Ayat (1)</p> <p>Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Tangerang secara lebih detail meliputi :</p> <p>a. Sosialisasi serta pemahaman atas pentingnya sarana sanitasi kepada masyarakat, sehingga ketergantungan akan sarana sanitasi bisa meningkat dan pencemaran limbah padat maupun cair yang berasal dari domestik dapat dikurangi.</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas pelayanan IPLT Lebak wangi di Kecamatan Sepatan Timur.</p> <p>c. Mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik dan menggunakan sistem individu, berupa</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>instalasi pembuangan tinja yang sehat atau tangki septik. Sedangkan untuk daerah yang padat perlu dikembangkan sistem komunal, namun sistem ini perlu didesain agar dapat disambungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk sistem terpusat di masa yang akan datang.</p> <p>d. Optimalisasi kemampuan instalasi pengolahan limbah yang sudah ada serta pengadaan dan pengelolaan truk tinja untuk meningkatkan pelayanan penanganan air limbah.</p> <p>e. Membangun instalasi pengolahan limbah tinja yang baru terutama di daerah padat penduduk di wilayah barat dan timur Kabupaten Tangerang. Karena pada umumnya prasarana yang dipergunakan di wilayah perencanaan adalah tangki septik dan cubluk, maka fasilitas pengolahan lumpur tinja dan sarana pembuangan sangat dibutuhkan yaitu dengan pengadaan dan pengelolaan IPLT. Untuk itu direncanakan dibangun IPLT di Kecamatan Cisauk Desa Suradita.</p> <p>f. Mewajibkan para developer untuk menyediakan / membangun fasilitas pengolahan limbah domestik secara komunal di kawasan perumahan yang akan dibangun.</p> <p>g. Untuk penanganan limbah non domestik yang berasal dari industri diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air penerima. Teknik pengolahan tergantung jenis industri. Untuk itu perlu dibangun instalasi pengolahan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>industri secara bersama-sama antar beberapa industri . Untuk industri yang berdekatan dengan industri yang sama dapat membangun IPAL bersama sehingga dapat mereduksi biaya yang dikeluarkan. Instalasi pengolahan limbah diprioritaskan pada daerah yang diperuntukan sebagai kegiatan industri.</p> <p>h. Menyiapkan suatu mekanisme pengawasan terhadap pembuangan limbah industri untuk memastikan agar limbah yang dibuang ke saluran akhir telah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Terutama penataan sistem pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk meminimalkan pencemaran udara, tanah dan sumber daya air serta meningkatkan kualitas lingkungan, dimana pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah serta dilakukan melalui kerjasama antar daerah, peran serta masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>i. Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah non domestik.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7 Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Sistem pengembangan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g meliputi :</p> <p>a. Penanganan Banjir</p> <p>1. Rehabilitasi saluran drainase dengan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>memperbesar saluran drainase serta membongkar/ mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.</p> <p>2. Normalisasi sungai-sungai yang melewati kota, berupa pengerukan, pelurusan, penayatan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.</p> <p>3. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien, terkait ketersediaan dana dan perlunya pelatihan yang cukup terhadap petugas yang bertanggung jawab serta memasyarakatkan upaya-upaya pemeliharaan kepada masyarakat umum.</p> <p>4. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir.</p> <p>5. Tingkat pelayanan, terkait dengan ketersediaan dana sehingga diperlukan upaya-upaya menanggulangi dana yang terbatas melalui upaya identifikasi terhadap sumber-sumber dana yang mungkin dan melakukan <i>cost recovery</i> semaksimal mungkin.</p> <p>6. Memudahkan operasi dan pemeliharaan serta pendataan setiap sungai</p> <p>7. Penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan menentukan otorisasi suatu instansi dalam pengelolaannya serta penetapan garis sempadan pantai, sungai, situ/danau :</p> <p>a. Pantai yaitu 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. Situ/danau yaitu 50 m dari batas muka air tertinggi;</p> <p>c. Sungai besar yaitu 100 m dari tepi sungai/pasang tertinggi;</p> <p>d. Sungai kecil yaitu 50 m dari tepi sungai/pasang tertinggi;</p> <p>e. Sungai Non pasang surut 3 - 100 m dari tepi sungai/pasang tertinggi;</p> <p>8. Pengendalian sungai agar tidak menjadi tempat buangan sampah oleh masyarakat sebab dapat mengakibatkan pendangkalan pada sungai tersebut.</p> <p>9. Hubungan dengan sektor-sektor lain dimana masalah pengendalian banjir harus terintegrasi penuh dengan sektor infrastruktur lainnya sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang tegas dan lugas.</p> <p>10. Pengembangan yang lain adalah peningkatan dan perbaikan kapasitas saluran drainase yang telah ada di wilayah Kabupaten Tangerang.</p> <p>b. Pembangunan Tandon Air</p> <p>Pembangunan tandon air direncanakan di wilayah Kecamatan Sukadiri 1 buah</p> <p>Pasal 31</p> <p>Kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. kawasan hutan lindung;</p> <p>b. kawasan perlindungan setempat; dan</p> <p>c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jabar Banten-KPH Bogor seluas 1.591,98 ha tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kosambi.</p> <p>(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan Pantai; b. sempadan sungai; c. kawasan danau atau waduk; dan d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya. <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a kawasan ini terdapat di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang meliputi di Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Kosambi, Mauk, Kemiri dan Sukadiri, yang keseluruhannya mencakup areal seluas $\pm 510,00$ Ha.</p> <p>(1) Pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai; b. pengendalian kegiatan disekitar sempadan pantai; dan pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan. <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sungai besar adalah Cisdane dan Cidurian b. Sungai sedang adalah Cimanceuri, Cirarab, Cidadap, Cisabi, Tahang, Cipayauen, Cilaku, Cipasilian, Cilontar, Cileles, Cilarangan, Pecah, dan Kali Cigung; b. Sungai kecil adalah anak-anak sungai baik sungai besar dan sungai sedang sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas. <p>(2) Sempadan Sungai sesuai dengan lebar dan kedalaman sungai, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sungai besar paling kurang 30 meter; b. Sungai sedang paling kurang 10 meter; dan c. Sungai kecil paling kurang 5 meter. <p>(3) Pengelolaan Sempadan Sungai ditujukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;</p> <p>(4) Pengelolaan sempadan sungai diarahkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; b. pengendalian kegiatan yang telah ada di sempadan sungai; c. pengamanan daerah aliran sungai; dan d. pembatasan daerah terbangun yang dapat merusak fungsi lindung daerah aliran sungai. 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 35</p> <p>Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c adalah</p> <p>(1) Kawasan sempadan danau atau waduk yang berada di Kecamatan Pasar Kemis, Sepatan, Sepatan Timur, Kronjo, Kresak, Kelapa Dua, Pagedangan, Pakuhaji, Sindang Jaya, Balaraja dan Mauk. Kawasan ini meliputi areal seluas sekitar 880,07 Ha yang telah termasuk luas danau atau waduk didalamnya.</p> <p>(2) Tujuan pengelolaan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi utama danau atau waduk tersebut; dan</p> <p>(3) Pengelolaan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman tumbuhan sempadan danau atau waduk; b. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sempadan danau atau waduk; dan c. Penataan ruang sempadan danau atau waduk. <p>Pasal 40 Ayat (8)</p> <p>(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Sindang Jaya bagian barat dan utara, Sepatan, Sepatan timur, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Sukamulya, Gunungkalder, Kresek, Mauk, Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri dengan luas lahan lebih kurang 29.295,00 ha;</p> <p>b. Kawasan peternakan meliputi Kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambé, Cisoka, Mauk, dan Gunungkalder dengan luas lahan lebih kurang 200 ha.</p> <p>Pasal 38 Ayat (3)</p> <p>Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang diperuntukan bagi budidaya :</p> <p>a. Perikanan tambak di Kecamatan Kronjo, Mekarbaru, dan Mauk dengan luas lahan lebih kurang 2.789 ha;</p> <p>Pasal 38 Ayat (4)</p> <p>Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Industri besar Pasar Kemis, Cikupa, Jambé, dan Balaraja dengan luas ± 10.000 ha;</p> <p>b. Industri sedang di Kecamatan Curug, Kosambi, Jayanti, Tigaraksa, Sepatan, Legok, dan Panongan dengan luas ± 3.586 ha; dan</p> <p>c. Industri rumah tangga tersebar di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Curug dan Cisoka.</p> <p>d. Kawasan perdagangan dan industri terbatas berada di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan, dan Jambé. Pelabuhan kering (<i>Dry Port</i>) disediakan di Kecamatan Jambé.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 38 Ayat (5) huruf c</p> <p>Pengembangan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai termasuk penyediaan prasarana pengelolaan limbah;</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf d</p> <p>Pengembangan industri diharuskan sejalan dengan struktur ruang wilayah Kabupaten Tangerang yang direncanakan sehingga antara pembangunan industri dengan perwujudan struktur ruang terjadi sinkronisasi;</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf f dan g</p> <p>f. Memanfaatkan seminimal mungkin air baku (air tanah dangkal) untuk menekan proses intrusi air laut di kawasan pantai utara;</p> <p>g. Ditaatnya peraturan daerah mengenai baku mutu buangan limbah cair, padat, dan gas dengan jalan melengkapi instalasi pengolahan limbah yang memadai; dan</p> <p>Pasal 38 Ayat (7)</p> <p>Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :</p> <p>a. permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi dengan asumsi lebih dari 30 rumah/Ha dan kepadatan sedang dengan asumsi kepadatan rumah antara 20-30 rumah/Ha dengan luas lebih kurang 27.937 Ha, meliputi Kecamatan Pagedangan, Cisaug, Legok, Kelapadua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa, Panongan, Jambe, Cisoka, Solear, Jayanti,</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Teluknaga, Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kosambi dan Sindanglaya;</p> <p>b. Permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah dengan asumsi kurang dari 20 rumah/Ha luas lebih kurang 18.960 Ha, meliputi Kecamatan Kronjo, Mekarbaru, Gunungkaer, Kresak, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, dan Sukadiri.</p> <p>Pasal 38 Ayat (9)</p> <p>Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kawasan hasil kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut wilayah Utara mulai dari Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo, serta berjarak lebih kurang 200 meter dari garis pantai kearah laut dengan luas lebih kurang 9.000 ha diperuntukan sebagai pengembangan kota pantai terpadu, meliputi :</p> <p>a. Kawasan permukiman perkotaan;</p> <p>b. Kawasan pelabuhan terpadu;</p> <p>c. Kawasan industri.</p> <p>d. Parwisata dan</p> <p>e. Komerisial</p>	

REKOMENDASI ISU STRATEGIS KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP PROVINSI DKI JAKARTA

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUH	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> Land Subsidence Rob dan Kenaikan Muka Air Laut Banjir/Genangan Abrasi dan Kerusakan Pantai Degradasi Ekosistem Mangrove Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih Sedimentasi Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri Penanganan Sampah Pemanfaatan Ruang Laut Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p>Kawasan Strategis Pantura</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Kawasan strategis Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.</p> <p>(2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan kepelabuhan, kepentingan kawasan kebutuhan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan pantura.</p> <p>Pasal 98</p> <p>(1) Penyelenggaraan reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.</p> <p>(2) Penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan</p>	<p>Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>Land Subsidence</p> <p>Pengkajian penurunan muka tanah rata-rata 3-5 cm/tahun atau 60 – 100 cm per 20 tahun.</p> <p>Kebijakan pengendalian penyedotan airtanah hingga dihentikan.</p> <p>Penyediaan air bersih melalui sistem pemipaan untuk kawasan revitalisasi.</p> <p><u>Sistem Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air / Banjir</u></p> <p>(terintegrasi dalam sistem makro Jakarta) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem tata air Jakarta 2030 (<i>upstream to downstream</i>) Air ditahan di dataran tinggi (Puncak), disimpan dalam situ/waduk di kawasan Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan. Dari Banjir Kanal ke arah Utara menggunakan sistem polder. 2. Peningkatan rasio badan air (<i>water body ratio</i>) hingga lebih dari 5%. 3. Rencana teknis pengendalian banjir : <ul style="list-style-type: none"> – Perbaikan kapasitas saluran makro – Pembangunan Banjir Kanal Timur – Pembangunan Cengkareng Drain – Sodetan BKT-BKB

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.</p> <p>(3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>Pasal 99</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura harus menjamin:</p> <p>a. terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut;</p> <p>b. pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum;</p> <p>c. kepentingan perikehidupan nelayan;</p> <p>d. kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah;</p> <p>e. kepentingan dan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanan negara;</p> <p>f. terselenggaranya pengembangan sistem prasarana sumber daya air secara terpadu;</p> <p>g. tidak memberikan tambahan resiko banjir di daerah hulunya baik akibat rob, kenaikan permukaan laut/sungai; dan terselenggara/bertungsinnya</p> <p>h. objek/instalasi vital di kawasan Pantura</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Pengerukan dan pelebaran sungai – Perbaikan pintu air – Penambahan dan perbaikan sistem sub-makro – Perbaikan sistem mikro – Pengembangan sumur resapan – Pembangunan bangunan penahan lumpur – Pengembangan tampungan setempat (OSD : on-site stormwater detention) <p>4. Upaya non teknis pengendalian banjir :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Basis wilayah aliran sungai (hulu/penahan – tengah/storage – hilir/penampungan) – Pembatasan penggunaan airtanah – Pengembangan situ dan waduk – Pengembangan dan pemanfaatan bantaran sungai – Redevelopment kawasan perumahan – Pengendalian pembuangan limbah dan sampah ke dalam sungai dan laut – Penerbitan bangunan di atas aliran sungai – Konservasi DAS <p><u>Arahan Kawasan Strategis Pantura Jakarta</u></p> <p>1. Pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena penurunan muka airtanah dan muka</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dengan memperhatikan aspek-aspek ekologis lingkungan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek sebagai berikut:</p> <p>a. peningkatan fungsi Pelabuhan;</p> <p>b. pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi;</p> <p>c. pengembangan areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk pusat wisata, pusat perdagangan/jasa, dan pelayanan rakyat secara terbatas;</p> <p>d. dilaksanakan serasi dengan penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu;</p> <p>e. pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan konservasi nilai budaya daerah dan bangsa serta kebutuhan wisata nasional dan internasional; dan</p> <p>f. didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dibagi menjadi beberapa sub-kawasan dengan memperhatikan kondisi kawasan daratan Pantura dan perairan di sekitarnya.</p> <p>(2) Sub-kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan perencanaan yang dikembangkan dengan sistem infrastruktur terpadu.</p>	<p>tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara, dan persoalan lingkungan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan, dan air tanah;</p> <p>2. Bentuk pulau reklamasi ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci;</p> <p>3. Disain pulau reklamasi memperhitungkan masa perancangan, keadaan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir dan tindakan mitigasi, serta perlindungan hutan bakau;</p> <p>4. Dalam pelaksanaan reklamasi perlu dilakukan tindakan untuk keamanan dan resiko pencemaran dan sedimentasi;</p> <p>5. Dalam perencanaan reklamasi tercakup rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengendalian muara sungai;</p> <p>6. Pengembangan reklamasi Pantura dilakukan dalam bentuk pulau-pulau dengan jarak 200 m pada pulau yang berada pada zona P2 dan P4 serta berjarak 300 m pada pulau yang berada pada zona P3 dihitung dari pantai eksisting pada saat muka air terendah;</p> <p>7. Tanggul laut diletakkan pada kedalaman -8 m untuk daerah Barat</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Sistem prasarana sumber daya air di kawasan reklamasi Pantura merupakan bagian dari sistem prasarana sumber daya air makro dan jalur perpanjangan saluran dan sungai yang melalui kawasan daratan pantai.</p> <p>(2) Untuk mencegah banjir yang mungkin terjadi pengembangan kawasan Pantura harus mengembangkan sistem jaringan drainase dan sistem pengendalian banjir yang direncanakan secara teknis termasuk waduk penampungan air dengan rasio minimal per pulauunya sebesar 5%.</p> <p>(3) Waduk penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai ruang terbuka.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Penyediaan air bersih di kawasan Pantura dilakukan dengan cara-cara ramah lingkungan dan mengarah kepada <i>sustainable solution</i> dengan memanfaatkan alternatif sumber air baku baru dan dilengkapi dengan sistem jaringan perpipaan secara terpadu.</p> <p>(2) Pengelolaan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri dengan mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang ada dan/atau membangun sistem pengolahan teknologi yang baru.</p>	<p>dan tengah sedangkan untuk bagian Timur tanggul berada dekat pantai eksisting. Di atas tanggul dimanfaatkan sebagai jalan penghubung Barat-Timur;</p> <p>8. Ketinggian dan kekuatan tanggul dan perlindungan pesisir didisain dengan kala ulang angin dan gelombang minimal 1.000 tahun. Ketinggian tanggul harus memperhatikan faktor ketinggian air laut pasang, <i>wave setup</i>, <i>storm surge</i>, gelombang, <i>land subsidence</i> (amblesan), <i>sea level rise</i> (kenaikan muka laut) dan konsolidasi sisa (<i>residual settlement</i>);</p> <p>9. Limpasan air yang melalui tanggul diperkenankan hingga batas maksimal 5 l/s/m. Jika melampaui limpasan tersebut wajib disediakan sistem <i>flood control</i> (penanggulangan banjir) lainnya, seperti pompa dan kolam retensi dengan kapasitas yang memadai untuk menanggulangi limpasan air yang terjadi;</p> <p>10. Pulau reklamasi dan tanggul laut didisain dengan siklus masa layanan (<i>design life cycle</i>) minimal 50 tahun;</p> <p>11. Untuk keamanan, level lantai dasar bangunan berada lebih tinggi dari muka air laut tertinggi;</p> <p>12. Selain membangun kanal dan saluran, setiap pulau reklamasi wajib menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau;</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Limbah cair rumah tangga dan/atau limbah cair yang bersumber dari kegiatan lain wajib memenuhi baku mutu limbah cair yang pengelolaannya dilakukan dengan cara modul dan/atau terpusat.</p> <p>(2) Limbah cair yang memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan ke saluran umum dan tidak berakibat pada penurunan kualitas air laut, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana teknik reklamasi; b. rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi; c. rencana rancang bangun; d. rencana penyediaan prasarana dan sarana; e. analisis dampak lingkungan; f. rencana kelola lingkungan; g. rencana pemantauan lingkungan; h. rencana lokasi pengambilan bahan material; i. rencana pembiayaan; dan j. rencana pengelolaan air bersih dan air limbah serta pengendalian banjir. <p>(2) Pengembangan dan perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>13. Badan-badan air berupa waduk dan danau difungsikan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penampungan air sementara ketika hujan; b. Persediaan air untuk kebutuhan harian; c. Sumber air yang mungkin untuk direleasekan ke dalam lapisan aquifer; d. Habitat flora dan fauna akuatik; e. Sarana rekreasi. <p>14. Ruang perairan antara pulau-pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir di Jakarta Utara;</p> <p>15. Untuk mengurangi dan selanjutnya menghentikan proses <i>land subsidence</i>, penyediaan air bersih untuk kawasan reklamasi Pantura tidak diperkenankan menggunakan airtanah;</p> <p>16. Penyediaan air bersih dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan mengarah kepada <i>sustainable solution</i> dengan memanfaatkan air tawar dari waduk dan perairan antara pulau-pulau dan proses desalinisasi;</p> <p>17. Pengolahan air limbah dilakukan secara mandiri pada masing-masing pulau;</p> <p>18. Pembangunan areal reklamasi baru diarahkan agar tidak menimbulkan peningkatan risiko banjir bagi kawasan di hulunya. Jika terdapat</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>ayat (1), dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena kenaikan muka air laut, penurunan muka air tanah dan muka tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara serta persoalan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan dan air tanah;</p> <p>b. reklamasi dilakukan dalam bentuk pulau yang ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci dengan memperhitungkan masa perencanaan, keandalan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir, dan tindakan mitigasi, perlindungan hutan bakau, serta jalur lalu lintas laut, pelayaran dan pelabuhan;</p> <p>c. dalam perencanaan reklamasi tercakup rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengendalian sungai/kanal;</p> <p>d. setiap pulau reklamasi menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau yang berfungsi sebagai penampungan air sementara ketika hujan, persediaan air untuk beberapa kebutuhan harian sumber air yang mungkin untuk di kembalikan ke dalam lapisan aquifer, tempat hidupnya beberapa flora dan fauna, serta untuk rekreasi; dan</p>	<p>potensi kenaikan muka air di hulu sungai, maka harus dilakukan tindakan mitigasi berupa pengurangan muara sungai, pelebaran dan pengurangan kanal/ sungai, peninggian tanggul di kawasan yang berpotensi terjadi kenaikan muka air sungai, dan tindakan lain yang dipandang perlu;</p> <p>19. Pembangunan areal reklamasi baru diarahkan untuk meningkatkan fungsi mangrove sebagai habitat flora dan fauna akuatik dengan memperhatikan perlindungan terhadap erosi dan gelombang, salinitas, kualitas air, dan substrat lumpur (<i>mud</i>).</p> <p>20. Pemantauan kegiatan reklamasi dilakukan terhadap parameter perubahan morfologi, abrasi dan erosi, sedimentasi, muka airtanah, muka tanah, kuantitas pemompaan airtanah, tata guna lahan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.</p> <p>21. Rencana dan skenario peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi massal publik yang sesuai dengan proyeksi pengembangan kawasan hunian dan area publik di lahan reklamasi. Tidak hanya bersandar pada rencana infrastruktur jalan raya. Konsep transit oriented development (TOD) pun harus diterapkan dalam kawasan pengembangan di atas</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>e. ruang perairan di antara pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu pengendalian banjir;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan:</p> <p>a. relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar;</p> <p>b. revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah;</p> <p>c. perbaikan lingkungan, pemeliharaan kawasan permukiman dan kampung nelayan;</p> <p>d. pemerajaan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan;</p> <p>e. peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai untuk mengantisipasi banjir akibat rob dan meluapnya air sungai;</p> <p>f. perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan;</p> <p>g. relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun;</p> <p>h. pelestarian hutan bakau dan hutan lindung;</p> <p>i. perluasan dan peningkatan fungsi Pelabuhan; dan</p> <p>j. Pengembangan pantai untuk kepentingan umum.</p> <p>(2) Pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan Pantura sebagaimana dimaksud</p>	<p>lahan reklamasi.</p> <p>22. Harus diperjelas skenario peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur berbasis jalan raya atau berbasis rel bagi kelancaran arus rantai pasok barang dari dan ke kawasan industri strategis atau pun sarana ekonomi strategis di lahan reklamasi, tidak hanya bersandar pada infrastruktur jalan raya yang sudah ada.</p> <p>23. Kawasan strategis pantura harus dikelola secara terpadu oleh satu manajemen pengelola dan mencakup juga bagian pesisir pantura yang ada sekarang, sehingga masalah pengelolaan sampah dan pengurusan sedimen, keamanan, keteriban dapat dilakukan secara rutin dan terpadu.</p> <p>24. Setiap upaya revitalisasi kawasan pantura yang ada harus berupaya memperbaiki keseimbangan zona sehingga dapat mengurangi koneksi frontal antara kawasan konservasi langsung dengan kawasan hunian padat, kawasan hunian mewah langsung dengan kawasan hunian padat sederhana. Gradasi zona dan penerapan zona buffer patut dipertimbangkan.</p> <p>25. Upaya konsolidasi lahan, pemerajaan area pesisir kumuh Jakarta Utara dan pengentasan kemiskinan khususnya kaum nelayan harus harus dimaknai</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau dari hasil usaha pengelolaan tanah hasil reklamasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Persebaran lokasi kawasan strategis sebagai dimaksud pada pasal 96 sampai dengan pasal 105, termuat pada Gambar 2.1 Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penataan ruang kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 105, diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur rencana rinci kawasan Pantura.</p> <p style="text-align: center;">Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Struktur Ruang Wilayah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pusat kegiatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, di Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kantor Walikota Jakarta Utara sebagai pelayanan fungsi khusus;</p> <p>b. Kawasan Sunter sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran;</p> <p>c. Kawasan Pasar Kojas sebagai fasilitas</p>	<p>dan di selesaikan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi nelayan dan sektor industri perikanan secara terpadu dan progresif. Peluang kerjasama pembenahan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pendaratan ikan dan industri perikanan patut dijajagi dengan daerah pesisir Tangerang dan Bekasi.</p> <p><u>Rencana Kawasan Lindung</u></p> <p>Arahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sempadan pantai seluas 16,5 Ha berfungsi sebagai penahan abrasi, erosi, dan daya rusak laut. – Suaka margasatwa Muara Angke seluas 25,02 Ha berfungsi sebagai habitat burung air yang dilindungi. – Hutan lindung Kapuk Angke seluas 44,78 Ha. – Taman wisata alam Kamal seluas 99,82 Ha. – Kebun pembibitan mangrove di Taman Wisata Alam Kamal seluas 10,51 Ha. – Kawasan Tegal Alur-Angke Kapuk berfungsi sebagai kawasan pengaman jalur tol. <p><u>Rencana Sistem dan Jaringan Air Bersih</u></p> <p>Penyediaan air bersih DKI Jakarta didukung beberapa sumber air baku, yaitu Waduk Jatiluhur, terletak sekitar 60 km di sebelah Timur Jakarta, mata air Ciburial berlokasi sekitar 60 km di Selatan Jakarta, Sungai</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya, dan kawasan Pasar Pluit sebagai pusat perdagangan, jasa dan perkantoran;</p> <p>(2) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>a. pembatasan lalu lintas melalui penerapan kebijakan kawasan terbatas lalu lintas (restricted zone) serta pengaturan parkir/parkiran pada kawasan yang termasuk dalam kawasan terbatas lalu lintas di kecamatan Pademangan</p> <p>b. pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal dan angkutan umum lainnya di kawasan Kota/Kampung Bandan dan di Tanjung Priok;</p> <p>c. pembangunan jaringan jalan lokal sebagai jalan tembus dan jalan sejajar sebagaimana terlampir dalam lampiran tabel 6;</p> <p>d. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di perbatasan Kabupaten dan Kota Tangerang dan Bekasi;</p> <p>e. membangun gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum di kawasan Kampung Bandan dan lokasi yang memiliki potensi di Tanjung Priok;</p> <p>f. peningkatan manajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas</p>	<p>Ciliwung, Sungai Cilandak, Sungai Krukut, Sungai Pesanggrahan, dan air curah dari IPA Cisadane milik PDAM Kabupaten Tangerang yang berlokasi sekitar 30 km di sebelah Tenggara Jakarta. Air dari Waduk Jatiluhur yang dikelola Otorita Jatiluhur disalurkan ke IPA Buaran melalui Kanal Tarum Barat, IPA Cisadane dimiliki oleh Pemda Kabupaten Tangerang, dan mata air Ciburial dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bogor.</p> <p>Penyediaan air bersih DKI Jakarta dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) bermitra dengan swasta, yaitu PT Lyonnaise Jaya (Palvia) dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) yang kini menjadi PT Aetra Air Jakarta melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) hingga tahun 2023. Wilayah kerja sama terdiri atas wilayah Barat oleh PT Palvia dengan wilayah usaha Zona 1, 4, dan 5 dan wilayah Timur oleh PT Aetra dengan wilayah usaha Zona 2, 3 dan 6. Penyediaan air bersih wilayah Kota Pantai Utara direncanakan dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Kapasitas produksi air bersih yang dikelola oleh kedua perusahaan pada tahun 2007 adalah 18.260 l/det, dengan jumlah pelanggan sebanyak 755.555 unit atau dengan cakupan pelayanan PT Palvia sekitar 60% dan PT Aetra sekitar 65,9% dari kebutuhan pelayanan DKI Jakarta.</p> <p>Peningkatan pelayanan air bersih direncanakan seluruhnya dengan sistem perpipaan kota secara bertahap untuk membatasi penggunaan airtanah dalam</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>serta fasilitas pejalan kaki di kawasan yang padat lalu lintas terutama di sekitar terminal bus dan stasiun kereta api; dan</p> <p>g. mengembangkan jaringan transportasi air.</p> <p>(3) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pembangunan jaringan prasarana air limbah dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan sekitar waduk dan/atau kawasan reklamasi Pantura;</p> <p>b. pengembangan sistem prasarana air bersih melalui jaringan perpipaan pada tiap kecamatan;</p> <p>c. rehabilitasi Waduk Sunter, Don Bosco, Pluit, Muara Angke, Teluk Gong, dan Tol Sedatmo dan pembangunan Waduk Marunda sebagai tempat penampungan air sementara;</p> <p>d. Pembangunan septictank komunal di kawasan permukiman padat sedang terutama di perumahan kumuh.</p> <p>(4) Rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. normalisasi Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Sunter, Kali Ciliwung, Kali Kamal Muara, Kali Tanjungan, Kali Banglio, dan Kali Baru;</p> <p>b. memantapkan Banjir Kanal Timur sebagai</p>	<p>guna menghindari amblesan tanah dan intrusi air laut.</p> <p>Penyediaan air bersih perpipaan direncanakan meningkat menjadi 80% pada tahun 2015 dan 100% pada akhir tahun rencana.</p> <p>Arahan pengembangan sistem dan jaringan air bersih meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sumber air permukaan sebagai air baku air bersih untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta dengan tingkat konsumsi sebesar 150 liter/orang/hari. • Pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan air bersih. • Akses pelayanan air bersih dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan kapasitas produksi air bersih dari sumber air eksisting untuk memenuhi kebutuhan air pada masa mendatang; – Optimalisasi pengoperasian jaringan distribusi baru pada instalasi pengolahan air yang ada dan yang akan dibangun; – Pembangunan waduk di bagian Selatan Jakarta sebagai pengendali banjir sekaligus pemasok air baku; dan – Pemanfaatan sumber-sumber alternatif air baku, seperti desalinisasi. • Pembangunan jaringan distribusi air bersih melalui :

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. prasarana pengendali banjir; pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air di kawasan Jalan Tol Sedyatmo, Kawasan Pluit, Kelapa Gading, Tugu Utara, Kebon Bawang, Rawa Badak,dan Pademangan;</p> <p>d. penataan bantaran sungai melalui penerbitan bangunan ilegal di kali Kamal, Banjir Kanal Barat, Kali Sunter, Kali Cakung dan Kali Cililung;</p> <p>e. pembangunan fisik diarahkan menghadap sungai (<i>river front development</i>);</p> <p>f. pembangunan sistem polder baru dan pemulihan sistem polder yang sudah ada di sistem polder terutama di Sunter Timur III, Kelapa Gading, Tunjungan, Yos Sudarso, Muara Angke, Pluit, Sunter Selatan, Sunter Timur I, Sunter Utara, Teluk Gong, Bimoli, Gaya Motor, Kapuk Muara;</p> <p>g. pemulihan Situ Rawa Kendal;</p> <p>h. pelarangan pembuangan sampah ke dalam sungai dan kanal dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan</p> <p>i. pengelolaan situ Sunter Barat, Sunter I, Sunter II, Teluk Gong dan Pluit</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara termuat pada Gambar 24 dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Percepatan penyediaan jaringan distribusi di bagian Utara terkait pengembangan kawasan Pantura Jakarta dan kawasan Marunda; – Pengembangan jaringan distribusi air bersih ke wilayah Barat dan Timur DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan kota; dan – Penambahan hidran umum pada bagian kota yang berpenduduk padat. <p>Arahan sistem konservasi sumber daya air meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berada di Kawasan Jabodetabekpunjur mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. • Rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi didasarkan pada indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual. • Pola ruang DKI Jakarta didasarkan pada prinsip berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Konservasi sumber daya air untuk memelihara keberlanjutan sumber daya air; – Pengendalian penurunan muka tanah melalui pengendalian penggunaan dan kerusakan tata airtanah; – Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Rencana kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), di Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan terbuka hijau budi daya; b. kawasan perumahan dan fasilitasnya; c. kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa; d. kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman; e. kawasan pariwisata; f. kawasan pemerintahan daerah; g. kawasan terbuka biru; h. kawasan perikanan; dan i. kawasan industri dan perdagangan. <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana kawasan terbuka hijau budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. menata dan melestarikan hutan kota; b. mengembangkan jalur hijau; c. pengembangan kawasan taman kota; dan d. pengembangan kawasan terbuka hijau lain. (2) Rencana menata dan melestarikan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di sekitar Waduk Pluit, Waduk Sunter Barat, dan Waduk Sunter Timur, dan kawasan reklamasi pantura; (3) Rencana pengembangan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan di sepanjang pantai yang 	<p>sumber air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan sumber air; c. pengaturan daerah sempadan sumber air; d. pengisian air pada sumber air; e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan di sekitarnya. – Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. menyimpan air yang berlebihan pada saat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan; b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien; c. mengendalikan penggunaan airtanah. – Pengendalian pencemaran air serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi perkotaan; – Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam,

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dipadukan dengan budidaya perikanan, jalur hijau jalan, tepian sungai dan kanal, jalur rel kereta api, jalur hijau pengaman rel kereta api atau saluran tegangan tinggi dan kawasan reklamasi pantura;</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan terbuka hijau di kawasan Kota Tua; b. mengembangkan dan mempertahankan kawasan RTH; c. mendorong penanaman pohon dan tanaman hias di halaman rumah, tepi dan median jalan, tepi sungai, dan jaringan pipa; d. menata dan memelihara jalur hijau pada tepi dan median Tol Sediyatmo, Cakung Cilincing dan tol pelabuhan; e. mendorong masyarakat untuk mengembangkan <i>roof garden</i> dan dinding hijau di kawasan permukiman dan perkantoran terutama di kawasan dengan KDB tinggi; f. penataan dan pemeliharaan taman; g. peruntukan lahan di kawasan RTH publik tidak dapat diubah; dan h. Peningkatan areal kawasan hijau yang salah satu bentuknya merupakan taman kota pada pengembangan kawasan reklamasi pantura <p>(5) Rencana pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan</p>	<p>kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.</p> <p><u>Rencana Pengelolaan Air Limbah</u></p> <p>Rencana pengelolaan air limbah DKI Jakarta mengikuti master plan air limbah yang disusun pada tahun 1991 yang diperbaiki pada tahun 2001 dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master Plan Air Limbah Jakarta Tahun 1991 <p>Dalam Master Plan Air Limbah DKI Jakarta tahun 1991, DKI Jakarta dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan sanitasi yang didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk, tinggi muka airtanah, permeabilitas tanah, kondisi sosial-ekonomi, dan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sistem Pengolahan Setempat Sederhana (Daerah A) dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 jiwa/ha dengan luas wilayah 21.159 Ha (32%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah tangki septik. – Sistem Pengolahan Setempat Tingkat Tinggi (Daerah B) dengan tingkat kepadatan penduduk 100 - 300 jiwa/ha dengan luas wilayah 27.386 Ha (42%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah tangki septik atau sistem <i>sewerage</i> yang

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan lahan pertanian yang ada di Cilincing, Marunda, Kamal dan Kamal Muara; dan b. mempertahankan lahan pemukiman di Kawasan Cilincing, Koja dan Tanjung Priok serta lapangan olahraga yang ada. <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang melalui program tribina; b. mengembangkan perumahan lingkungan permukiman kumuh berat; c. mendorong pengembangan kawasan permukiman vertikal dan memperkecil perpetaan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai; d. mengembangkan perumahan menengah-atas di areal reklamasi Pantura; e. mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan; f. membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa sekaligus melestarikan lingkungan; g. mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan di kawasan pantai lama; 	<p>dimodifikasi sesuai kemampuan ekonomi masyarakat.</p> <p>– Sistem <i>sewerage</i> (Daerah C) dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa/ha dengan luas wilayah 16.604 Ha (26%). Teknologi pengolahan yang diterapkan adalah <i>aerated lagoon</i> atau <i>activated sludge</i>.</p> <p>Untuk daerah pengembangan sanitasi dengan sistem <i>sewerage</i> di daerah C, sistem pengelolaan air limbah dibagi menjadi 6 (enam) zona, yaitu :</p> <p><u>Zona Pusat</u></p> <p>Luas wilayah yang dilayani adalah 6.017 Ha, dimana 336 Ha atau 6% berlokasi di bagian Selatan dari zona yang tercakup dalam Jakarta Sewerage System Project. Luas wilayah sistem konvensional dan sistem interseptor adalah 3.422 Ha (57%) dan 2.595 Ha (42%). Air limbah yang tertampung akan dialirkan melalui pipa dengan panjang 10,2 km menuju tempat pengolahan, yaitu di Waduk Pluit dengan pengolahan, yaitu di Waduk Pluit dengan peningkatan kapasitas untuk menampung air limbah sebesar 529.000 m³/hari dengan luas waduk 80 Ha. Waduk berfungsi sebagai pengolah air limbah dan pengendali banjir.</p> <p><u>Zona Baratlaut</u></p> <p>Pada zona ini, sistem interseptor mencakup luas 1.332 Ha atau 72% dari total wilayah pelayanan, yaitu seluas 1.862 Ha. Sistem konvensional mencakup</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>h. mempertahankan fungsi perumahan di kawasan mantap di Kota Tua, Kelapa Gading, dan Pluit;</p> <p>i. melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman horizontal;</p> <p>j. mengembangkan kawasan permukiman di Kawasan Pantai Lama;</p> <p>k. pengendalian pembangunan perumahan baru di Pademangan, Cilincing dan Penjaringan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>l. pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun sederhana di perumahan kumuh berat sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kalibaru, Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjaringan dan melengkapi penataan RTN yang berfungsi ekologis dan sosial;</p> <p>m. pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, Kelapa Gading, dan Penjaringan yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir; dan</p> <p>n. Rencana pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan tingkat kepadatan lingkungan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, terdiri atas :</p> <p>a. rencana pengembangan kawasan perkantoran yang terdiri atas perkantoran</p>	<p>luas sekitar 530 Ha (28%). Air limbah dialirkan melalui pipa utama (<i>force main</i>) sepanjang 9,7 km menuju tempat pengolahan berupa modifikasi <i>aerated lagoon</i> berkapasitas 124.000 m³/hari dengan luas 17,7 Ha di dekat anak Sungai Angke dan Pesanggrahan di Kelurahan Rembulan.</p> <p><u>Zona Baratdaya</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 2.170 Ha, dimana 938 Ha (43%) menggunakan sistem konvensional dan 1.232 Ha (57%) menggunakan sistem interceptor. Air limbah dialirkan melalui pipa utama sepanjang 3,7 km dan pipa pembawa sepanjang 2,7 km menuju tempat pengolahan berupa modifikasi <i>aerated lagoon</i> dengan kapasitas 117.000 m³/hari dengan luas 16 Ha di kawasan hijau di Kelurahan Joglo.</p> <p><u>Zona Timurlaut</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 3.496 Ha, dimana 1.610 Ha (46%) dilayani sistem konvensional dan 1.886 Ha (54%) menggunakan sistem interceptor. Air limbah dialirkan melalui pipa pembawa dengan panjang 7,4 km menuju ke tempat pengolahan berupa kolam <i>activated sludge</i> dengan kapasitas 261.000 m³/hari dan luas 14 Ha meliputi bagian Timur waduk Sunter dan kawasan hijau di Kelurahan Sunter Jaya.</p> <p><u>Zona Tenggara</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 1.243 Ha yang sebagian besar menggunakan sistem</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pemerintahan dan perkantoran swasta:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana pengembangan kawasan perdagangan yang terdiri dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, ataupun bentuk kawasan perdagangan lainnya; rencana pengembangan kawasan pelayanan umum dan sosial; dan rencana pengembangan kawasan campuran <p>(2) Rencana pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mengembangkan fasilitas perkantoran di kawasan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Sunter, dan Enggano.</p> <p>(3) Rencana pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan; mengembangkan kawasan perdagangan di Pantura dengan pola pengembangan multifungsi atau super blok dengan fasilitas bertaraf internasional; menata fungsi kawasan kota tua untuk mendukung kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan pariwisata; mengembangkan kawasan perdagangan, jasa, dan perkantoran di Tanjung Priok dan sebagian Kelapa Gading; membatasi pengembangan perdagangan, jasa, dan perkantoran sepanjang jalan 	<p>interseptor. Luas cakupan sistem penghubung dan sistem konvensional masing-masing adalah 936 Ha (75%) dan 307 ha (25%). Air limbah dialirkan melalui pipa utama sepanjang 0,5 km menuju tempat pengolahan berupa modifikasi <i>aerated lagoon</i> berkapasitas 101.000 m³/hari dengan luas 13 Ha di kawasan hijau di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.</p> <p><u>Zona Tanjung Priok</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 1.502 Ha dengan cakupan sistem konvensional dan sistem interseptor masing-masing 700 Ha (47%) dan 802 Ha (53%). Air limbah dialirkan melalui pipa utama sepanjang 1,0 km menuju tempat pengolahan berupa <i>aerated lagoon</i> dengan kapasitas 120.000 m³/hari dan luas 36 Ha di kawasan hijau dan waduk Sunter Timur II di Kelurahan Semper Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta Wastewater Disposal Project tahun 2001 <p>Beberapa perubahan terhadap master plan air limbah tahun 1991, khususnya rencana pengembangan <i>sewerage</i> di zona pusat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rencana lokasi IPAL di waduk Pluit dipindahkan ke Muara Baru, yaitu pada lahan reklamasi. – Rencana pengolahan air limbah dibagi menjadi 6 subsistem yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Subsistem Thamrin dilayani IPAL Waduk Setiabudi;

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>arteri primer dengan memperhatikan lalu lintas dan penyediaan parkir;</p> <p>f. pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum berdasarkan arahan penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Yos Sudarso untuk menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan</p> <p>g. mengembangkan pusat perdagangan dengan KDB rendah di Kamal, Kapuk, Pademangan, Ancol, Cilincing, dan sebagian Kelapa Gading.</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa taman dilaksanakan pada kawasan Marunda dengan penerapan intensitas rendah dan meningkatkan daya resap air pada kawasan terbangun.</p> <p>(5) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan; dan</p> <p>b. pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dengan prasarana dan sarana yang standar pelayanan minimal di setiap kecamatan</p> <p>c. pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal di setiap kecamatan.</p> <p>(6) Rencana pengembangan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan</p>	<p>b. Subsistem Setiabudi Tebet dilayani IPAL Waduk Setiabudi;</p> <p>c. Subsistem Gajahmada dilayani IPAL Muara Baru;</p> <p>d. Subsistem Pantai Mutiara dilayani IPAL Muara Baru;</p> <p>e. Subsistem Kali Ancol dilayani IPAL Kali Ancol;</p> <p>f. Subsistem Kali Grogol dilayani IPAL Grogol;</p> <p>g. Subsistem Waduk Grogol dilayani IPAL Grogol; dan</p> <p>h. Subsistem Siantar dilayani IPAL Muara baru.</p> <p>Direncanakan pula 8 (delapan) pumping station, yaitu PS1 Krukut, PS2 Pasar Rumpit, PS3 Abdul Muis, PS4 Pluit, PS5 Kali Grogol, PS6 Kali Grogol, PS7 Kali Ancol, dan PS8 Siantar.</p> <p>IPAL Muara Baru berlokasi di lahan reklamasi Teluk Muara Baru, yaitu di sebelah Utara pompa banjir Pluit, di sebelah Timur perumahan pantai Mutiara atau di sebelah Barat pasar ikan seluas 40 Ha. Jenis pengolahan pada tahap I berupa <i>aerated lagoon</i> dan pada jangka panjang menggunakan <i>activated sludge</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review Master Plan dan DED tahun 2009 <p>Rencana mencakup zona pusat bagian Utara dan tidak termasuk Setiabudi-Tebet, antara lain :</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>arahan pengembangan kawasan campuran, perdagangan, dan jasa dengan perumahan vertikal dan horisontal terutama di kawasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan Lodan; Jalan Martadinata; Jalan Yos Sudarso; Kawasan Cilincing; Kawasan Kelapa Gading; dan Kawasan Sunter. <p>(7) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman dilaksanakan di Kawasan Marunda dengan menerapkan intensitas rendah dan memperhatikan aspek fisik lingkungan yang ada</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d, diarahkan untuk pengembangan kawasan destinasi wisata pesisir.</p> <p>(2) Kawasan destinasi wisata pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sentra Perikanan Muara Angke; Masjid dan Makam Luar Batang; Pelabuhan dan Kota Tua Sunda Kelapa; Pusat Perbelanjaan Mangga Dua; Taman Impian Jaya Ancol; Bahtera Jaya dan Yacht Club; Stasiun Tanjung Priok; Masjid Islamic Center; Gereja Tugu; 	<ul style="list-style-type: none"> – IPAL Muara Baru dipindahkan ke Pluit Selatan untuk tahap I dan Pluit Utara untuk jangka panjang. – IPAL Pluit Selatan melayani subsistem Gajah Mada, Thamrin, Pantai Mujiara, Siantar, dan Kali Ancol dengan kapasitas 86.400 m³/hari. – IPAL Kali Ancol tidak dibangun dan dialihkan ke <i>main system</i> IPAL Muara Baru. – IPAL Grogol tetap melayani subsistem Kali Grogol dan Waduk Grogol. – Pengeolahan air limbah dengan sistem <i>activated sludge</i> dan <i>membrane</i> untuk daur ulang. – Sistem pengumpulan air limbah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem Timur dan sistem Barat dengan batas Jl. Thamrin dan Jl. Gajahmada. Masing-masing sistem dilayani <i>main trunk</i> dengan diameter 1,8 m yang ditempatkan pada kedua jalur di sepanjang Jl. Thamrin dan Jl. Gajahmada/Hayam Wuruk hingga ke IPAL di Pluit Selatan. <p>Selain itu, dibangun sistem <i>sewerage</i> di Setiabudi-Tebet sebagai pengembangan yang ada pada saat ini.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>k. Kampung Tugu; l. Cagar Budaya Rumah si Pitung; m. Masjid Al Alam; dan n. Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading,</p> <p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf e, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pelarangan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi pada tiap kecamatan yang berbatasan dan/atau memiliki kawasan perairan laut; b. pengembangan prasarana budi daya perikanan di Muara Baru dan Muara Angke sesuai dengan klasifikasinya; dan c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup pada tiap kecamatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui penataan kantor-kantor pemerintahan daerah dan lingkungan sekitarnya baik itu tingkat Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan;</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan terbuka biru dilaksanakan untuk melaksanakan konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air, dan</p>	<p>Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pengelolaan Air Limbah <p>Kebijakan pengelolaan air limbah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah <i>on site</i> dan <i>off site</i>. – Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah kota. – Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah kota. – Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah kota. – Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah kota. <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pengelolaan Air Limbah <p>Strategi yang diterapkan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pemisahan sistem drainase dan perpipaan tertutup secara bertahap disertai dengan pengelolaan air limbah. – Sistem pengelolaan air limbah dikelompokkan menjadi : <ul style="list-style-type: none"> a. Limbah industri b. Limbah domestik – Pengelolaan air limbah industri dilakukan secara sistem komunal atau sistem individual sebelum

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pengendalian daya rusak air yang dilaksanakan pada Sungai, Kali, Situ dan Waduk serta Pantai yang ada di Jakarta Utara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f, meliputi:</p> <p>a. rencana pengembangan kawasan industri; dan</p> <p>b. rencana pengembangan kawasan pergudangan.</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. membatasi kegiatan industri di kawasan yang sudah ada di Penjaringan, Kelapa Gading, dan Cilincing;</p> <p>b. mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing; dan</p> <p>c. penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal</p> <p>(3) Pemanfaatan ruang kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan arahan:</p> <p>a. penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing dan Kali baru; dan</p> <p>b. relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dari Ancol Barat, Marunda, dan Cilincing.</p>	<p>dibuang ke lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prasarana pengelolaan air limbah domestik terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem komunal b. Sistem komunal semi c. Sistem individual – Pengembangan pengolahan air limbah diprioritaskan pada Zona Pusat. <p>Pembagian daerah pelayanan pengolahan air limbah dilakukan dengan memperhatikan daerah layanan sistem polder.</p> <p><u>Rencana Prasarana Persampahan</u></p> <p>Sistem jaringan persampahan yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.</p> <p>Pengembangan pengelolaan persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dari sumbernya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah dan pengembangan prasarana sarana pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.</p> <p>Pengembangan Sistem prasarana persampahan meliputi :</p> <p>a. Peningkatan peran serta masyarakat</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b, dengan cara :</p> <p>a. mengembangkan kawasan perdagangan untuk mengatasi perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa;</p> <p>b. relokasi kawasan perdagangan dari Kawasan Kota Tua; dan</p> <p>c. penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang untuk mengembangkan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan melalui penyediaan fasilitas perdagangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa yang dilaksanakan di :</p> <p>a. Penjarangan,</p> <p>b. Koja;</p> <p>c. Kelapa Gading; dan</p> <p>d. Cilincing.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara termuat pada Gambar 25 dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini</p>	<p>dalam pengolahan sampah</p> <p>Melalui penggalakan program 4R (<i>reuse, reduce, recycling, recovery</i>) pada setiap Rukun Warga dan menyediakan sarana pendukungnya.</p> <p>b. Peningkatan sistem pelayanan persampahan</p> <p>Pengembangan persampahan di Jakarta dilaksanakan kedalam sistem multi simpul (multi nodal) terbagi dalam beberapa daerah pelayanan dimana setiap daerah pelayanan dilengkapi dengan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Sementara) dan ITF (<i>Intermediate Treatment Facility</i>) dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan.</p> <p>c. Pengembangan TPST di luar Jakarta</p> <p>Pengembangan kerja sama untuk penyediaan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dengan daerah lain dimungkinkan dengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial setempat.</p> <p>d. Pengembangan prasarana sampah B3</p> <p>Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolannya dilakukan dengan teknologi yang tepat.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>e. Pengelolaan sampah dari drainase/sungai</p> <p>Penyediaan sarana pengelolaan sampah dari drainase/sungai dilakukan guna pencegahan banjir, meningkatkan kualitas air sungai dan estetika.</p> <p>f. Penanganan sampah/limbah di perairan laut.</p> <p>g. Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai, misalnya insinerator pada lokasi tertentu.</p> <p><u>Rencana Pengembangan Kawasan Terbuka Biru</u></p> <p>a. Perlu ada regulasi spesifik yang mengatur zona area yang berimpit dengan badan air (waterfront, seafont, lakeside, riverside, dsb) sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai area bernilai tambah tinggi. Sehingga pengembangan bernilai tambah tinggi lebih layak mendapat prioritas di zona tersebut. Hal ini diharapkan akan mengubah paradigma apresiasi terhadap badan air sehingga waterfront menjadi area muka bangunan bukan belakang bangunan.</p> <p>b. Prioritas utama lain di area waterfront adalah untuk ruang terbuka publik, infrastruktur dan fasilitas publik sehingga memberi publik akses lebih pada area waterfront.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah masuk dalam RTRW 2030 <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu dijabarkan/dimasukkan dalam Rencana Pembangunan (RPJPD/RPJMD) <ul style="list-style-type: none"> • Dalam RTRW perlu dijelaskan bagaimana pencapaian program didukung dengan data dan pembahasan lebih lanjut • Perlu dilihat alur pemikiran/sub tahapan yang akan diakomodasi di RPJM/RPJ/P/RTRD • Perlu diprioritaskan penanganan masalah banjir, pemukiman nelayan, rob/kenaikan air laut • Dalam menyusun RTRW perlu mempertimbangkan perilaku masyarakat, bagaimana masalah sosial budaya yang harus ditangani • Dalam menyusun RTRW perlu dilihat juga kondisi sosial di daerah tersebut, karena kerusakan fisik tersebut akibat kondisi masyarakat juga • Kemampuan masyarakat Jakarta Utara perlu dibantu dan perlu ditampung dalam RPJMP • Perlu juga memikirkan ruang untuk masyarakat kelas bawah yang bila tidak teralokasikan akan menyebabkan kesemrawutan pemanfaatan ruang • Dalam rencana perbaikan fisik yang akan dilakukan perlu

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • dipertimbangkan masalah manusia, yaitu harus dipetakan perilaku masyarakatnya • Perlu kepastian hukum dalam berinvestasi dan perlu jaminan keamanan kelas atas • Perlu penanganan mobilitas kelas menengah dari pinggir kota ke pusat kota yang semakin mahal • Perlu ada perlindungan jaringan pengaman sosial terhadap dampak kesenjangan kelas semakin tinggi • Masyarakat yang tidak mampu perlu ditampung pada jaringan pengaman sosial • Perlu dikaji kembali misi DKI sebagai kota jasa, tidak hanya memikirkan untuk kelas menengah atas saja akan tetapi juga harus dipikirkan untuk masyarakat bawah • Perlu dihilangkan pembiasaan pembiaran sesuatu hal tanpa ada pencegahan • Perlu penjelasan apakah akan ada petertiban atau membiarkan adanya dinamika kehidupan yang berbeda • Perlu proses perencanaan induk yang tidak bersifat parsial karena menyebabkan integrasi kawasan ekonomi dan social menjadi

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menjadikan lingkungan sebagai sumber kebijakan agar tidak terjadi ego sektoral • Perlu adaantisipasi isu future development • Ditjen Migas perlu menangani masalah energi alternative • RUPSB dan RUPE perlu dihidupkan kembali dan diintegrasikan dengan RTRW • PDRB lingkungan dan PDRB ekonomi bisa dikaji dalam KLHS pantura • Pembangunan Teluk Jakarta perlu dilihat secara sistemik (antar wilayah) dengan orientasi keuntungan internasional <p>b. Perlu dijabarkan/dimasukan dalam Rencana Tata Ruang Rinci (Rencana Kawasan Strategis/RDTR/Peraturan Zonas/Masterplan/UDG1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam RTRW perlu dijelaskan bagaimana pencapaian program didukung dengan data dan pembahasan lebih lanjut • Perlu diprioritaskan penanganan masalah banjir, pemukiman nelayan, rob/kenaikan air laut • Perlu penanggulangan abrasi dan kerusakan pantai • Perlu ada pemeliharaan mangrove khususnya dari sampah, sebelah selatan reklamasi diharapkan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • penanaman mangrove • Penanaman mangrove disebelah selatan daerah reklamasi perlu dipertimbangkan bahwa mangrove hanya hidup diperairan dangkal dan pada perairan air tawar/air payau dan dapat mengakibatkan kecenderungan sedimentasi di dalam kanal • Perlu dipikirkan perlindungan raw water dari berbagai polutan khususnya sampah • Perlu ada penanganan bagan yang mengganggu alur pelayaran • Perlu penyediaan ruang bagi masyarakat bawah • Perlu disediakan ruang untuk pedagang kaki lima • Untuk mendekatkan kelas menengah dan atas dengan kelas bawah, perlu dimulai dengan mengembangkan fungsi ekonomi kelas bawah terhadap kelas menengah (misalnya berupa Pujasera), sehingga terjadi peningkatan penghasilan. Disamping itu juga perlu membuka akses ke Pantai bagi masyarakat kelas bawah serta mengembangkan wisata Pantai bersama mereka (partisipasi ekonomi) • Sektor informal perlu diberdayakan dan ditata secara

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kendali keberadaan nelayan yang berasal dari luar berusaha di Jakarta • Perlu juga memikirkan ruang untuk masyarakat kelas bawah yang bila tidak terlokasikan akan menyebabkan kesemrawutan pemanfaatan ruang • Perlu mulai dibudayakan “pemukiman vertical”, tetapi jangan dimulai dari kelas bawah, melainkan dari kelas menengah dengan “system land consolidation” untuk menghindari pengusuran. Perbaiki perumahan kelas bawah (kampung kumuh) yang tidak liar sebaiknya dilakukan dengan pendekatan “perbaikan Kampung”, bukan “urban renewal” • Perlu ada kejelasan mana yang akan diaduhulukan, apakah revitalisasi pesisir pantai Utara atau reklamasi • Perlu ada kejelasan mengenai keberadaan pantai yang seharusnya milik publik, akan tetapi dari 32 km panjang pantai utara hanya 8 km yang dapat diakses oleh publik, selebihnya dikuasai oleh berbagai kepentingan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dijabarkan tujuan reklamasi adalah untuk perbaikan lingkungan pantai • Perlu dikembangkan juga revitalisasi daerah pesisir • Yang mereklamasi wajib memberikan kontribusi untuk membiayai revitalisasi daerah pesisir • Yang melakukan reklamasi wajib menyediakan air bersih sendiri, penanganan sampah sendiri, sumber energy yang memadai • Perlu ditata kembali kegiatan arus urbanisasi dari daerah luar Jakarta termasuk nelayan yang ada di DKI kebanyakan pendatang karena adanya pembangunan di Jakarta • Perlu ditata kembali pelabuhan nelayan apakah sudah tepat pada tempatnya yang ada sekarang, karena daerah penangkapannya berada diluar Jakarta. • Perlu ada antisipasi isu future development • Perlu ada kepastian hukum dan mekanismenya • Perlu ada sinkronisasi antara kegiatan reklamasi dengan pembangunan infrastruktur pipa gas dimana memerlukan criteria khusus, mengingat infrastruktur pipa gastersebut sudah ada

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>c. Perlu dijabarkan/dimasukan dalam Rencana/Kebijakan Sectoral Provinsi DKI Jakarta (RP4D, Pola Transportasi Massal, Rencana Induk/Masterplan Banjir, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam RTRW perlu dijelaskan bagaimana pencapaian program didukung dengan data dan pembahasan lebih lanjut • Perlu ada program yang lebih fokus dan detil mengenai penanganan isu bio fisik dan social • Perlu ada metode dalam penanganan isu • Masalah sosial perlu ditampung pada PMKS • Perlu ditangani genangan air yang terjadi • Perlu perbaikan tanggul yang ada untuk mengatasi masalah rob yang sudah menjadi langganan • Perlu dioptimalkan rumah pompa • Perlu penanganan abrasi dan kerusakan pantai • Perlu ada pemeliharaan mangrove khususnya dari sampah, sebelah selatan reklamasi diharapkan penanaman mangrove • Penanaman mangrove disebelah selatan daerah reklamasi perlu

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>dipertimbangkan bahwa mangrove hanya hidup diperairan dangkal dan pada perairan air tawar/air payau dan dapat mengakibatkan kecenderungan sedimentasi di dalam kanal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kejelasan mengenai masalah mangrove, masyarakat siap menyediakan puluhan ribu bibit mangrove untuk di tanam di pantai Jakarta. Akan tetapi mau ditanam dimana. Selama ini hanya ditanam di daerah kapuk di kawasan KNI. Apa hanya di kawasan KNI saja, apakah itu tidak akan menguntungkan pengembang saja, apa manfaatnya bagi masyarakat • Perlu kebijakan pertahanan karena banyak daerah yang tadinya hutan mangrove sudah tergerus oleh abrasi sehingga terjadi kemunduran garis pantai, padahal di daerah selatannya ada tanah milik masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah pertahanan yaitu bukti kepemilikan • Perlu dipikirkan perlindungan raw water dari berbagai polutan khususnya sampah • Perlu diperhatikan kondisi fisik sungai besar

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pemberdayaan masyarakat setempat, jadi hanya yang diutamakan hanya fisik saja, tetapi perlu pembangunan manusianya • Perlu dipikirkan alih profesi seperti apa untuk mengatasi kekosongan kegiatan karena pada saat musim angin barat yaitu pada bulan September – Desember umumnya ombak besar sehingga nelayan tidak bisa melaut. • Masalah kemiskinan di kawasan ini perlu diselesaikan dulu mengenai masalah nelayan, karena mereka telah mengalami penurunan kapasitas dan mulai embutihkan suatu perubahan profesi, kedua pengembangan UKM disertai pembangunan pemukiman dengan pendekatan Perbaikan Kampung • Perlu kejelasan mengenai pemukiman nelayan apakah tidak akan menambah permasalahan baru, karena dengan dilakukan pemukiman nelayan akan mengundang nelayan baru dari luar DKI • Terhadap nelayan jangan hanya perumahannya saja yang ditingkatkan, yang penting adalah bagaimana untuk meningkatkan ekonominya agar

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>strata sosialnya meningkat. Jadi jangan keberadaannya yang dilindungi dengan menyediakan perumahan, memperbaiki sanitasi dsb, bila ekonominya tidak diperbaiki sama halnya dengan melestarikan kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dibutuhkan oleh kelas bawah bukanlah perbaikan pemukiman, perbaikan sanitasi, akan tetapi yang dibutuhkan adalah perbaikan ekonomi, peningkatan ketrampilan agar bisa meningkatkan strata sosialnya dari kelas bawah ke kelas menengah • Perlu penataan kembali perumahan kelas menengah secara vertical dengan cara "land consolidation", sehingga penduduk lama tidak tergusur, tetapi penduduk baru bisa masuk ke daerah itu secara efisien. Perumahan vertical sebaiknya mulai dari kelas atas dan menengah, bukan dari kelas bawah, karena kemiskinan mereka masih sangat dalam, mereka belum siap untuk menghuni rumah susun • Perlu pemberdayaan masyarakat dalam menangani kesenjangan ekonomi • Untuk mendekatkan kelas menengah dan atas dengan kelas

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>bawah, perlu dimulai dengan mengembangkan fungsi ekonomi kelas bawah terhadap kelas menengah (misalnya berupa Pujasera), sehingga terjadi peningkatan penghasilan. Disamping itu juga perlu membuka akses ke Pantai bagi masyarakat kelas bawah serta mengembangkan wisata Pantai bersama mereka (partisipasi ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu kejelasan, sinkronisasi yang terintegrasi antara rencana induk pelabuhan nasional yang disusun oleh Dept. Perhubungan dengan pengembangan pelabuhan daerah, khususnya di Marunda • Perlu ada kejelasan tentang rencana pengembangan marunda karena terkait dengan pengembangan pelabuhan • Perlu ditata kembali pelabuhan nelayan apakah sudah tepat pada tempatnya yang ada sekarang, karena daerah penangkapannya berada diluar Jakarta. • Perlu dihilangkan pembiasaan pembiaran sesuatu hal tanpa ada pencegahan • Perlu kepastian hukum dalam berinvestasi dan perlu jaminan keamanan kelas atas

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang tidak mampu perlu ditampung pada jaring pengaman sosial • Perlu diangkat isu budaya. Ada budaya nelayan seperti nagrang/pesta laut. Akan tetapi tidak terlaksana dengan baik, karena dikaitkan dengan agama dan dikatakan perbuatan syirik. Sebenarnya Nagrang/pesta laut bisa dikaitkan dengan pesta wisata. Hal ini dapat mengangkat keterpurukan para nelayan. • RUPSB dan RUPE perlu dihidupkan kembali dan diintegrasikan dengan RTRW <p>d. Perlu dijabarkan pada rencana tata ruang, rencana pembangunan, atau rencana/kebijakan sektoral ditingkat pusat atau pemerintah daerah lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu memperhatikan keterkaitan aktifitas hulu yang berdampak terhadap kualitas di Pantura • Perlu dicegah/ ditanggulangi penyebab dari isu strategis yang akhirnya memperluas wilayah lebih ke bagian hulu • Dalam menangani masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu diperhatikan urbanisasi yang terjadi, bagaimana mengendalikan penduduk Serang, Cirebon dsb

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>agar tidak berduyun-duyun ke Jakarta. Perlu dikoordinasikan oleh instansi yang lebih tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta, Bekasi dan Tangerang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kekayaan wisata darat, tetapi bersama-sama mengembangkan wisata bahari dengan kepulauan seribu • Perlu kebijakan pertanahan karena banyak daerah yang tadinya hutan mangrove sudah tergerus oleh abrasi sehingga terjadi kemunduran garis pantai, padahal di daerah selatannya ada tanah milik masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah pertanahan yaitu bukti kepemilikan • Perlu kejelasan, sinkronisasi yang terintegrasi antara rencana induk pelabuhan nasional yang disusun oleh Dept. Perhubungan dengan pengembangan pelabuhan daerah, khususnya di Marunda • Ditjen Migas perlu menangani masalah energi alternative • Perlu ada perencanaan dari PLN untuk kawasan Pantura dan DKI Jakarta <p>2. Belum masuk dalam RTRW 2030</p> <p>a. Perlu dimasukkan dalam batang tubuh RTRW 2030</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu kejelasan dalam pengembangan pantura, apakah diperuntukkan bagi kelas atas, menengah atau kelas bawah <p>b. Perlu dimasukkan dalam penjelasan RTRW 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditampung/ diakomodir pelabuhan wisata • Perlu diantisipasi oleh pengembang daerah reklamasi adalah adanya penurunan muka tanah 5 – 10 cm pertahun • Dalam pembuatan tanggul perlu diperhitungkan kenaikan muka laut + 5 mm/tahun akibat pengaruh iklim global • Perlu diantisipasi urbanisasi dari daerah termasuk nelayan akibat kegiatan pembangunan di Jakarta <p>c. Perlu dimasukkan dalam lampiran (peta/table)</p>

REKOMENDASI ISU STRATEGIS KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP KABUPATEN BEKASI

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSIOBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p>BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 37</p> <p>(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ;</p> <p>(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KSN Jabodetabekpunjur;</p> <p>(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. KSP Koridor Bekasi-Cikampek;</p> <p>b. KSP Pertanian Lahan Basah dan Beririgasi Teknis Pantura;</p> <p>c. KSP Pesisir Pantura.</p> <p>(4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :</p> <p>1. Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi kawasan :</p> <p>a) Tambun Selatan</p> <p>b) Cibitung</p> <p>c) Cikarang Utara</p> <p>d) Cikarang Selatan</p> <p>e) Cikarang Timur</p> <p>f) Cikarang Barat</p> <p>g) Cikarang Pusat</p> <p>h) Babelan</p> <p>i) Tarumajaya</p> <p>j) Sukawangi, dan</p>	<p>Raperda RTRW Kabupaten Bekasi 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p><u>Land Subsidence</u></p> <p>- Tidak ada pasal yang membahas secara khusus tentang land subsidence walaupun secara analogi dan dampak land subsidence ini mungkin terjadi tetapi tidak ada data</p> <p>- Landsubsidence tidak signifikan sekarang, kemungkinan terjadi pada masa yang akan datang, dimana kepadatan sudah tinggi</p> <p>- Dalam RTRW perlu ada pengendalian pemanfaatan air bawah tanah</p> <p><u>Rob dan Kenaikan Muka Air Laut</u></p> <p>- Pasal 18 Ayat (4) Huruf a dan b dimasukkan pada pasal yang sesuai, bukan pada struktur</p> <p>- Perlu ada ketentuan mengenai strategi penanggulangan rob/kenaikan muka air laut</p> <p><u>Banjir/Genangan</u></p> <p>Pasal 52 ayat (9) ditambahkan Huruf j. Penerapan teknologi lahan basah bagi permukiman rawan banjir</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>k) Cabangbungin</p> <p>2. Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi kawasan :</p> <p>a) Sukatani</p> <p>b) Karang Bahagia</p> <p>c) Pebayuran</p> <p>d) Kedungwaringin</p> <p>e) Tambelang</p> <p>f) Sukawangi</p> <p>g) Cabangbungin</p> <p>b. KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah KSK Muaragembong;</p> <p>c. KSK bidang sosial dan budaya meliputi :</p> <p>1. KSK Cikarang Pusat; dan</p> <p>2. Kecamatan Babelan.</p> <p>d. KSK bidang kepentingan penggunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, berupa sumber alam minyak dan gas bumi meliputi kawasan :</p> <p>1. Tambun Selatan</p> <p>2. Babelan</p> <p>3. Cabangbungin</p> <p>4. Sukawangi</p> <p>5. Karang Bahagia</p> <p>6. Cikarang Timur</p> <p>7. Pebayuran</p> <p>8. Muaragembong</p> <p>9. Tarumajaya</p> <p>10. Cibarusah.</p> <p>(5) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p><u>Degradasi Ekosistem Mangrove</u></p> <p>Adanya inkonsistensi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung di Kec. Muaragembong, sehingga perlu penataan kembali sesuai PerPres no. 54 tahun 2008</p> <p><u>Sedimentasi</u></p> <p>- Tidak ada pasal yang membahas secara khusus sedimentasi walaupun secara geografi merupakan tanah timbul</p> <p>- Akan dibahas tersendiri pada tingkat Provinsi</p> <p><u>Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri</u></p> <p>- Untuk Limbah domestik tidak ada informasi secara khusus dimana dan bagaimana pengelolaan dan pengolahannya, sedangkan pengelolaan limbah industri informasinya sudah lebih jelas</p> <p>- Akan dimasukkan penambahan pasal mengenai pengelolaan limbah domestik</p> <p><u>Pemanfaatan Ruang Laut</u></p> <p>Tidak ada pemanfaatan ruang laut (reklamasi).</p> <p><u>Strategi Pembangunan Kawasan</u></p> <p><u>Area yang berimpit dengan badan Air</u></p> <p>- Area yang berimpit sepanjang badan (sungai, danau, pantai) harus</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 8 ayat (4)</p> <p>Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>b. mengoptimalkan pendaya-gunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air untuk meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; suplay air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan.</p> <p>f. mengoptimalkan pendaya-gunaan pengelolaan dan <u>pengembangan sumberdaya air untuk meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; suplay air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan.</u></p> <p>Pasal 8 ayat (5)</p> <p>Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :</p> <p>a. meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan air minum sistem perpipaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di kawasan perkotaan.</p> <p>b. mengembangkan system pengelolaan persampahan dengan teknik dan</p>	<p>dinyatakan sebagai area utama bernilai tambah tinggi baik bagi kepentingan publik maupun ekonomi, khususnya bagi area yang belum terlanjur menjadi pemukiman padat horisontal. Sehingga pembangunan harus berorientasi pada badan air (waterfront) bukan justru membelakanginya. Ketidadaan regulasi tata ruang yang mengatur orientasi ini akan mengakibatkan badan air akan dibelakangi sehingga menjadi kumuh, tidak sesuai untuk fungsi publik dan tidak diminati untuk investasi , menimbulkan problem sosial dan pencemaran air yang sulit dikontrol.</p> <p>- Bagi area sepanjang badan air yang sudah terlanjur padat horisontal perlu diperkenalkan program peremajaan lingkungan antara lain dengan memperkalkan jalan inspeksi / jalan publik di sepanjang area berimpit badan air di luar sempadan serta instrumen konsolidasi tanah untuk peremajaan kawasan</p> <p>- Perlu juga dikenali terminologi area dapat dikontrol dan area yang relatif sulit dikontrol (terkait dengan potensi pengelolaan limbah cair dan padat) dalam kebijakan pola ruang. Area yang berimpit sepanjang badan air (sungai ,</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>metoda yang berwawasan lingkungan;</p> <p>c. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pengelolaan berbasis masyarakat melalui integrasi 3R dengan prinsip berkelanjutan, mandiri dan tuntas ditempatkan secara mandiri dan berkesinambungan;</p> <p>d. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan sampah;</p> <p>e. mengembangkan prasarana drainase;</p> <p>f. meningkatkan upaya mitigasi dalam mengantisipasi potensi bencana di Kabupaten.</p> <p>Pasal 8 ayat (6)</p> <p>Strategi peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :</p> <p>a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan dan merehabilitasi secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;</p> <p>Pasal 8 ayat (7)</p> <p>Strategi optimalisasi pendayagunaan kawasan budidaya secara sinergi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi :</p>	<p>dana, pantai) seyogyanya ditempati area yang tergolong mudah dikontrol. Sebagai contoh kawasan pemukiman padat sederhana horizontal tergolong kawasan yang sulit dikontrol sehingga harus dicegah pertumbuhannya sepanjang area yang berimpit dengan badan air.</p> <p><u>Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas sarana transportasi publik</u></p> <p>Perlu diperkenalkan Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas sarana transportasi publik massal yang terpadu dan terkoneksi baik dengan pengembangan kawasan pemukiman. Wilayah perkotaan harus diarahkan lebih berbasis transportasi publik daripada kendaraan pribadi</p> <p><u>Perlindungan kawasan konservasi dan kebijakan umum keseimbangan tata ruang</u></p> <p>Setiap upaya revitalisasi kawasan pantura Bekasi yang ada harus berupaya memperbaiki keseimbangan zona sehingga dapat mengurangi koneksi frontal antara kawasan konservasi langsung dengan kawasan hunian padat, kawasan hunian mewah langsung dengan kawasan hunian padat sederhana. Gradasi zona dan penerapan zona buffer patut dipertimbangkan.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. mempertahankan kawasan pertanian lahan basah dan/atau beririgasi teknis;</p> <p>c. mengendalkan alih fungsi lahan basah sawah menjadi kegiatan budi daya lainnya;</p> <p>d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan hunian vertical bersubsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah di kawasan perkotaan untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh perkotaan;</p> <p>Pasal 12 ayat (6)</p> <p>Rencana pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b berupa pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;</p> <p>Pasal 17 ayat (3)</p> <p>Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c meliputi :</p> <p>a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA), meliputi IPA Babelan, IPA Tegal Gede, IPA Sukatani, IPA Cabangbungin, IPA Cibarusah, IPA Cikarang Baru, IPA Cikarang Lippo, Deep Well Setu, Deep Well Lemahabang, IPA Tanah Baru, IPA Tambun Selatan, IPA Tambun Utara dan IPA Tambelang;</p> <p>b. peningkatan jangkauan distribusi</p>	<p><u>Penilaian Pengembangan industri perikanan terpadu dengan program pemberdayaan ekonomi nelayan</u></p> <p>- Perlu dijajagi potensi pengembangan area industri perikanan strategis di beberapa kawasan perikanan yang ada. Arah pengembangan pendaratan ikan menjadi area terpadu dengan industri pengolahan ikan yang tertata secara modern.</p> <p>- Upaya pengentasan kemiskinan khususnya kaum nelayan harus harus dimaknai dan di selesaikan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi nelayan dan sektor industri perikanan secara terpadu dan progresif. Perlu dijajagi kerjasama dengan DKI sebagai sentra pasar utama.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pelayanan jaringan air minum dengan sistem perpipaan hingga enam puluh persen; dan</p> <p>c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17 Ayat (4)</p> <p>Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. normalisasi sungai; b. pembangunan banjir kanal; c. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul); d. pembangunan dan pengembangan pintu air; e. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman; f. penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; g. penanaman pohon di sempadan sungai, situ, rawa dan lahan-lahan kritis. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Rencana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana pengelolaan persampahan; b. prasarana pengelolaan limbah; c. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi; dan d. prasarana jaringan drainase. <p>(2) Rencana prasarana pengelolaan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng Kecamatan Setu; b. peningkatan dan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan pengelolaannya secara merata di setiap Kecamatan; c. penerapan 3R (Recycle, Reuse, Reduce) dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah (domestic, niaga, industry dan lain-lain); dan d. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah tersendiri. <p>(3) Rencana prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan industri; b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan; c. pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri B-3 dengan alternatif di Desa Bojongmangu Kecamatan Bojongmangu. <p>(4) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalur evakuasi dari ancaman bencana menuju ruang evakuasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur evakuasi bencana alam 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>gelombang pasang/abrasi di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana gelombang pasang/abrasi;</p> <p>b. jalur evakuasi bencana alam banjir menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi bencana meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Muaragembong 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan babelan; 4. Kecamatan Cabangbungin; 5. Kecamatan Sukakarya; 6. Kecamatan Sukawang; 7. Kecamatan Cikarang Utara; 8. Kecamatan Cikarang Timur; 9. Kecamatan Pebayuran; 10. Kecamatan Kedungwaringin. <p>Pasal 20 ayat (1)</p> <p>Rencana pengembangan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 5.449 Ha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan kawasan hutan lindung; b. mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan; c. merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan hutan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>lindung; dan</p> <p>d. mengembangkan ekowisata dan agroforestri.</p> <p>Pasal 22 ayat (3)</p> <p>Penetapan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 566 Ha tersebar di :</p> <p>a. Kecamatan Babelan;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Muaragembong.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c, terdapat di kawasan mangrove Kecamatan Muaragembong dengan luas kurang lebih 5.311 Ha atau sekitar kurang lebih 4 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten.</p> <p>Pasal 24</p> <p>Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <p>a. kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. kawasan rawan bencana banjir, yang terjadi di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tambun Utara; 2. Kecamatan Tambun Selatan; 3. Kecamatan Tarumajaya; 4. Kecamatan Cibitung; 5. Kecamatan Cikarang Timur; 6. Kecamatan Cikarang Utara; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>7. Kecamatan Cabangbungin; 8. Kecamatan Kedungwaringin; 9. Kecamatan Pebayuran; 10. Kecamatan Sukakarya; 11. Kecamatan Sukatani; 12. Kecamatan Sukawangi; 13. Kecamatan Tambelan; 14. Kecamatan babelan.</p> <p>Pasal 25</p> <p>Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi :</p> <p>a. Kawasan rawan bencana alam geologi abrasi di Kecamatan Muaragembong. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) dan (3)</p> <p>(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <p>a. Kecamatan tarumajaya; b. Kecamatan Babelan; dan c. Kecamatan Muaragembong.</p> <p>(3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Muaragembong; b. Kecamatan Tarumajaya; c. Kecamatan Cikarang Pusat; d. Kecamatan Bojongmangu; e. Kecamatan Setu; f. Kecamatan Serang Baru; g. Kecamatan Cikarang Selatan;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>h. Kecamatan Sukakarya; i. Kecamatan Tambun Selatan.</p> <p>Pasal 31 ayat (2) Kawasan peruntukan pertambangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertambangan minyak dan gas bumi meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Babelan; b. Kecamatan Cibitung; c. Kecamatan Tambun Utara; d. Kecamatan Tambun Selatan; e. Kecamatan Cikarang Timur; f. Kecamatan Cibarusah; g. Kecamatan Cabangbungin; h. Kecamatan Sukawangi; i. Kecamatan Sukakarya; j. Kecamatan Cikarang Utara; k. Kecamatan Karang Bahagia.</p> <p>Pasal 32 ayat (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Cikarang Pusat; b. Kecamatan Cikarang Utara; c. Kecamatan Cikarang Selatan; d. Kecamatan Cikarang Timur; e. Kecamatan Cikarang Barat; f. Kecamatan Tarumajaya; g. Kecamatan Cabangbungin; h. Kecamatan Babelan; i. Kecamatan Sukawangi.</p> <p>Pasal 34 ayat (1) dan (2) (1) Kawasan permukiman sebagaimana</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dimaksud dalam pasal 27 huruf g meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 13.918 Ha; b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 42.815 Ha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cibitung; 2. Kecamatan Karang Bahagia; 3. Kecamatan Tambun Utara; 4. Kecamatan Sukatani; 5. Kecamatan Sukawang; 6. Kecamatan Cikarang Timur; 7. Kecamatan Cikarang Pusat; 8. Kecamatan tambun Selatan; 9. Kecamatan Serang Baru; 10. Kecamatan Setu; 11. Kecamatan Cikarang Selatan; 12. Kecamatan Cikarang Barat. c. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 4.060 Ha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Babelan; 2. Kecamatan Muaragembong; 3. Kecamatan Cabangbungin; 4. Kecamatan Cibarusah; 5. Kecamatan Bojongmangu 6. Kecamatan Serang Baru. <p>(2) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan hunian vertikal berupa rusunami dan rusunawa 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>diperkotaan dan kawasan industri;</p> <p>b. pengembangan permukiman mandiri; dan</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.</p> <p>(3) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk :</p> <p>a. Pengembangan hunian horizontal; dan</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Babelan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan peruntukan pesisir dan laut meliputi:</p> <p>a. Pengembangan permukiman nelayan;</p> <p>b. Bisnis kelautan.</p> <p>(3) Pengembangan kawasan permukiman nelayan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Tarumajaya.</p> <p>(4) Pengembangan kawasan bisnis kelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diarahkan untuk:</p> <p>a. Pengembangan kawasan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pelabuhan perikanan di Muara Bendera Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. Pengembangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan.</p> <p>c. Pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>d. Pengembangan kawasan pertambangan migas di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>e. Pembangunan terminal khusus Marunda Centre di Kecamatan Tarumajaya; dan</p> <p>f. Pengembangan prasarana pendukung industri pengolahan pertambangan.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf a.7</p> <p>Pembangunan prasarana transportasi laut meliputi:</p> <p>a) pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;</p> <p>b) pembangunan pelabuhan nelayan dan perumahan nelayan dengan sarana pendukungnya di Muara Bendera, Kecamatan Muaragembong;</p> <p>c) pembangunan kawasan pariwisata di pantai Sederhana- Pantai bahagia;</p> <p>d) pembangunan pusat pendidikan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>terapan dalam rangka menunjang perkembangan wilayah Pantai Utara seluas 20 Ha.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf a.8 Pembangunan Bandar udara di Kecamatan Muaragenhong.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf c Pembangunan prasarana sumberdaya air meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan pelayanan jaringan air bersih; 2. penyediaan air baku dengan peningkatan pengelolaan situ; 3. pembangunan prasarana pengendalian banjir. <p>Pasal 41 ayat (1) huruf e.4 Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP).</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf e.5 Pengembangan pengolahan air limbah yang memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan system yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri secara terpusat terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri.</p> <p>Pasal 49 Ketentuan umum peraturan zonasi pada</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>system jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) e, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas Negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Negara/provinsi yang berbatasan. <p>Pasal 52</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. Penyediaan sumur resapan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</p> <p>c. Penerapan zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinya;</p> <p>d. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;</p> <p>e. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;</p> <p>f. Mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;</p> <p>g. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam;</p> <p>h. Pengolahan lahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.</p> <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dan berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;</p> <p>b. Melarang kegiatan budi daya yang</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai;</p> <p>c. Mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;</p> <p>d. Pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti;</p> <p>Permukiman perkotaan dan pedesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;</p> <p>e. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;</p> <p>f. Bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower penjaga keselamatan pengujung pantai;</p> <p>g. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan filtrasi air laut kedalam tanah;</p> <p>h. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;</p> <p>i. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek wisata dan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>penelitian;</p> <p>j. Pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;</p> <p>k. Inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove;</p> <p>l. Penunjukan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;</p> <p>m. Rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;</p> <p>n. Perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;</p> <p>o. Pengembangan kawasan penati berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>p. Koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 %.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Pemempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;</p> <p>b. Pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;</p> <p>c. Pengendalian terhadap kegiatan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;</p> <p>d. Melarang pembuangan limbah industri ke sungai;</p> <p>e. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p> <p>f. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>g. Perlindungan sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;</p> <p>h. pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;</p> <p>i. Waduk yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;</p> <p>j. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;</p> <p>k. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;</p> <p>l. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;</p> <p>m. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(7) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan; pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik; Ketentuan pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundangan; Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi. <p>(9) Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; Melesterikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai; Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan pedesaan, 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;</p> <p>d. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;</p> <p>e. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</p> <p>f. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemertaaan ancaman bencana dan kepentingan umum;</p> <p>g. Penetapan batas dataran banjir;</p> <p>h. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;</p> <p>i. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.</p> <p>(10) Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan;</p> <p>a. Pendekatan rekayasa struktur dengan cara system polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan;</p> <p>b. Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>mangrove di daerah pesisir.</p> <p>Pasal 53</p> <p>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah; b. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan energi; c. Pembatasan kawasan budidaya tambak dengan atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan system tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan selain kegiatan konservasi, pendidikan, dan pelatihan; e. Ketentuan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di kawasan pesisir, serta penurunan luasan kawasan kumuh; f. Ketentuan penyediaan infrastruktur pendukung bagi bisnis kelautan dan wisata bahari; g. Ketentuan pengaturan dan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>penataan kawasan bisnis kelautan dan wisata bahari.</p>	

BAB V REKOMENDASI

5.1 Rekomendasi Alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program

REKOMENDASI HASIL KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP KABUPATEN TANGERANG

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemantauan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kawasan Strategis Nasional, meliputi: Perpres 54 tahun 2008 Kabupaten Tangerang termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>(2) Kawasan Strategis Provinsi Banten, meliputi: Kawasan Strategis Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Tangerang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan penyangga Bandara untuk kepentingan daya dukung lingkungan. 2. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) Balaraja untuk kepentingan ekonomi. 3. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) Teluknaga untuk kepentingan ekonomi. 4. PLTU Lontar untuk kepentingan teknologi tinggi. 	<p>Raperda RTRW Kabupaten Tangerang 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>Beberapa lokasi di Pantura masuk dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. Belum ada pengaturan lebih lanjut.</p> <p>A. Land Subsidence Dalam RTRW perlu ada pengendalian pemanfaatan air bawah tanah.</p> <p>B. Rob dan Kenaikan Muka Air Laut Perlu ada ketentuan mengenai strategi penanggulangan rob/kenaikan muka air laut.</p> <p>C. Banjir/Genangan • Pasal 27 ayat (1) huruf b ditambahkan pembangunan tandon air di 8 Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah genangan direncanakan sebagai daerah tampungan air <p>D. Abrasi dan Kerusakan Pantai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan strategi tentang penanggulangan abrasi

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(3) Kawasan strategis di kabupaten, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) <ol style="list-style-type: none"> Klasifikasi Kawasan Strategis : Kepentingan lingkungan hidup Lokasi : Kecamatan Balaraja dan Teluknaga Kegiatan Utama : Perdagangan dan jasa, industri, Perumahan, dan pergudangan Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) <ol style="list-style-type: none"> Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan Lokasi : Kecamatan Tigaraksa dan Kronjo Kegiatan Utama : <ul style="list-style-type: none"> - PKL Tigaraksa : Pusat pemerintahan kabupaten, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa - PKL Kronjo : Pemerintahan kecamatan, permukiman, pertanian dan perikanan. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) <ol style="list-style-type: none"> Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan Lokasi : Kecamatan Mauk, Kosambi, Sepatan, Cikupa, Pasarkemis, 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan strategi tentang penanggulangan kerusakan pantai akibat penambangan pasir • Perlu ditambahkan strategi tentang pengendalian penambangan pasir • Perlu diawali dengan penentuan garis pantai • Perlu ditambahkan ketentuan tentang kawasan yang berfungsi untuk pengendalian banjir, dan pengendalian rob, tidak dialih fungsikan <ol style="list-style-type: none"> Degradasi Ekosistem Mangrove <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ditambahkan Kecamatan Mekar Baru • Perlu ditambahkan ketentuan tentang penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan arahan mengenai water front city • Pasal 24 ayat (6) ditambahkan Kecamatan Mekar Baru Sedimentasi <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan strategi normalisasi muara sungai sebagai upaya penanggulangan sedimentasi. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan strategi penanggulangan/penanganan sampah di perairan secara terintegrasi.

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kelapadua dan Curug.</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pemerintahan kecamatan, perkantoran, permukiman, industri, pertanian perdagangan dan jasa.</p> <p>4. Kawasan Strategis Dryport</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi danlingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Jambe</p> <p>c. Kegiatan Utama : Transportasi dan Pergudangan</p> <p>5. Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi</p> <p>b. Lokasi : Perluasan Bandara Soekarno Hatta</p> <p>c. Kegiatan Utama : Transportasi Udara dan Pergudangan</p> <p>6. Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Kosambi</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pergudangan, industri, perdagangan dan jasa</p> <p>7. Kawasan Strategis PLTU Lontar</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu kebijakan pengawasan yang mengatur pencemaran perairan termasuk perilaku pencemarnya <p>1. Penanganan Sampah (Perairan)</p> <p>Perlu ditambahkan strategi penanggulangan/penanganan sampah di perairan secara terintegrasi.</p> <p>J. Pemanfaatan Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 ayat (2) perlu ditambahkan dengan strategi untuk penanggulangan penurunan permukaan tanah, rob dan kenaikan muka air laut, banjir dan genangan, abrasi, erosi, sedimentasi, intrusi air laut, pengendalian pencemaran, kerawanan air bersih, pencemaran air, kerusakan pantai • Perlu ditambahkan Kecamatan Kemiri, perlu konfirmasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan mengenai Kecamatan Mauk • Pasal 38 ayat (3) a ditambahkan Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi (perlu konfirmasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan) <p>K. Kemungkinan Alih Fungsi Lahan di Daratan Pasca Reklamasi</p> <p>Perlu kebijakan pengawasan terhadap kemungkinan alih fungsi lahan mengingat pasca reklamasi, tanah daratan di sekitar Pantura diprediksi akan naik nilai jualnya sedangkan peruntukan lahan di daerah</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Desa Lontar Kecamatan Kemiri</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pembangkit Listrik untuk Provinsi Banten dan DKI</p> <p>5. Kawasan Strategis Rencana Reklamasi Pantai</p> <p>a. Klasifikasi kawasan strategis : Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan wilayah pantai.</p> <p>b. Lokasi : Kawasan reklamasi seluas ± 9.000 ha berjarak 200 meter dari garis pantai</p> <p>Kabupaten Tangerang</p> <p>c. Kegiatan Utama : Perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.</p> <p>(4) Beberapa program yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis meliputi :</p> <p>a. Program penataan ruang</p> <p>b. Program pembangunan prasarana dasar dan transportasi</p> <p>c. Program pembangunan sarana pelayanan sosial ekonomi</p> <p>d. Program pengembangan usaha</p> <p>(5) Program pengembangan investasi</p> <p>(6) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X</p>	<p>tersebut pada umumnya untuk pertanian/RTH.</p> <p>L. Sosial Ekonomi Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kebijakan perlindungan situs budaya mengingat di kawasan Pantura banyak situs budaya seperti Makam Panjang di Kampung Bahari, tempat ziarah orang Tionghoa di Tanjung Kait serta potensi wisata lainnya seperti di Pantai Tanjung Kait • Perlu kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada pembinaan sistem ekonomi nelayan khususnya dalam pengembangan kawasan minapolitan, sehingga potensi PAD Kab. Tangerang dari sektor nelayan dapat ditingkatkan • Perlu ada kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk mencegah disintegrasi sosial dan ekonomi sehingga dengan adanya kegiatan reklamasi maka kegiatan nelayan yang ada di sekitar areal reklamasi tidak terganggu mata pencahariannya • Perlu ada kebijakan perlindungan DAS (Daerah Aliran Sungai) mengingat sungai-sungai di Kab. Tangerang mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat • Pembangunan PLTU perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar areal proyek pengembangan PLTU agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat nelayan, serta pencemaran

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Kebijakan dan Strategi</p> <p>Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah, dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan ruang kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan b. Meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri. 2. Pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fungsi kegiatan sekitarnya di seluruh wilayah kabupaten dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian; b. Mewujudkan pusat-pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan kabupaten; c. Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya d. Meningkatkan intensitas pembangunan perumahan dan permukiman di tiap kecamatan melalui 	<p>terhadap areal pertanian</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan</p> <p>e. Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten Tangerang;</p> <p>f. Menata dan mengembangkan kawasan wisata; dan</p> <p>g. Membuat rencana rinci kawasan permukiman.</p> <p>3. Pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura dilakukan dengan strategi:</p> <p>a. Melaksanakan reklamasi sepanjang pantai utara kabupaten yang berjarak kurang lebih 200 meter dari garis pantai.</p> <p>b. Menyiapkan regulasi operasional pelaksanaan reklamasi.</p> <p>c. Mengendalikan dampak penyelenggaraan reklamasi dan</p> <p>d. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan wilayah daratan kabupaten</p> <p>4. Pengembangan pertanian berkelanjutan di bagian utara wilayah dilakukan dengan strategi:</p> <p>a. Menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten.</p> <p>b. Menetapkan kawasan Minapolitan di</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>kecamatan Kronjo dan kawasan Agropolitan di Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur dan</p> <p>c. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, meliputi sungai lintas propinsi dalam wilayah kabupaten, wilayah sungai kabupaten, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih, dan sistem pengendalian banjir.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air, meliputi:</p> <p>a. Sungai lintas provinsi terdiri dari Cisdane, Cidurian, dan Cimanceuri;</p> <p>b. Sungai lintas kabupaten/kota terdiri dari Cirarab, Kali Sabi, dan sungai kecil lainnya;</p> <p>(2) Sistem jaringan irigasi terdiri dari irigasi Cisdane dan Cidurian;</p> <p>Pengelolaan sumber daya air dan jaringan pengairan di Kabupaten Tangerang dikembangkan untuk:</p> <p>a. Pemeliharaan kawasan hulu sungai melalui kegiatan pelestarian kawasan, pengamanan kawasan penyangga, pengamanan sumber air dan pencegahan banjir;</p> <p>b. Pengelolaan irigasi strategis yakni prasarana irigasi yang terdapat pada sentra-sentra produksi pangan;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. Peningkatan koordinasi antar provinsi untuk sinkronisasi program sektoral maupun program bersama;</p> <p>d. Pengembangan struktur ruang dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas jaringan prasarana serta dengan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air dan penetapan sumberdaya air wilayah sungai;</p> <p>(3) Pemanfaatan sumber air diarahkan pada air permukaan dengan intake di sungai terdekat yang potensial;</p> <p>(4) Pada kawasan permukiman pusat kegiatan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai atau air permukaan;</p> <p>(5) Pada kawasan permukiman perdesaan dikembangkan sistem air bersih perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang ada meliputi mata air, air tanah dan air sungai dengan sistem jaringan air sederhana.</p> <p>(6) Rencana pengembangan sistem air bersih, meliputi:</p> <p>a. Zona Cibaja Utara melayani Kecamatan Cikupa, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Panongan dan Jambé;</p> <p>b. Zona Cibaja Selatan melayani Kecamatan Cisoka, Tigaraksa, Panongan dan Jambé;</p> <p>c. Zona Cipacul melayani Kecamatan Cisaug, Pagedangan, Curug dan Legok;</p> <p>d. Zona Sepatan Plus melayani Kecamatan Sepatan, Pasar Kemis dan Rajeg;</p> <p>e. Zona Pakumas melayani Kecamatan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pakuhaji, Mauk, dan Sukadiri;</p> <p>f. Zona Bojonggeded melayani Kecamatan Teluknaga, Kosambi; dan Zona IKK / Kejori melayani Kecamatan Kresek, Kronjo, dan Kemiri.</p> <p>Pasal 25 Ayat (1)</p> <p>Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, rencana pengelolaan sampah Kabupaten Tangerang sampai tahun 2030 meliputi :</p> <p>a. Menyiapkan akses dari kawasan sumber penghasil sampah menuju lokasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang ada di setiap kawasan dengan kondisi sampah sudah terpilah antara sampah organik dan non organik.</p> <p>b. Penentuan daerah pelayanan setiap jenis alat angkutan sehingga tercipta suatu sistem pengumpulan sampah yang terhirarki dengan baik.</p> <p>c. Menyiapkan suatu pengelolaan dan pengumpulan yang terhirarki dengan baik.</p> <p>d. Pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah dengan menyiapkan armada angkut dari gerobak sampai truk.</p> <p>e. Penyediaan dan pengelolaan TPS dengan menyiapkan suatu TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah perkotaan yang akan meningkat seiring dengan peningkatan perkembangan fisik dan kegiatan perkotaan.</p> <p>f. Peningkatan kapasitas TPST Jatiwaringin di kecamatan Mauk;</p> <p>Pembangunan TPS secara parsial yang</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>tersebar pada setiap kecamatan;</p> <p>h. Mewajibkan setiap pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus, umum, sosial lainnya menyediakan fasilitas penyediaan fasilitas pemilahan sampah;</p> <p>i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan</p> <p>j. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.</p> <p>k. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.</p> <p>Pasal 25 Ayat (2)</p> <p>Rencana sistem persampahan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 26 Ayat (1)</p> <p>Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Tangerang secara lebih detail meliputi :</p> <p>a. Sosialisasi serta pemahaman atas pentingnya sarana sanitasi kepada masyarakat, sehingga ketergantungan akan sarana sanitasi bisa meningkat dan pencemaran limbah padat maupun cair yang berasal dari domestik dapat dikurangi.</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas pelayanan IPLT Lebak wangi di Kecamatan Sepatan Timur.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. Mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik dan menggunakan sistem individu, berupa instalasi pembuangan tinja yang sehat atau tangki septik. Sedangkan untuk daerah yang padat perlu dikembangkan sistem komunal, namun sistem ini perlu didesain agar dapat disambungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk sistem terpusat di masa yang akan datang.</p> <p>d. Optimalisasi kemampuan instalasi pengolahan limbah yang sudah ada serta pengadaan dan pengelolaan truk tinja untuk meningkatkan pelayanan penanganan air limbah.</p> <p>e. Membangun instalasi pengolahan limbah tinja yang baru terutama di daerah padat penduduk di wilayah barat dan timur Kabupaten Tangerang. Karena pada umumnya prasarana yang dipergunakan di wilayah perencanaan adalah tangki septik dan cubluk, maka fasilitas pengolahan lumpur tinja dan sarana pembuangan sangat dibutuhkan yaitu dengan pengadaan dan pengelolaan IPLT. Untuk itu direncanakan dibangun IPLT di Kecamatan Cisauk Desa Suradita.</p> <p>f. Mewajibkan para developer untuk menyediakan / membangun fasilitas pengolahan limbah domestik secara komunal di kawasan perumahan yang akan dibangun.</p> <p>g. Untuk penanganan limbah non domestik yang berasal dari industri diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dibuang ke badan air penerima. Teknik pengolahan tergantung jenis industri. Untuk itu perlu dibangun instalasi pengolahan industri secara bersama-sama antar beberapa industri . Untuk industri yang berdekatan dengan industri yang sama dapat membangun IPAL bersama sehingga dapat mereduksi biaya yang dikeluarkan. Instalasi pengolahan limbah diprioritaskan pada daerah yang diperuntukan sebagai kegiatan industri.</p> <p>h. Menyapkan suatu mekanisme pengawasan terhadap pembuangan limbah industri untuk memastikan agar limbah yang dibuang ke saluran akhir telah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Terutama penataan sistem pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk meminimalkan pencemaran udara, tanah dan sumber daya air serta meningkatkan kualitas lingkungan, dimana pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah serta dilakukan melalui kerjasama antar daerah, peran serta masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>i. Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah non domestik.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7 Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Sistem pengembangan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan Banjir <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar/ mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase. 2. Normalisasi sungai-sungai yang melewati kota, berupa pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai. 3. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien, terkait ketersediaan dana dan perlunya pelatihan yang cukup terhadap petugas yang bertanggung jawab serta memasyarakatkan upaya-upaya pemeliharaan kepada masyarakat umum. 4. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir. 5. Tingkat pelayanan, terkait dengan ketersediaan dana sehingga diperlukan upaya-upaya menanggulangi dana yang terbatas melalui upaya identifikasi terhadap sumber-sumber dana yang mungkin dan melakukan <i>cost recovery</i> semaksimal mungkin. 6. Memudahkan operasi dan pemeliharaan serta pendataan setiap sungai 7. Penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan menentukan otorisasi suatu instansi dalam pengelolaannya serta penetapan garis 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sempadan pantai, sungai, situ/danau :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pantai yaitu 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat; Situ/danau yaitu 50 m dari batas muka air tertinggi; Sungai besar yaitu 100 m dari tepi sungai/pasang tertinggi; Sungai kecil yaitu 50 m dari tepi sungai/pasang tertinggi; Sungai Non pasang surut 3 - 100 m dari tepi sungai/pasang tertinggi. Pengendalian sungai agar tidak menjadi tempat buangan sampah oleh masyarakat sebab dapat mengakibatkan pendangkalan pada sungai tersebut. Hubungan dengan sektor-sektor lain dimana masalah pengendalian banjir harus terintegrasi penuh dengan sektor infrastruktur lainnya sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang tegas dan lugas. Pengembangan yang lain adalah peningkatan dan perbaikan kapasitas saluran drainase yang telah ada diwilayah Kabupaten Tangerang. Pembangunan Tandon Air <p>Pembangunan tandon air direncanakan di wilayah Kecamatan Sukadiri 1 buah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> kawasan hutan lindung; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. kawasan perlindungan setempat; dan</p> <p>c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jabar Banten-KPH Bogor seluas 1.591,98 ha tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kosambi.</p> <p>(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan Pantai; b. sempadan sungai; c. kawasan danau atau waduk; dan d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya. <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a Kawasan ini terdapat di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang meliputi di Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Kosambi, Mauk, Kemiri dan Sukadiri, yang keseluruhannya mencakup areal seluas <u>±</u>510,00 Ha.</p> <p>(1) Pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai; b. pengendalian kegiatan disekitar sempadan pantai; dan pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan. 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi :</p> <p>a. Sungai besar adalah Cisadane dan Cidurian</p> <p>b. Sungai sedang adalah Cimanceuri, Cirarab, Cidadap, Cisabi, Tahang, Cipayauen, Cilaku, Cipasilian, Cilontar, Cilleles, Cilarangan, Pecah, dan Kali Cigung;</p> <p>b. Sungai kecil adalah anak-anak sungai baik sungai besar dan sungai sedang sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas.</p> <p>(2) Sempadan Sungai sesuai dengan lebar dan kedalaman sungai, sebagai berikut :</p> <p>a. Sungai besar paling kurang 30 meter;</p> <p>b. Sungai sedang paling kurang 10 meter; dan</p> <p>c. Sungai kecil paling kurang 5 meter.</p> <p>(3) Pengelolaan Sempadan Sungai ditujukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;</p> <p>(4) Pengelolaan sempadan sungai diarahkan melalui:</p> <p>a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;</p> <p>b. pengendalian kegiatan yang telah ada di sempadan sungai;</p> <p>c. pengamanan daerah aliran sungai; dan</p> <p>d. pembatasan daerah terbangun yang dapat merusak fungsi lindung daerah aliran</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sungai.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c adalah</p> <p>(1) Kawasan sempadan danau atau waduk yang berada di Kecamatan Pasar Kemis, Sepatan, Sepatan Timur, Kronjo, Kresak, Kelapa Dua, Pagedangan, Pakuhaji, Sindang Jaya, Balaraja dan Mauk. Kawasan ini meliputi areal seluas sekitar 880,07 Ha yang telah termasuk luas danau atau waduk didalamnya.</p> <p>(2) Tujuan pengelolaan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi utama danau atau waduk tersebut; dan</p> <p>(3) Pengelolaan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman tumbuhan sempadan danau atau waduk; b. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sempadan danau atau waduk; dan c. Penataan ruang sempadan danau atau waduk. <p style="text-align: center;">Pasal 40 Ayat (8)</p> <p>(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Sindang Jaya bagian barat dan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>utara, Sepatan, Sepatan timur, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, Sukamulya, Gunungkaler, Kresek, Mauk, Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri dengan luas lahan lebih kurang 29.295,00 ha;</p> <p>b. Kawasan peternakan meliputi Kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka, Mauk, dan Gunungkaler dengan luas lahan lebih kurang 200 ha.</p> <p>Pasal 38 Ayat (3)</p> <p>Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang diperuntukan bagi budidaya :</p> <p>a. Perikanan tambak di Kecamatan Kronjo, Mekarbaru, dan Mauk dengan luas lahan lebih kurang 2.789 ha;</p> <p>Pasal 38 Ayat (4)</p> <p>Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Industri besar Pasar Kemis, Cikupa, Jambe, dan Balaraja dengan luas ± 10.000 ha;</p> <p>b. Industri sedang di Kecamatan Curug, Kosambi, Jayanti, Tigaraksa, Sepatan, Legok, dan Panongan dengan luas ± 3.586 ha; dan</p> <p>c. Industri rumah tangga tersebar di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Curug dan Cisoeka.</p> <p>d. Kawasan perdagangan dan industri terbatas berada di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan, dan Jambe. Pelabuhan kering (<i>Dry Port</i>) disediakan di Kecamatan Jambe.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 38 Ayat (5) huruf c</p> <p>Pengembangan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai termasuk penyediaan prasarana pengelolaan limbah;</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf d</p> <p>Pengembangan industri harus diharmonisakan sejalan dengan struktur ruang wilayah Kabupaten Tangerang yang direncanakan sehingga antara pembangunan industri dengan perwujudan struktur ruang terjadi sinkronisasi;</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf f dan g</p> <p>f. Memanfaatkan seminimal mungkin air baku (air tanah dangkal) untuk menekan proses intrusi air laut di kawasan pantai utara;</p> <p>g. Ditaatinya peraturan daerah mengenai baku mutu buangan limbah cair, padat, dan gas dengan jalan melengkapi instalasi pengolahan limbah yang memadai; dan</p> <p>Pasal 38 Ayat (7)</p> <p>Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :</p> <p>a. permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi dengan asumsi lebih dari 30 rumah/Ha dan kepadatan sedang dengan asumsi kepadatan rumah antara 20-30 rumah/Ha dengan luas lebih kurang 27.937 Ha, meliputi Kecamatan Pagedangan, Cisaug, Legok, Kelapadua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa, Panongan, Jambe, Cisoka, Sollear, Jayanti,</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Teluknaga, Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kosambi dan Sindanglaya;</p> <p>b. Permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah dengan asumsi kurang dari 20 rumah/Ha luas lebih kurang 18.960 Ha, meliputi Kecamatan Kronjo, Mekarbaru, Gunungkaler, Kresak, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, dan Sukadiri.</p> <p>Pasal 38 Ayat (9)</p> <p>Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kawasan hasil kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut wilayah Utara mulai dari Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo, serta berjarak lebih kurang 200 meter dari garis pantai kearah laut dengan luas lebih kurang 9.000 ha diperuntukan sebagai pengembangan kota pantai terpadu, meliputi :</p> <p>a. Kawasan permukiman perkotaan;</p> <p>b. Kawasan pelabuhan terpadu;</p> <p>c. Kawasan industri;</p> <p>d. Pariwisata dan</p> <p>e. Komerisial</p>	

**REKOMENDASI HASIL KLHS TELUK JAKARTA
DALAM KRP PROVINSI DKI JAKARTA**

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p style="text-align: center;">Kawasan Strategis Pantura</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Kawasan strategis Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.</p> <p>(2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan kepelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan pantura.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Penyelenggaraan reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.</p> <p>(2) Penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya</p>	<p>Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>A. Land Subsidence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian terhadap kondisi geologi di kawasan Pantura menunjukkan penurunan muka tanah rata-rata 3-5 cm/tahun atau 60 – 100 cm per 20 tahun. Oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan pengendalian hingga pelarangan penggunaan air tanah, sedangkan untuk penyediaan air bersih dilakukan melalui sistem perpipaan. <p>B. 'Rob' dan Kenaikan Muka Air Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu perbaikan tanggul yang ada untuk mengatasi masalah 'rob' khususnya di daerah rawan banjir 'rob' • Adanya penurunan muka tanah 5 – 10 cm pertahun di pesisir perlu diantisipasi oleh pengembang reklamasi untuk memanfaatkan tanggul reklamasi sekaligus sebagai antisipasi banjir 'rob' di daratan <p>C. Banjir/ Genangan (Sistem Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditangani dan diprioritaskan penanganan masalah genangan air yang terjadi dan banjir

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.</p> <p>(3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura harus menjamini:</p> <ol style="list-style-type: none"> terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut; pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum; kepentingan perikehidupan nelayan; kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah; kepentingan dan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanan negara; terselenggaranya pengembangan sistem prasarana sumber daya air secara terpadu; tidak memberikan tambahan resiko banjir di daerah hulunya baik akibat rob, kenaikan permukaan laut/sungai; dan terselenggara/berfungsinya objek/instalasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan pengoptimalan rumah pompa dan dalam pembuatan tanggul perlu diperhitungkan kenaikan muka laut + 5 mm/tahun akibat pengaruh iklim global • Penanganan banjir/genangan perlu terintegrasi dalam sistem makro Jakarta, dengan prinsip : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem tata air Jakarta 2030 (<i>upstream to downstream</i>) Air ditahan di dataran tinggi (Puncak), disimpan dalam situ/waduk di kawasan Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan. Dari Banjir Kanal ke arah Utara menggunakan sistem polder. 2. Peningkatan rasio badan air (<i>water body ratio</i>) hingga lebih dari 5%. 3. Rencana teknis pengendalian banjir : <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan kapasitas saluran makro b. Pembangunan Banjir Kanal Timur c. Pembangunan Cengkareng Drain d. Sudentan BKT-BKB e. Pengerukan dan pelebaran sungai f. Perbaikan pintu air g. Penambahan dan perbaikan sistem sub-makro h. Perbaikan sistem mikro i. Pengembangan sumur resapan j. Pembangunan bangunan penahan lumpur k. Pengembangan tampungan setempat (OSD : on-site stormwater detention)

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>vital di kawasan Pantura dengan memperhatikan aspek-aspek ekologis lingkungan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek sebagai berikut:</p> <p>a. peningkatan fungsi Pelabuhan; pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi;</p> <p>c. pengembangan areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk pusat wisata, pusat perdagangan/jasa, dan pelayanan rakyat secara terbatas;</p> <p>d. dilaksanakan serasi dengan penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu;</p> <p>e. pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan konservasi nilai budaya daerah dan bangsa serta kebutuhan wisata nasional dan internasional; dan</p> <p>f. didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dibagi menjadi beberapa sub-kawasan dengan memperhatikan kondisi kawasan daratan Pantura dan perairan di sekitarnya.</p> <p>(2) Sub-kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan perencanaan yang dikembangkan dengan</p>	<p>1. Pembangunan Lubang Resapan Biopori</p> <p>4. Upaya non teknis pengendalian banjir :</p> <p>a. Basis wilayah aliran sungai (hulu/penahan – tengah/storage – hilir/penampungan)</p> <p>b. Pembatasan penggunaan air tanah</p> <p>c. Pengembangan situ dan waduk</p> <p>d. Pengembangan dan pemanfaatan bantaran sungai</p> <p>e. Redevelopment kawasan perumahan</p> <p>f. Pengendalian pembuangan limbah dan sampah ke dalam sungai dan laut</p> <p>g. Penerbitan bangunan di atas aliran sungai</p> <p>h. Konservasi DAS</p> <p>D. Abrasi dan Kerusakan Pantai</p> <p>Perlu penanggulangan abrasi dan kerusakan pantai</p> <p>E. Degradasi Ekosistem Mangrove</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kebijakan yang jelas tentang peruntukkan dan rehabilitasi mangrove termasuk upaya pemeliharaan/perlindungan serta lokasinya dengan memperhatikan karakteristik habitat mangrove di Pantura Jakarta • Perlu kebijakan pertanahan mengingat banyaknya daerah hutan mangrove yang sudah tergerus (abrasi) mengakibatkan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sistem infrastruktur terpadu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Sistem prasarana sumber daya air di kawasan reklamasi Pantura merupakan bagian dari sistem prasarana sumber daya air makro dan jalur perpanjangan saluran dan sungai yang melalui kawasan daratan pantai.</p> <p>(2) Untuk mencegah banjir yang mungkin terjadi pengembangan kawasan Pantura harus mengembangkan sistem jaringan drainase dan sistem pengendalian banjir yang direncanakan secara teknis termasuk waduk penampungan air dengan rasio minimal per pulauanya sebesar 5%.</p> <p>(3) Waduk penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai ruang terbuka.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Penyediaan air bersih di kawasan Pantura dilakukan dengan cara-cara ramah lingkungan dan mengarah kepada <i>sustainable solution</i> dengan memanfaatkan alternatif sumber air baku baru dan dilengkapi dengan sistem jaringan perpipaan secara terpadu.</p> <p>(2) Pengelolaan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri dengan mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang ada dan/atau membangun sistem pengolahan teknologi yang baru.</p>	<p>kemunduran garis pantai, dimana daerah sekitarnya terdapat tanah milik masyarakat yang menimbulkan masalah pertahanan/ bukti kepemilikan</p> <p>F. Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih (Rencana Sistem dan Jaringan Air Bersih)</p> <p>Penyediaan air bersih DKI Jakarta sebagian besar didukung beberapa sumber air baku diluar Jakarta, yaitu Waduk Jatiluhur, terletak sekitar 60 km di sebelah Timur Jakarta, mata air Ciburial berlokasi sekitar 60 km di Selatan Jakarta, Sungai Cilwung, Sungai Cilandak, Sungai Krukut, Sungai Pesanggrahan, dan air curah dari IPA Cisadane milik PDAM Kabupaten Tangerang yang berlokasi sekitar 30 km di sebelah Tenggara Jakarta. Air dari Waduk Jatiluhur yang dikelola Otorita Jatiluhur disalurkan ke IPA Buaran melalui Kanal Tarum Barat, IPA Cisadane dimiliki oleh Pemda Kabupaten Tangerang, dan mata air Ciburial dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bogor.</p> <p>Penyediaan air bersih DKI Jakarta dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) bermitra dengan swasta, yaitu PT Lyonnaise Jaya (Palvia) untuk wilayah Barat dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) yang kini menjadi PT Aetra Air Jakarta untuk wilayah Timur, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) hingga tahun 2023, sedangkan penyediaan air bersih wilayah Kota Pantai Utara direncanakan dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Limbah cair rumah tangga dan/atau limbah cair yang bersumber dari kegiatan lain wajib memenuhi baku mutu limbah cair yang pengelolaannya dilakukan dengan cara modul dan/atau terpusat.</p> <p>(2) Limbah cair yang memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan ke saluran umum dan tidak berakibat pada penurunan kualitas air laut, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pentura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana teknik reklamasi; b. rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi; c. rencana rancang bangun; d. rencana penyediaan prasarana dan sarana; e. analisis dampak lingkungan; f. rencana kelola lingkungan; g. rencana pemantauan lingkungan; h. rencana lokasi pengambilan bahan material; i. rencana pembiayaan; dan j. rencana pengelolaan air bersih dan air limbah serta pengendalian banjir. <p>(2) Pengembangan dan perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Peningkatkan pelayanan air bersih direncanakan seluruhnya dengan sistem perpipaan kota secara bertahap untuk membatasi penggunaan air tanah dalam guna menghindari amblesan tanah dan intrusi air laut. Penyediaan air bersih perpipaan direncanakan meningkat menjadi 80% pada tahun 2015 dan 100% pada akhir tahun rencana.</p> <p>Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka perlu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan pengembangan sistem dan jaringan air bersih meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sumber air permukaan sebagai air baku air bersih untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta dengan tingkat konsumsi sebesar 150 liter/orang/hari b. Pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan air bersih c. Akses pelayanan air bersih dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas produksi air bersih dari sumber air eksisting untuk memenuhi kebutuhan air pada masa mendatang; • Optimalisasi pengoperasian jaringan distribusi baru pada instalasi pengolahan air yang ada dan yang akan dibangun; • Pembangunan waduk di bagian Selatan Jakarta sebagai pengendali banjir sekaligus pemasok air baku;

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>ayat (1), dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena kenaikan muka air laut, penurunan muka air tanah dan muka tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara serta persoalan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan dan air tanah;</p> <p>b. reklamasi dilakukan dalam bentuk pulau yang ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci dengan memperhatikan masa perancangan, keandalan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir, dan tindakan mitigasi, perlindungan hutan bakau, serta jalur lalu lintas laut, pelayaran dan pelabuhan;</p> <p>c. dalam perencanaan reklamasi tercakup rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengerukan sungai/kanal;</p> <p>d. setiap pulau reklamasi menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau yang berfungsi sebagai penampungan air sementara ketika hujan, persediaan air untuk beberapa kebutuhan harian sumber air yang mungkin untuk di kembalikan ke dalam lapisan aquifer, tempat hidupnya beberapa flora dan fauna, serta untuk rekreasi; dan</p> <p>e. ruang perairan di antara pulau reklamasi</p>	<p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber-sumber alternatif air baku, seperti desalinisasi <p>d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan jaringan distribusi di bagian Utara terkait pengembangan kawasan Pantura Jakarta dan kawasan Marunda; • Pengembangan jaringan distribusi air bersih ke wilayah Barat dan Timur DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan kota; dan • Penambahan hidran umum pada bagian kota yang berpenduduk padat <p>2. Arahan sistem konservasi sumber daya air meliputi :</p> <p>a. Rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berada di Kawasan Jabodetabekpunjur mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur</p> <p>b. Rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi didasarkan pada indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual</p> <p>c. Pola ruang DKI Jakarta didasarkan pada prinsip berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi sumber daya air untuk memelihara keberlanjutan sumber daya air; • Pengendalian penurunan muka

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan:</p> <p>a. relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar;</p> <p>b. revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah;</p> <p>c. perbaikan lingkungan, pemeliharaan kawasan permukiman dan kampung nelayan;</p> <p>d. pemerajaan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan;</p> <p>e. peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai untuk mengantisipasi banjir akibat rob dan meluapnya air sungai;</p> <p>f. perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan;</p> <p>g. relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun;</p> <p>h. pelestarian hutan bakau dan hutan lindung;</p> <p>i. perluasan dan peningkatan fungsi Pelabuhan; dan</p> <p>j. Pengembangan pantai untuk kepentingan umum.</p> <p>(2) Pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari</p>	<p>tanah melalui pengendalian penggunaan dan kerusakan tata airtanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; • Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ○ pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; ○ pengendalian pemanfaatan sumber air; ○ pengaturan daerah sempadan sumber air; ○ pengisian air pada sumber air; ○ perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan di sekitarnya <p>– Pengawetan air dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ menyimpan air yang berlebihan pada saat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan; ○ menghemat air dengan pemakaian yang efisien; ○ mengendalikan penggunaan airtanah <p>– Pengendalian pencemaran air serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi perkotaan;</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau dari hasil usaha pengelolaan tanah hasil reklamasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Persebaran lokasi kawasan strategis sebagai dimaksud pada pasal 96 sampai dengan pasal 105, termuat pada Gambar 21 Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penataan ruang kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 105, diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur rencana rinci kawasan Pantura.</p> <p style="text-align: center;">Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Struktur Ruang Wilayah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pusat kegiatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, di Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kantor Walikota Jakarta Utara sebagai pelayanan fungsi khusus;</p> <p>b. Kawasan Sunter sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran;</p> <p>c. Kawasan Pasar Kojas sebagai fasilitas perdagangan terutama untuk pasar</p>	<p>– Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai</p> <p>G. Sedimentasi</p> <p>-</p> <p>H. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri (Rencana Pengelolaan Air Limbah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada upaya perlindungan air permukaan dari berbagai polutan khususnya sampah. • Pengendalian pencemaran akibat limbah domestik perlu didasarkan pada rencana pengelolaan air limbah DKI Jakarta sesuai master plan air limbah yang disusun pada tahun 1991, diperbaiki pada tahun 2001 dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2009. <p>1. Master Plan Air Limbah Jakarta Tahun 1991</p> <p>Dalam Master Plan Air Limbah DKI Jakarta tahun 1991, DKI Jakarta dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan sanitasi yang didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk, tinggi muka airtanah, permeabilitas tanah, kondisi sosial-ekonomi, dan lainnya.</p> <p>a. Sistem Pengolahan Setempat</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya; dan</p> <p>d. Kawasan Pasar Pluit sebagai pusat perdagangan, jasa dan perkantoran;</p> <p>(2) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>a. pembatasan lalu lintas melalui penerapan kebijakan kawasan terbatas lalu lintas (restricted zone) serta pengaturan parkir/parkiran pada kawasan yang termasuk dalam kawasan terbatas lalu lintas di kecamatan Pademangan</p> <p>b. pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal dan angkutan umum lainnya di kawasan Kota/Kampung Bandan dan di Tanjung Priok;</p> <p>c. pembangunan jaringan jalan lokal sebagai jalan tembus dan jalan sejajar sebagaimana terlampir dalam lampiran tabel 6;</p> <p>d. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di perbatasan Kabupaten dan Kota Tangerang dan Bekasi;</p> <p>e. membangun gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum di kawasan Kampung Bandan dan lokasi yang memiliki potensi di Tanjung Priok;</p> <p>f. peningkatan manajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas serta fasilitas pejalan kaki di kawasan yang padat lalu lintas terutama di sekitar terminal bus dan stasiun kereta api; dan</p>	<p>Sederhana (Daerah A) dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 jiwa/ha dengan luas wilayah 21.159 Ha (32%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah tangki septik</p> <p>b. Sistem Pengolahan Setempat Tingkat Tinggi (Daerah B) dengan tingkat kepadatan penduduk 100 - 300 jiwa/ha dengan luas wilayah 27.386 Ha (42%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah tangki septik atau sistem <i>seworage</i> yang dimodifikasi sesuai kemampuan ekonomi masyarakat</p> <p>c. Sistem <i>seworage</i> (Daerah C) dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa/ha dengan luas wilayah 16.604 Ha (26%). Teknologi pengolahan yang diterapkan adalah <i>aerated lagoon</i> atau <i>activated sludge</i></p> <p>Untuk daerah pengembangan sanitasi dengan sistem <i>seworage</i> di daerah C, sistem pengelolaan air limbah dibagi menjadi 6 (enam) zona, yang terkait dengan Pantura yaitu : <u>Zona Pusat</u></p> <p>Luas wilayah yang dilayani adalah 6.017 Ha, dimana 336 Ha atau 6% berlokasi di bagian Selatan dari zona yang tercakup dalam Jakarta Sewerage System Project. Luas</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>g. mengembangkan jaringan transportasi air.</p> <p>(3) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pembangunan jaringan prasarana air limbah dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan sekitar waduk dan/atau kawasan reklamasi Pantura;</p> <p>b. pengembangan sistem prasarana air bersih melalui jaringan perpipaan pada tiap kecamatan;</p> <p>c. rehabilitasi Waduk Sunter, Don Bosco, Pluit, Muara Angke, Teluk Gong, dan Tol Sedatmo dan pembangunan Waduk Marunda sebagai tempat penampungan air sementara;</p> <p>d. Pembangunan septictank komunal di kawasan permukiman padat sedang terutama di perumahan kumuh.</p> <p>(4) Rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. normalisasi Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Sunter, Kali Cilwung, Kali Kamal Muara, Kali Tanjungan, Kali Banglio, dan Kali Baru;</p> <p>b. memantapkan Banjir Kanal Timur sebagai prasarana pengendali banjir;</p> <p>c. pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air di kawasan Jalan Tol</p>	<p>wilayah sistem konvensional dan sistem interseptor adalah 3.422 Ha (57%) dan 2.595 Ha (42%). Air limbah yang tertampung akan dialirkan melalui pipa dengan panjang 10,2 km menuju tempat pengolahan, yaitu di Waduk Pluit dengan peningkatan kapasitas untuk menampung air limbah sebesar 529.000 m³/hari dengan luas waduk 80 Ha. Waduk berfungsi sebagai pengolah air limbah dan pengendali banjir.</p> <p><u>Zona Timurlaut</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 3.496 Ha, dimana 1.610 Ha (46%) dilayani sistem konvensional dan 1.886 Ha (54%) menggunakan sistem interseptor. Air limbah dialirkan melalui pipa pembawa dengan panjang 7,4 km menuju ke tempat pengolahan berupa kolam <i>activated sludge</i> dengan kapasitas 261.000 m³/hari dan luas 14 Ha meliputi bagian Timur waduk Sunter dan kawasan hijau di Kelurahan Sunter Jaya.</p> <p><u>Zona Tanjung Priok</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 1.502 Ha dengan cakupan sistem konvensional dan sistem interseptor masing-masing 700 Ha (47%) dan 802 Ha (53%). Air limbah dialirkan melalui pipa utama sepanjang 1,0 km menuju tempat pengolahan berupa <i>aerated</i></p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Sediyatmo, Kawasan Pluit, Kelapa Gading, Tugu Utara, Kebon Bawang, Rawa Badak, dan Pademangan;</p> <p>d. penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di kali Kamal, Banjir Kanal Barat, Kali Sunter, Kali Cakung dan Kali Ciliwung;</p> <p>e. pembangunan fisik diarahkan menghadap sungai (<i>river front development</i>);</p> <p>f. pembangunan sistem polder baru dan pemulihan sistem polder yang sudah ada di sistem polder terutama di Sunter Timur III, Kelapa Gading, Tunjungan, Yos Sudarso, Muara Angke, Pluit, Sunter Selatan, Sunter Timur I, Sunter Utara, Teluk Gong, Bimoli, Gaya Motor, Kapuk Muara;</p> <p>g. pemulihan Situ Rawa Kendal;</p> <p>h. pelarangan pembuangan sampah ke dalam sungai dan kanal dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan</p> <p>i. pengelolaan situ Sunter Barat, Sunter I, Sunter II, Teluk Gong dan Pluit</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara termuat pada Gambar 24 dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p><i>lagoon</i> dengan kapasitas 120.000 m³/hari dan luas 36 Ha di kawasan hijau dan waduk Sunter Timur II di Kelurahan Semper Timur.</p> <p>2. Jakarta Wastewater Disposal Project tahun 2001</p> <p>Beberapa perubahan terhadap master plan air limbah tahun 1991, khususnya rencana pengembangan <i>sewerage</i> di zona pusat antara lain :</p> <p>a. Rencana lokasi IPAL di waduk Pluit dipindahkan ke Muara Baru, yaitu pada lahan reklamasi.</p> <p>b. Rencana pengolahan air limbah dibagi menjadi 6 subsistem yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsistem Thamrin dilayani IPAL Waduk Setiabudi; • Subsistem Setiabudi Tebet dilayani IPAL Waduk Setiabudi; • Subsistem Gajahmada dilayani IPAL Muara Baru; • Subsistem Pantai Mutiara dilayani IPAL Muara Baru; • Subsistem Kali Ancol dilayani IPAL Kali Ancol; • Subsistem Kali Grogol dilayani IPAL Grogol; • Subsistem Waduk Grogol dilayani IPAL Grogol; dan • Subsistem Siantar dilayani IPAL Muara baru. <p>Direncanakan pula 8 (delapan) <i>pumping station</i>, yaitu PS1 Krukut, PS2 Pasar Rumpit, PS3 Abdul Mujs, PS4 Pluit, PS5 Kali Grogol, PS6 Kali</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Rencana kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), di Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan terbuka hijau budi daya; b. kawasan perumahan dan fasilitasnya; c. kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa; d. kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman; e. kawasan pariwisata; f. kawasan pemerintahan daerah; g. kawasan terbuka biru; h. kawasan perikanan; dan i. kawasan industri dan pergudangan. <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Rencana kawasan terbuka hijau budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menata dan melestarikan hutan kota; b. mengembangkan jalur hijau; c. pengembangan kawasan taman kota; dan d. pengembangan kawasan terbuka hijau lain. <p>(2) Rencana menata dan melestarikan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di sekitar Waduk Pluit, Waduk Sunter Barat, dan Waduk Sunter Timur, dan kawasan reklamasi pantura;</p> <p>(3) Rencana pengembangan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan di sepanjang pantai yang</p>	<p>Grogol, PS7' Kali Ancol, dan PS8 Siantar.</p> <p>IPAL Muara Baru berlokasi di lahan reklamasi Teluk Muara Baru, yaitu di sebelah Utara pompa banjir Pluit, di sebelah Timur perumahan pantai Mutiara atau di sebelah Barat pasar ikan seluas 40 Ha. Jenis pengolahan pada tahap I berupa <i>aerated lagoon</i> dan pada jangka panjang menggunakan <i>activated sludge</i>.</p> <p>3. Review Master Plan dan DED tahun 2009</p> <p>Rencana mencakup zona pusat bagian Utara dan tidak termasuk Setiabudi-Tebet, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IPAL Muara Baru dipindahkan ke Pluit Selatan untuk tahap I dan Pluit Utara untuk jangka panjang b. IPAL Pluit Selatan melayani subsistem Gajah Mada, Thamrin, Pantai Mutiara, Siantar, dan Kali Ancol dengan kapasitas 86.400 m³/hari c. IPAL Kali Ancol tidak dibangun dan dialihkan ke <i>main system</i> IPAL Muara Baru d. IPAL Grogol tetap melayani subsistem Kali Grogol dan Waduk Grogol e. Pengeolaan air limbah dengan sistem <i>activated sludge</i> dan <i>membrane</i> untuk daur ulang f. Sistem pengumpulan air limbah dibagi menjadi dua bagian, yaitu

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dipadukan dengan budidaya perikanan, jalur hijau jalan, tepian sungai dan kanal, jalur rel kereta api, jalur hijau pengaman rel kereta api atau saluran tegangan tinggi dan kawasan reklamasi pantura;</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan kawasan terbuka hijau di kawasan Kota Tua; mengembangkan dan mempertahankan kawasan RTH; mendorong penanaman pohon dan tanaman hias di halaman rumah, tepi dan median jalan, tepi sungai, dan jaringan pipa; menata dan memelihara jalur hijau pada tepi dan median Tol Sediyatmo, Cakung Cilincing dan tol pelabuhan; mendorong masyarakat untuk mengembangkan <i>roof garden</i> dan dinding hijau di kawasan permukiman dan perkantoran terutama di kawasan dengan KDB tinggi; penataan dan pemeliharaan taman; peruntukan lahan di kawasan RTH publik tidak dapat diubah; dan Peningkatan areal kawasan hijau yang salah satu bentuknya merupakan taman kota pada pengembangan kawasan reklamasi pantura <p>(5) Rencana pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p>	<p>sistem Timur dan sistem Barat dengan batas Jl. Thamrin dan Jl. Gajahmada. Masing-masing sistem dilayani <i>main trunk</i> dengan diameter 1,8 m yang ditempatkan pada kedua jalur di sepanjang Jl. Thamrin dan Gajahmada/Hayam Wuruk hingga ke IPAL di Pluit Selatan</p> <p>Selain itu, dibangun sistem <i>sewerage</i> di Setiabudi-Tebet sebagai pengembangan yang ada pada saat ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pengelolaan Air Limbah <p>Kebijakan pengelolaan air limbah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah <i>on site</i> dan <i>off site</i> Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah kota Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah kota Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah kota Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah kota

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>a. mempertahankan lahan pertanian yang ada di Cilincing, Marunda, Kamal dan Kanal Muara; dan</p> <p>b. mempertahankan lahan pemukiman di Kawasan Cilincing, Koja dan Tanjung Priok serta lapangan olahraga yang ada.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang melalui program tribina;</p> <p>b. mengembangkan perumahan lingkungan perumahan kumuh berat;</p> <p>c. mendorong pengembangan kawasan permukiman vertikal dan memperkecil perpetaan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>d. mengembangkan perumahan menengah-atas di areal reklamasi Pantura;</p> <p>e. mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan;</p> <p>f. membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa sekaligus melestarikan lingkungan;</p> <p>g. mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan di kawasan pantai lama;</p> <p>h. mempertahankan fungsi perumahan di</p>	<p>2. Strategi Pengelolaan Air Limbah Strategi yang diterapkan adalah :</p> <p>a. Pemisahan sistem drainase dan perpipaan tertutup secara bertahap disertai dengan pengelolaan air limbah</p> <p>b. Sistem pengelolaan air limbah dikelompokkan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah industri • Limbah domestik <p>c. Pengelolaan air limbah industri dilakukan secara sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke lingkungan</p> <p>d. Prasarana pengelolaan air limbah domestik terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem komunal • Sistem semi komunal/modular • Sistem individual <p>e. Pengembangan pengolahan air limbah diprioritaskan pada Zona Pusat.</p> <p>Pembagian daerah pelayanan pengolahan air limbah dilakukan dengan memperhatikan daerah layanan sistem polder.</p> <p>1. Penanganan Sampah (Rencana Prasarana Persampahan)</p> <p>Sistem jaringan persampahan yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>kawasan mantap di Kota Tua, Kelapa Gading, dan Pluit;</p> <p>i. melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman horizontal;</p> <p>j. mengembangkan kawasan permukiman di Kawasan Pantai Lama;</p> <p>k. pengendalian pembangunan perumahan baru di Pademangan, Cilincing dan Penjaringan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>l. pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun sederhana di perumahan kumuh berat sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kalibaru, Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjaringan dan melengkapi penataan RTN yang berfungsi ekologis dan sosial;</p> <p>m. pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, Kelapa Gading, dan Penjaringan yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir; dan</p> <p>n. Rencana pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan tingkat kepadatan lingkungan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, terdiri atas:</p> <p>a. rencana pengembangan kawasan perkantoran yang terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;</p>	<p>pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.</p> <p>Pengembangan pengelolaan persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dari sumbernya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah dan pengembangan prasarana sarana pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.</p> <p>Untuk menunjang penanganan sampah perlu pengembangan sistem prasarana persampahan meliputi:</p> <p>a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah</p> <p>Melalui penggalakan program 4R (<i>reuse, reduce, recycling, recovery</i>) pada setiap Rukun Warga dan menyediakan sarana pendukungnya.</p> <p>b. Peningkatan sistem pelayanan persampahan</p> <p>Pengembangan pelayanan persampahan di Jakarta dilaksanakan kedalam sistem multi simpul (multi nodal) terbagi dalam beberapa daerah pelayanan dimana setiap daerah pelayanan dilengkapi dengan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Sementara) dan ITF (<i>Intermediate Treatment Facility</i>) dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan.</p> <p>c. Pengembangan TPST di luar Jakarta</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. rencana pengembangan kawasan perdagangan yang terdiri dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, ataupun bentuk kawasan perdagangan lainnya ;</p> <p>c. rencana pengembangan kawasan pelayanan umum dan sosial; dan</p> <p>d. rencana pengembangan kawasan campuran</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mengembangkan fasilitas perkantoran di kawasan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Sunter, dan Enggano.</p> <p>(3) Rencana pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan;</p> <p>b. mengembangkan kawasan perdagangan di Pantura dengan pola pengembangan multifungsi atau super blok dengan fasilitas bertaraf internasional;</p> <p>c. menata fungsi kawasan kota tua untuk mendukung kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan pariwisata;</p> <p>d. mengembangkan kawasan perdagangan, jasa, dan perkantoran di Tanjung Priok dan sebagian Kelapa Gading;</p> <p>e. membatasi pengembangan perdagangan, jasa, dan perkantoran sepanjang jalan arteri primer dengan memperhatikan lalu lintas dan penyediaan parkir;</p>	<p>Pengembangan kerja sama untuk penyediaan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dengan daerah lain dimungkinkan dengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial setempat.</p> <p>d. Pengembangan sistem pengendalian dan prasarana sampah B3</p> <p>Pengembangan sistem pengendalian dan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>e. Pengelolaan sampah dari drainase/sungai</p> <p>Penyediaan sarana pengelolaan sampah dari drainase/sungai dilakukan guna pencegahan banjir, meningkatkan kualitas air sungai dan estetika.</p> <p>f. Penanganan sampah/limbah di perairan laut.</p> <p>g. Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai, misalnya insinerator pada lokasi tertentu.</p> <p>J. Pemanfaatan Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada penanganan bagan yang mengganggu alur pelayanan • Perlu ditampung/ diakomodir pelabuhan wisata • Arahan Kawasan Strategis Pantura Jakarta meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>f. pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum berdasarkan arahan penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Yos Sudarso untuk menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan</p> <p>g. mengembangkan pusat perdagangan dengan KDB rendah di Kamal, Kapuk, Pademangan, Ancol, Cilincing, dan sebagian Kelapa Gading.</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa taman dilaksanakan pada kawasan Marunda dengan penerapan intensitas rendah dan meningkatkan daya resap air pada kawasan terbangun.</p> <p>(5) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan; dan</p> <p>b. pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dengan prasarana dan sarana yang standar pelayanan minimal di setiap kecamatan</p> <p>c. pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal di setiap kecamatan.</p> <p>(6) Rencana pengembangan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan pengembangan kawasan campuran, perdagangan, dan jasa dengan perumahan</p>	<p>penurunan muka air tanah dan muka tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara, dan persoalan lingkungan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan, dan air tanah;</p> <p>2. Bentuk pulau reklamasi ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci;</p> <p>3. Disain pulau reklamasi memperhitungkan masa perancangan, keadaan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir dan tindakan mitigasi, serta perlindungan hutan bakau;</p> <p>4. Dalam pelaksanaan reklamasi perlu dilakukan tindakan untuk keamanan dan resiko pencemaran dan sedimentasi;</p> <p>5. Dalam perencanaan reklamasi tercapai rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengendalian muara sungai;</p> <p>6. Pengembangan reklamasi Pantura dilakukan dalam bentuk pulau-pulau dengan jarak 200 m pada pulau yang berada pada zona P2 dan P4 serta berjarak 300 m pada pulau yang berada pada zona P3 dihitung dari pantai eksisting pada saat muka air terendah;</p> <p>7. Tanggul laut diletakkan pada</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>vertikal dan horisontal terutama di kawasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Lodan; b. Jalan Martadinata; c. Jalan Yos Sudarso; d. Kawasan Cilincing; e. Kawasan Kelapa Gading; dan f. Kawasan Sunter. <p>(7) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman dilaksanakan di Kawasan Marunda dengan menerapkan intensitas rendah dan memperhatikan aspek fisik lingkungan yang ada</p> <p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d, diarahkan untuk pengembangan kawasan destinasi wisata pesisir.</p> <p>(2) Kawasan destinasi wisata pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sentra Perikanan Muara Angke; c. Masjid dan Makam Luar Batang; d. Pelabuhan dan Kota Tua Sunda Kelapa; e. Pusat Perbelanjaan Mangga Dua; f. Taman Impian Jaya Ancol; g. Bahtera Jaya dan Yacht Club; h. Stasiun Tanjung Priok; i. Masjid Islamic Center; j. Gereja Tugu; k. Kampung Tugu; l. Cagar Budaya Rumah si Pitung; 	<p>kedalaman -8 m untuk daerah Barat dan tengah sedangkan untuk bagian Timur tanggul berada dekat pantai eksisting. Di atas tanggul dimanfaatkan sebagai jalan penghubung Barat-Timur;</p> <p>8. Ketinggian dan kekuatan tanggul dan perlindungan pesisir didisain dengan kala ulang angin dan gelombang minimal 1.000 tahun. Ketinggian tanggul harus memperhatikan faktor ketinggian air laut pasang, <i>wave setup</i>, <i>storm surge</i>, gelombang, <i>land subsidence</i> (lambesan), <i>sea level rise</i> (kenaikan muka laut) dan konsolidasi sisa (<i>residual settlement</i>);</p> <p>9. Limpasan air yang melalui tanggul diperkenankan hingga batas maksimal 5 l/s/m. Jika melampaui limpasan tersebut wajib menyediakan sistem <i>flood control</i> (penganggulangan banjir) lainnya, seperti pompa dan kolam retensi dengan kapasitas yang memadai untuk menanggulangi limpasan air yang terjadi;</p> <p>10. Pulau reklamasi dan tanggul laut didisain dengan siklus masa layanan (<i>design life cycle</i>) minimal 50 tahun;</p> <p>11. Untuk keamanan, level lantai dasar bangunan berada lebih tinggi dari muka air laut tertinggi;</p> <p>12. Selain membangun kanal dan saluran, setiap pulau reklamasi wajib menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau;</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>m. Masjid Al Alam; dan n. Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading,</p> <p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf e, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pelarangan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi pada tiap kecamatan yang berbatasan dan/atau memiliki kawasan perairan laut;</p> <p>b. pengembangan prasarana budi daya perikanan di Muara Baru dan Muara Angke sesuai dengan klasifikasinya; dan</p> <p>c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup pada tiap kecamatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui penataan kantor-kantor pemerintahan daerah dan lingkungan sekitarnya baik itu tingkat Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan;</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan terbuka biru dilaksanakan untuk melaksanakan konservasi sumber daya air, air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang dilaksanakan pada Sungai, Kali, Situ dan</p>	<p>13. Badan-badan air berupa waduk dan danau difungsikan sebagai :</p> <p>a. Penampungan air sementara ketika hujan;</p> <p>b. Persedian air untuk kebutuhan harian;</p> <p>c. Sumber air yang mungkin untuk dresapkan ke dalam lapisan aquifer;</p> <p>d. Habitat flora dan fauna akuatik;</p> <p>e. Sarana rekreasi</p> <p>14. Ruang perairan antara pulau-pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir di Jakarta Utara;</p> <p>15. Untuk mengurangi dan selanjutnya menghentikan proses <i>land subsidence</i>, penyediaan air bersih untuk kawasan reklamasi Pantura tidak diperkenankan menggunakan airtanah;</p> <p>16. Penyediaan air bersih dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan mengarah kepada <i>sustainable solution</i> dengan memanfaatkan air tawar dari waduk dan perairan antara pulau-pulau dan proses desalinisasi;</p> <p>17. Pengolahan air limbah dilakukan secara mandiri pada masing-masing pulau;</p> <p>18. Pembangunan areal reklamasi baru diarahkan agar tidak menimbulkan peningkatan risiko banjir bagi kawasan di hulunya. Jika terdapat potensi kenaikan muka air di hulu</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Waduk serta Pantai yang ada di Jakarta Utara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan industri dan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f, meliputi:</p> <p>a. rencana pengembangan kawasan industri; dan</p> <p>b. rencana pengembangan kawasan perhubungan.</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. membatasi kegiatan industri di kawasan yang sudah ada di Penjaringan, Kelapa Gading, dan Cilincing;</p> <p>b. mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing; dan</p> <p>c. penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal</p> <p>(3) Pemanfaatan ruang kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan arahan:</p> <p>a. penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing dan Kali baru; dan</p> <p>b. relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dari Ancol Barat, Marunda, dan Cilincing.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan</p>	<p>sungai, maka harus dilakukan tindakan mitigasi berupa pengerukan muara sungai, pelebaran dan pengerukan kanal/ sungai, peninggian tanggul di kawasan yang berpotensi terjadi kenaikan muka air sungai, dan tindakan lain yang dipandang perlu;</p> <p>19. Pembangunan areal reklamasi baru diarahkan untuk meningkatkan fungsi mangrove sebagai habitat flora dan fauna akuatik dengan memperhatikan perlindungan terhadap erosi dan gelombang, salinitas, kualitas air, dan substrat lumpur (<i>mud</i>);</p> <p>20. Pemantauan kegiatan reklamasi dilakukan terhadap parameter perubahan morfologi, abrasi dan erosi, sedimentasi, muka airtanah, muka tanah, kuantitas pemompaan airtanah, tata guna lahan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;</p> <p>21. Rencana dan skenario peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi massal publik yang sesuai dengan proyeksi pengembangan kawasan hunian dan area publik di lahan reklamasi. Tidak hanya bersandar pada rencana infrastruktur jalan raya. Konsep transit oriented development (TOD) pun harus diterapkan dalam kawasan pengembangan di atas lahan reklamasi;</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengatasi perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa; b. relokasi kawasan pergudangan dari Kawasan Kota Tua; dan c. penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal <p>(2) Pemanfaatan ruang untuk mengembangkan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan melalui penyediaan fasilitas pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa yang dilaksanakan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjarangan, b. Koja; c. Kelapa Gading; dan d. Cilincing. <p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara termuat pada Gambar 25 dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini</p>	<p>22. Harus diperjelas skenario peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur berbasis jalan raya atau berbasis rel bagi kelancaran arus rantai pasok barang dari dan ke kawasan industri strategis atau pun sarana ekonomi strategis di lahan reklamasi, tidak hanya bersandar pada infrastruktur jalan raya yang sudah ada;</p> <p>23. Kawasan strategis pantura harus dikelola secara terpadu oleh satu manajemen pengelola dan mencakup juga bagian pesisir pantura yang ada sekarang, sehingga masalah pengelolaan sampah dan pengurangan sedimen, keamanan, ketertiban dapat dilakukan secara rutin dan terpadu;</p> <p>24. Setiap upaya revitalisasi kawasan pantura yang ada harus berupaya memperbaiki keseimbangan zona sehingga dapat mengurangi koneksi frontal antara kawasan konservasi langsung dengan kawasan hunian padat, kawasan hunian mewah langsung dengan kawasan hunian padat sederhana. Gradasi zona dan penerapan zona buffer perlu dipertimbangkan;</p> <p>25. Upaya konsolidasi lahan, pemerajaaan area pesisir kumuh Jakarta Utara dan pengentasan kemiskinan khususnya kaum nelayan harus dimaknai dan di selesaikan dalam kerangka</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>pemberdayaan ekonomi nelayan dan sektor industri perikanan secara terpadu dan progresif. Peluang kerjasama pembenahan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pendaratan ikan dan industri perikanan perlu diuji dengan daerah pesisir Tangerang dan Bekasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan Rencana Kawasan Lindung meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan pantai seluas 16,5 Ha berfungsi sebagai penahan abrasi, erosi, dan daya rusak laut 2. Suaka margasatwa Muara Angke seluas 25,02 Ha berfungsi sebagai habitat burung air yang dilindungi 3. Hutan lindung Kapuk Angke seluas 44,78 Ha 4. Taman wisata alam Kamal seluas 99,82 Ha 5. Kebun pembibitan mangrove di Taman Wisata Alam Kamal seluas 10,51 Ha 6. Kawasan Tegal Alur-Angke Kapuk berfungsi sebagai kawasan pengaman jalur tol • Arahan Rencana Pengembangan Kawasan Terbuka Biru meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada regulasi spesifik yang mengatur zona area yang berimpit dengan badan air (waterfront, seafont, lakeside, riverside, dsb) sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai area bernilai tambah tinggi. Sehingga

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>pengembangan bernilai tambah tinggi lebih layak mendapat prioritas di zona tersebut. Hal ini diharapkan akan mengubah paradigma apresiasi terhadap badan air sehingga waterfront menjadi area muka bangunan bukan belakang bangunan.</p> <p>2. Prioritas utama lain di area waterfront adalah untuk ruang terbuka publik, infrastruktur dan fasilitas publik sehingga memberi publik akses lebih pada area waterfront.</p> <p>K. Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada antisipasi isu future development • Perlu dikaji kembali misi DKI sebagai kota jasa, tidak hanya memikirkan untuk kelas menengah atas saja akan tetapi juga harus dipikirkan untuk masyarakat bawah • Perlu menjadikan lingkungan sebagai sumber kebijakan agar tidak terjadi ego sektoral • Perlu dijabarkan tujuan reklamasi adalah untuk perbaikan lingkungan pantai <p>L. Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyusun KRP perlu mempertimbangkan perilaku masyarakat, bagaimana masalah sosial budaya yang harus ditangani • Dalam menyusun KRP perlu dilihat juga kondisi sosial di daerah tersebut, karena kerusakan fisik tersebut akibat kondisi masyarakat juga • Dalam rencana perbaikan fisik yang akan dilakukan perlu dipertimbangkan masalah manusianya, yaitu harus dipetakan perilaku masyarakatnya • Perlu dihilangkan pembiasaan pemberian sesuatu hal tanpa ada pencegahan <p>M. Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu mulai dibudayakan “pemukiman vertical”, tetapi jangan dimulai dari kelas bawah, melainkan dari kelas menengah dengan “system land consolidation” untuk menghindari pengusuran. Perbaikan perumahan kelas bawah (kampung kumuh) yang tidak liar sebaiknya dilakukan dengan pendekatan “perbaikan kampung”, bukan “urban renewal” • Perlu penataan kembali perumahan kelas menengah secara vertical dengan cara “land consolidation”, sehingga penduduk lama tidak tergusur, tetapi penduduk baru bisa masuk ke daerah itu secara efisien. Perumahan vertical

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBU	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>sebaiknya mulai dari kelas atas dan menengah, bukan dari kelas bawah, karena kemiskinan mereka masih sangat dalam, mereka belum siap untuk menghuni rumah susun</p> <p>N. Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial dan ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu kepastian hukum dalam berinvestasi dan perlu jaminan keamanan kelas atas • Perlu penjelasan apakah akan ada penertiban atau membiarkan adanya dinamika kehidupan yang berbeda • Perlu juga memikirkan ruang untuk masyarakat kelas bawah yang bila tidak terlokasikan akan menyebabkan kesemrawutan pemanfaatan ruang • Perlu penanganan mobilitas kelas menengah dari pinggir kota ke pusat kota yang semakin mahal • Perlu ada perlindungan jaring pengaman sosial terhadap dampak kesenjangan kelas semakin tinggi • Masyarakat yang tidak mampu perlu ditampung pada jaring pengaman sosial • Perlu pemberdayaan masyarakat setempat, jadi hanya yangutamakan hanya fisik saja, tetapi perlu pembangunan manusianya

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dipikirkan alih profesi seperti apa untuk mengatasi kekosongan kegiatan karena pada saat musim angin barat yaitu pada bulan September – Desember umumnya ombak besar sehingga nelayan tidak bisa melaut • Perlu penyediaan ruang bagi masyarakat bawah • Perlu kejelasan mengenai pemukiman nelayan apakah tidak akan menambah permasalahan baru, karena dengan dilakukan pemukiman nelayan akan mengundang nelayan baru dari luar DKI • Terhadap nelayan jangan hanya perumahannya saja yang ditingkatkan, yang penting adalah bagaimana untuk meningkatkan ekonominya agar strata sosialnya meningkat. Jadi jangan keberadaannya yang dilindungi dengan menyediakan perumahan, memperbaiki sanitasi dsb, bila ekonominya tidak diperbaiki sama halnya dengan melestarikan kemiskinan • Yang dibutuhkan oleh kelas bawah bukanlah perbaikan pemukiman, perbaikan sanitasi, akan tetapi yang dibutuhkan adalah perbaikan ekonomi, peningkatan ketrampilan agar bisa meningkatkan strata sosialnya dari kelas bawah ke kelas menengah • Untuk mendekatkan kelas menengah dan atas dengan kelas bawah, perlu dimulai dengan mengembangkan fungsi ekonomi kelas bawah terhadap kelas menengah (misalnya berupa Pujasera),

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>sehingga terjadi peningkatan penghasilan. Disamping itu juga perlu membuka akses ke Pantai bagi masyarakat kelas bawah serta mengembangkan wisata Pantai bersama mereka (partisipasi ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kendali keberadaan nelayan yang berasal dari luar berusaha di Jakarta • Perlu diantisipasi urbanisasi dari daerah termasuk nelayan akibat kegiatan pembangunan di Jakarta • Perlu ditata kembali kegiatan arus urbanisasi dari daerah luar Jakarta termasuk nelayan yang ada di DKI kebanyakan pendatang karena adanya pembangunan di Jakarta • Perlu ditata kembali pelabuhan nelayan apakah sudah tepat pada tempatnya yang ada sekarang, karena daerah penangkapannya berada diluar Jakarta • Dalam menangani masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu diperhatikan urbanisasi yang terjadi, bagaimana mengendalikan penduduk Serang, Cirebon dsb agar tidak berduyun-duyun ke Jakarta. Perlu dikordinasikan oleh instansi yang lebih tinggi • Jakarta, Bekasi dan Tangerang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kekayaan wisata darat, tetapi bersama-sama mengembangkan wisata bahari dengan kepulean seribunya • Perlu ada kejelasan mengenai

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>keberadaan pantai yang seharusnya milik publik, akan tetapi dari 32 km panjang pantai utara hanya 8 km yang dapat diakses oleh publik, selebihnya dikuasai oleh berbagai kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu diangkat isu budaya. Ada budaya nelayan seperti nagrang/pesta laut. Akan tetapi tidak terlaksana dengan baik, karena dikaitkan dengan agama dan dikatakan perbuatan syirik. Sebenarnya Nagrang/pesta laut bisa dikaitkan dengan pesta wisata. Hal ini dapat mengangkat keterpurukan para nelayan • Perlu kejelasan dalam pengembangan pantura, apakah diperuntukkan bagi kelas atas, menengah atau kelas bawah <p>O. Kemiskinan dan hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan masyarakat Jakarta Utara perlu dibantu dan perlu ditampung dalam RPJMP • Perlu proses perencanaan induk yang tidak bersifat parsial karena menyebabkan integrasi kawasan ekonomi dan social menjadi rendah • Sektor informal perlu diberdayakan dan ditata secara fisik • Perlu disediakan ruang untuk pedagang kaki lima • Perlu pemberdayaan masyarakat dalam menangani kesenjangan ekonomi • Masalah kemiskinan di kawasan ini perlu diselesaikan dulu mengenai masalah

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBRUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>nelayan, karena mereka telah mengalami penurunan kapasitas dan mulai membutuhkan suatu perubahan profesi, kedua pengembangan UKM disertai pembangunan pemukiman dengan pendekatan Perbaikan kampung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah sosial perlu ditampung pada PMKS <p>CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi diatas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam KRP seperti RTRW, RDTR, RPJ-P dan RPJM atau KRP lainnya dimana pencapaian program perlu didukung dengan data dan pembahasan detail sehingga dapat disusun program yang lebih fokus khususnya mengenai penanganan isu lingkungan hidup bio fisik dan lingkungan hidup sosial ekonomi budaya • RUPSB dan RUPE perlu dihidupkan kembali dan diintegrasikan sebagai bagian dari KRP • Pembangunan Teluk Jakarta perlu dilihat secara sistemik (antar wilayah) dengan orientasi keuntungan internasional

REKOMENDASI HASIL KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP KABUPATEN BEKASI

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> Land Subsidence Rob dan Kenaikan Muka Air Laut Banjir/Genangan Abrasi dan Kerusakan Pantai Degradasi Ekosistem Mangrove Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih Sedimentasi Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri Penanganan Sampah Pemanfaatan Ruang Laut Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p style="text-align: center;">BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 37</p> <p>(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);</p> <p>(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KSN Jabodetabekpunjur;</p> <p>(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. KSP Koridor Bekasi-Cikampek;</p> <p>b. KSP Pertanian Lahan Basah dan Beringasi Teknis Pantura;</p> <p>c. KSP Pesisir Pantura.</p> <p>(4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :</p> <p>1. Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi kawasan :</p> <p>a) Tambun Selatan</p> <p>b) Cibitung</p> <p>c) Cikarang Utara</p> <p>d) Cikarang Selatan</p> <p>e) Cikarang Timur</p> <p>f) Cikarang Barat</p> <p>g) Cikarang Pusat</p> <p>h) Babelan</p> <p>i) Tarumajaya</p>	<p>Raperda RTRW Kabupaten Bekasi 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>A. Land Subsidence</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu ada kebijakan tentang pengendalian pembangunan dan pemanfaatan air bawah tanah sehingga dapat diantisipasi walaupun saat ini belum dirasakan dampaknya <p>B. Rob dan Kenaikan Muka Air Laut</p> <p>Perlu ada ketentuan mengenai strategi penanggulangan rob/kenaikan muka air laut</p> <p>C. Banjir/Genangan</p> <p>Pasal 52 ayat (9) perlu ditambahkan Huruf j. Penerapan teknologi lahan basah bagi permukiman rawan banjir.</p> <p>D. Degradasi Ekosistem Mangrove</p> <p>Adanya inkonsistensi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung di Kec. Muaragembong, sehingga perlu penataan kembali sesuai PerPres no. 54 tahun 2008.</p> <p>E. Sedimentasi</p> <p>Perlu ada kebijakan untuk status kepemilikan tanah timbul.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>j) Sukawangi, dan k) Cabangbungin</p> <p>2. Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi kawasan :</p> <p>a) Sukatani</p> <p>b) Karang Bahagia</p> <p>c) Pebayuran</p> <p>d) Kedungwaringin</p> <p>e) Tambelang</p> <p>f) Sukawangi</p> <p>g) Cabangbungin</p> <p>b. KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah KSK Muaragembong;</p> <p>c. KSK bidang sosial dan budaya meliputi :</p> <p>1. KSK Cikarang Pusat; dan</p> <p>2. Kecamatan Babelan.</p> <p>d. KSK bidang kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, berupa sumber alam minyak dan gas bumi meliputi kawasan :</p> <p>1. Tambun Selatan</p> <p>2. Babelan</p> <p>3. Cabangbungin</p> <p>4. Sukawangi</p> <p>5. Karang Bahagia</p> <p>6. Cikarang Timur</p> <p>7. Pebayuran</p> <p>8. Muaragembong</p> <p>9. Tarumajaya</p> <p>10. Cibarusah.</p> <p>(5) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>F. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri</p> <p>Perlu dimasukkan penambahan pasal mengenai pengelolaan limbah domestik.</p> <p>G. Pemanfaatan Ruang Laut</p> <p>Tidak ada pemanfaatan ruang laut (reklamasi).</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 8 ayat (4)</p> <p>Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>b. mengoptimalkan pendaya-gunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air untuk meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; suplay air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan.</p> <p>f. mengoptimalkan pendaya-gunaan pengelolaan dan <u>pengembangan</u> sumberdaya air untuk meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; suplay air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan.</p> <p>Pasal 8 ayat (5)</p> <p>Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :</p> <p>a. meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan air minum sistem perpipaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di kawasan perkotaan.</p> <p>b. mengembangkan system pengelolaan persampahan dengan teknik dan metoda yang berwawasan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBERUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pengelolaan berbasis masyarakat melalui integrasi 3R dengan prinsip berkelanjutan, mandiri dan tuntas ditempat secara mandiri dan berkesinambungan;</p> <p>d. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan sampah;</p> <p>e. mengembangkan prasarana drainase;</p> <p>f. meningkatkan upaya mitigasi dalam mengantisipasi potensi bencana di Kabupaten.</p> <p>Pasal 8 ayat (6)</p> <p>Strategi peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :</p> <p>a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan dan merehabilitasi secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;</p> <p>Pasal 8 ayat (7)</p> <p>Strategi optimalisasi pendayagunaan kawasan budi daya secara sinergi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi :</p> <p>b. mempertahankan kawasan pertanian</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>lahan basah dan/atau beririgasi teknis;</p> <p>c. mengendalikn alih fungsi lahan basah sawah menjadi kegiatan budi daya lainnya;</p> <p>d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan hunian vertikal bersubsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah di kawasan perkotaan untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh perkotaan;</p> <p>Pasal 12 ayat (6)</p> <p>Rencana pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b berupa pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;</p> <p>Pasal 17 ayat (3)</p> <p>Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c meliputi :</p> <p>a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA), meliputi IPA Babelan, IPA Tegal Gede, IPA Sukatani, IPA Cabangbungin, IPA Cibarusah, IPA Cikarang Baru, IPA Cikarang Lippo, Deep Well Setu, Deep Well Lemahabang, IPA Tanah Baru, IPA Tambun Selatan, IPA Tambun Utara dan IPA Tambelang;</p> <p>b. peningkatan jangkauan distribusi pelayanan jaringan air minum dengan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tertinggal (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sistem perpipaan hingga enam puluh persen; dan</p> <p>c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17 Ayat (4)</p> <p>Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. normalisasi sungai; b. pembangunan banjir kanal; c. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul); d. pembangunan dan pengembangan pintu air; e. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman; f. penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; g. penanaman pohon di sempadan sungai, situ, rawa dan lahan-lahan kritis. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Rencana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana pengelolaan persampahan; b. prasarana pengelolaan limbah; c. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi; dan d. prasarana jaringan drainase. <p>(2) Rencana prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng Kecamatan Setu; b. peningkatan dan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan pengelolaannya secara merata di setiap Kecamatan; c. penerapan 3R (Recycle, Reuse, Reduce) dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah (domestic, niaga, industry dan lain-lain); dan d. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah tersendiri. <p>(3) Rencana prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan industri; b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan; c. pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri B-3 dengan alternatif di Desa Bojongmangu Kecamatan Bojongmangu. <p>(4) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalur evakuasi dari ancaman bencana menuju ruang evakuasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur evakuasi bencana alam gelombang pasang/abrasi di 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana gelombang pasang/abrasi;</p> <p>b. jalur evakuasi bencana alam banjir menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi bencana meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Muaragembong 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan babelan; 4. Kecamatan Cabangbungin; 5. Kecamatan Sukakarya; 6. Kecamatan Sukawang; 7. Kecamatan Cikarang Utara; 8. Kecamatan Cikarang Timur; 9. Kecamatan Pebayuran; 10. Kecamatan Kedungwaringin. <p>Pasal 20 ayat (1)</p> <p>Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 5.449 Ha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan kawasan hutan lindung; b. mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan; c. merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan hutan lindung; dan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKBUK	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. mengembangkan ekowisata dan agroforestri.</p> <p>Pasal 22 ayat (3)</p> <p>Penetapan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 566 Ha tersebar di :</p> <p>a. Kecamatan Babelan;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Muaragembong.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c, terdapat di kawasan mangrove Kecamatan Muaragembong dengan luas kurang lebih 5.311 Ha atau sekitar kurang lebih 4 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten.</p> <p>Pasal 24</p> <p>Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <p>a. kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. kawasan rawan bencana banjir, yang terjadi di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan tambun Utara; 2. Kecamatan Tambun Selatan; 3. Kecamatan Tarumajaya; 4. Kecamatan Cibitung; 5. Kecamatan Cikarang Timur; 6. Kecamatan Cikarang Utara; 7. Kecamatan Cabangbungin; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKIBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>8. Kecamatan Kedungwaringin; 9. Kecamatan Pebayuran; 10. Kecamatan Sukakarya; 11. Kecamatan Sukatani; 12. Kecamatan Sukawangi; 13. Kecamatan Tambelan; 14. Kecamatan babelan.</p> <p>Pasal 25 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi :</p> <p>a. Kawasan rawan bencana alam geologi abrasi di Kecamatan Muaragembong. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) dan (3) (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <p>a. Kecamatan tarumajaya; b. Kecamatan Babelan; dan c. Kecamatan Muaragembong.</p> <p>(3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Muaragembong; b. Kecamatan Tarumajaya; c. Kecamatan Cikarang Pusat; d. Kecamatan Bojongmangu; e. Kecamatan Setu; f. Kecamatan Serang Baru; g. Kecamatan Cikarang Selatan; h. Kecamatan Sukakarya;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>i. Kecamatan Tambun Selatan.</p> <p>Pasal 31 ayat (2)</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertambangan minyak dan gas bumi meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Babelan; b. Kecamatan Cibitung; c. Kecamatan Tambun Utara; d. Kecamatan Tambun Selatan; e. Kecamatan Cikarang Timur; f. Kecamatan Cibarusah; g. Kecamatan Cabangbungin; h. Kecamatan Sukawangi; i. Kecamatan Sukakarya; j. Kecamatan Cikarang Utara; k. Kecamatan Karang Bahagia.</p> <p>Pasal 32 ayat (2)</p> <p>Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Cikarang Pusat; b. Kecamatan Cikarang Utara; c. Kecamatan Cikarang Selatan; d. Kecamatan Cikarang Timur; e. Kecamatan Cikarang Barat; f. Kecamatan Tarumajaya; g. Kecamatan Cabangbungin; h. Kecamatan Babelan; i. Kecamatan Sukawangi.</p> <p>Pasal 34 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf g</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 13.918 Ha; b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 42.815 Ha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cibitung; 2. Kecamatan Karang Bahagia; 3. Kecamatan Tambun Utara; 4. Kecamatan Sukatani; 5. Kecamatan Sukawang; 6. Kecamatan Cikarang Timur; 7. Kecamatan Cikarang Pusat; 8. Kecamatan tambun Selatan; 9. Kecamatan Serang Baru; 10. Kecamatan Setu; 11. Kecamatan Cikarang Selatan; 12. Kecamatan Cikarang Barat. c. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 4.060 Ha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Babelan; 2. Kecamatan Muaragembong; 3. Kecamatan Cabangbungin; 4. Kecamatan Cibarusah; 5. Kecamatan Bojongmangu 6. Kecamatan Serang Baru. (2) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan hunian vertikal berupa rusunami dan rusunawa dipertataan dan kawasan industri; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. pengembangan permukiman mandiri; dan</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.</p> <p>(3) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk:</p> <p>a. Pengembangan hunian horizontal; dan</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Babelan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan peruntukan pesisir dan laut meliputi:</p> <p>a. Pengembangan permukiman nelayan;</p> <p>b. Bisnis kelautan.</p> <p>(3) Pengembangan kawasan permukiman nelayan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Tarumajaya.</p> <p>(4) Pengembangan kawasan bisnis kelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diarahkan untuk:</p> <p>a. Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan di Muara Bendera Kecamatan Muaragembong;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. Pengembangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan.</p> <p>c. Pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>d. Pengembangan kawasan pertambangan migas di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>e. Pembangunan terminal khusus Marunda Centre di Kecamatan Tarumajaya; dan</p> <p>f. Pengembangan prasarana pendukung industri pengolahan pertambangan.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf a.7</p> <p>Pembangunan prasarana transportasi laut meliputi:</p> <p>a) pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;</p> <p>b) pembangunan pelabuhan nelayan dan perumahan nelayan dengan sarana pendukungnya di Muara Bendera, Kecamatan Muaragembong;</p> <p>c) pembangunan kawasan pariwisata di pantai Sederhana- Pantai bahagia;</p> <p>d) pembangunan pusat pendidikan terapan dalam rangka menunjang perkembangan wilayah Pantai Utara seluas 20 Ha.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 41 ayat (1) huruf a.8 Pembangunan Bandar udara di Kecamatan Muaragembong.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf c Pembangunan prasarana sumberdaya air meliputi: 1. peningkatan pelayanan jaringan air bersih; 2. penyediaan air baku dengan peningkatan pengelolaan situ; 3. pembangunan prasarana pengendalian banjir.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf e.4 Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP).</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf e.5 Pengembangan pengolahan air limbah yang memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan system yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri secara terpusat terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri.</p> <p>Pasal 49 Ketentuan umum peraturan zonasi pada system jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) e, meliputi: a. pemanfaatan ruang pada kawasan di</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;</p> <p>d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas Negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Negara/provinsi yang berbatasan.</p> <p>Pasal 52</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</p> <p>b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</p> <p>c. Penerapan zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinya;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;</p> <p>e. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;</p> <p>f. Mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;</p> <p>g. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam;</p> <p>h. Pengolahan lahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.</p> <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dan berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;</p> <p>b. Melarang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai;</p> <p>c. Mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. Pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti; Permukiman perkotaan dan pedesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;</p> <p>e. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;</p> <p>f. Bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower penjaga keselamatan pengujung pantai;</p> <p>g. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan filtrasi air laut kedalam tanah;</p> <p>h. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;</p> <p>i. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek wisata dan penelitian;</p> <p>j. Pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;</p> <p>k. Inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKIBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>l. Penunjukan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;</p> <p>m. Rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;</p> <p>n. Perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;</p> <p>o. Pengembangan kawasan penati berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>p. Koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 %.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Pemempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;</p> <p>b. Pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;</p> <p>c. Pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;</p> <p>d. Melarang pembuangan limbah industri ke sungai;</p> <p>e. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKRBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>f. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>g. Perlindungan sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;</p> <p>h. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;</p> <p>i. Waduk yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;</p> <p>j. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;</p> <p>k. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;</p> <p>l. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;</p> <p>m. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;</p> <p>b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;</p> <p>c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>d. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik;</p> <p>e. Ketentuan pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundangan;</p> <p>f. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.</p> <p>(g) Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan;</p> <p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;</p> <p>b. Melesterikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;</p> <p>c. Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;</p> <p>d. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;</p> <p>e. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</p> <p>f. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;</p> <p>g. Penetapan batas dataran banjir;</p> <p>h. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;</p> <p>i. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.</p> <p>(10) Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan;</p> <p>a. Pendekatan rekayasa struktur dengan cara system polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan;</p> <p>b. Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.</p> <p>Pasal 53</p> <p>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP BIO FISIK DAN SOSEKUBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah; b. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan energi; c. Pembatasan kawasan budidaya tambak dengan atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan system tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan selain kegiatan konservasi, pendidikan, dan pelatihan; e. Ketentuan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di kawasan pesisir, serta penurunan luasan kawasan kumuh; f. Ketentuan penyediaan infrastruktur pendukung bagi bisnis kelautan dan wisata bahari; g. Ketentuan pengaturan dan penataan kawasan bisnis kelautan dan wisata bahari. 	

5.2 Sinkronisasi Kebijakan

5.2.1 Rencana Kebijakan antar Sektor

Sinkronisasi antar sektor : Pipa gas, Telkom, PLTU, Prasarana

5.2.2 Rencana Kebijakan antar Daerah

Sinkronisasi antar daerah : reklamasi, pelabuhan samudra, pelabuhan nelayan antar daerah

5.2.3 Rencana Kebijakan antara Sektor dengan Daerah

Sinkronisasi antar sektor dengan daerah : PLN dengan Reklamasi



0

PENGANTAR

Dokumentasi foto ini merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta, mulai dari persiapan Tim, pelibatan masyarakat dalam Seminar/*Focus Group Discussion* (FGD) serta Workshop yang dilakukan di tiga Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi.

Tim KLHS Teluk Jakarta

KONSOLIDASI DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN KLHS TELUK JAKARTA

OKTOBER-NOVEMBER 2010



Rapat Konsolidasi TIM KLHS Teluk Jakarta bersama Asisten Deputi Kajian Wilayah dan Sektor (gambar atas dan bawah)



RAPAT KOORDINASI DENGAN KABUPATEN BEKASI



12 NOVEMBER 2010



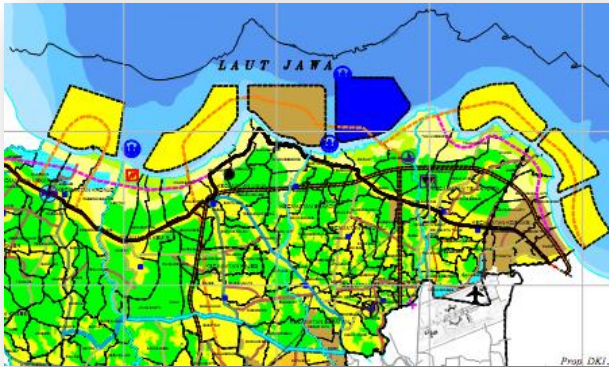


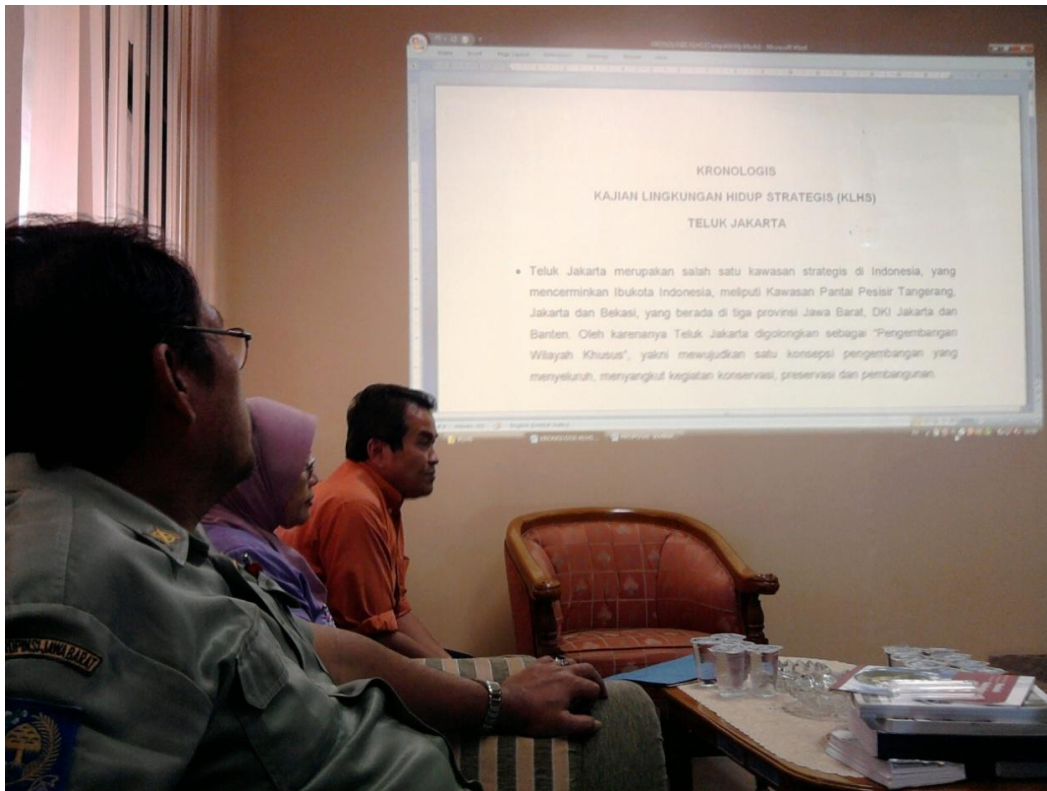
Rapat koordinasi dengan Pemkab Bekasi di Kantor Bappeda Kab. Bekasi. Persiapan awal Tim KLHS Teluk Jakarta di daerah (gambar atas dan bawah)



RAPAT KOORDINASI DENGAN KABUPATEN TANGERANG

15 NOVEMBER 2010





Rapat koordinasi dengan Pemkab Tangerang di Kantor Dinas Tata Ruang Kab Tangerang. Persiapan awal Tim KLHS Teluk Jakarta di daerah (gambar atas dan bawah)



RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMPROV. DKI JAKARTA

18 NOVEMBER 2010





Rapat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Persiapan awal Tim KLHS Teluk Jakarta di Prov. DKI Jakarta (gambar atas dan bawah)



SEMINAR/FGD KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TELUK JAKARTA (PANTURA TANGERANG, JAKARTA DAN BEKASI)

23-24 November 2010





Persiapan sebelum seminar, tampak fasilitator dan TIM KLHS Daerah di ruang sekretariat seminar di gedung BKSP (gambar atas)

Ir. Dana Kartakusuma, M. Sc membuka acara seminar awal di gedung BKSP (gambar bawah)





Suasana waktu seminar/fGD KLHS Teluk Jakarta di gedung BKSP (gambar atas dan bawah)





Paparan dari instansi-instansi terkait (gambar atas dan bawah)



Sesi Tanya Jawab Seminar/FGD



Sesi tanya jawab seminar/FGD KLHS Teluk Jakarta (gambar atas dan bawah)





Suasana diskusi pada pelaksanaan Seminar/FGD





Pelaksanaan Seminar/FGD di gedung BKSP Sunter



WORKSHOP KABUPATEN BEKASI

Desember 2010



Workshop di Kabupaten Bekasi. Suasana workshop di Kabupaten Bekasi (gambar atas dan bawah)



WORKSHOP DKI JAKARTA

Desember 2010



Sekretaris Bappeda Prov. DKI Jakarta Ir. Adi Subroto (tengah) memimpin workshop di dampingi pembicara.
Pelaksanaan Workshop di DKI Jakarta (gambar bawah)





Diskusi kelompok II Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi pada saat Workshop KLHS Teluk Jakarta di DKI Jakarta (gambar atas)

Suasana diskusi kelompok I bidang Lingkungan Bio Fisik (gambar bawah)



WORKSHOP KABUPATEN TANGERANG

Desember 2010



Gambar atas. Pelaksanaan workshop di Kabupaten Tangerang. tampak dari Kanan, Ir. Budirama Natakusumah, MM. Ir. Arie D Djoekardi, MA. H. Didin Samsudin dan Akip Syamsudin.

Suasana workshop KLHS Teluk Jakarta di Kabupaten Tangerang, (gambar bawah)





Diskusi kelompok I bidang Lingkungan Bio Fisik pada acara workshop KLHS Teluk Jakarta di Kabupaten Tangerang. (gambar atas dan bawah)





Diskusi kelompok II bidang Sosial Budaya dan Ekonomi pada acara workshop KLHS Teluk Jakarta di Kabupaten Tangerang (gambar atas dan bawah)



RAPAT EVALUASI HASIL WORKSHOP DAN REKOMENDASI KLHS TELUK JAKARTA

Desember 2010



Rapat Tim KLHS Teluk Jakarta, membahas rekomendasi KLHS Teluk Jakarta





Membahas Rekomendasi KLHS Teluk Jakarta



REKOMENDASI HASIL KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP KABUPATEN BEKASI

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p><i>RTRW 2010-2030</i></p> <p style="text-align: center;">BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 37</p> <p>(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);</p> <p>(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KSN Jabodetabekpunjur;</p> <p>(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. KSP Koridor Bekasi-Cikampek;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. KSP Pertanian Lahan Basah dan Beririgasi Teknis Pantura;</p>	<p>Raperda RTRW Kabupaten Bekasi 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>A. Land Subsidence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada kebijakan tentang pengendalian pembangunan dan pemanfaatan air bawah tanah sehingga dapat diantisipasi walaupun saat ini belum dirasakan dampaknya <p>B. Rob dan Kenaikan Muka Air Laut</p> <p>Perlu ada ketentuan mengenai strategi penanggulangan rob/kenaikan muka air laut</p> <p>C. Banjir/Genangan</p> <p>Pasal 52 ayat (9) perlu</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. KSP Pesisir Pantura.</p> <p>(4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :</p> <p>1. Kawasan yang berpotensi menjadi perekonomian kegiatan tinggi meliputi kawasan :</p> <p>a) Tambun Selatan</p> <p>b) Cibitung</p> <p>c) Cikarang Utara</p> <p>d) Cikarang Selatan</p> <p>e) Cikarang Timur</p> <p>f) Cikarang Barat</p> <p>g) Cikarang Pusat</p> <p>h) Babelan</p> <p>i) Tarumajaya</p> <p>j) Sukawangi, dan</p> <p>k) Cabangbungin</p> <p>2. Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian meliputi kawasan :</p> <p>a) Sukatani</p>	<p>ditambahkan Huruf j. Penerapan teknologi lahan basah bagi permukiman rawan banjir.</p> <p>D. Degradasi Ekosistem Mangrove</p> <p>Adanya inkonsistensi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung di Kec. Muaragembong, sehingga perlu penataan kembali sesuai PerPres no. 54 tahun 2008.</p> <p>E. Sedimentasi</p> <p>Perlu ada kebijakan untuk status kepemilikan tanah timbul.</p> <p>F. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri</p> <p>Perlu dimasukkan penambahan pasal mengenai pengelolaan limbah domestik.</p> <p>G. Pemanfaatan Ruang Laut</p> <p>Tidak ada pemanfaatan ruang</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b) Karang Bahagia</p> <p>c) Pebayuran</p> <p>d) Kedungwaringin</p> <p>e) Tambelang</p> <p>f) Sukawangi</p> <p>g) Cabangbungin</p> <p>b. KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah KSK Muaragembong;</p> <p>c. KSK bidang sosial dan budaya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSK Cikarang Pusat; dan 2. Kecamatan Babelan. <p>d. KSK bidang kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, berupa sumber alam minyak dan gas bumi meliputi kawasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambun Selatan 2. Babelan 3. Cabangbungin 4. Sukawangi 5. Karang Bahagia 6. Cikarang Timur 	<p>laut (reklamasi).</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>7. Pebayuran</p> <p>8. Muaragembong</p> <p>9. Tarumajaya</p> <p>10. Cibarusah.</p> <p>(5) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>Pasal 8 ayat (4)</p> <p>Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>b. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air untuk meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; suplay air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>f. mengoptimalkan pendayagunaan pengelolaan dan <u>pengembangan</u> sumberdaya air untuk meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; suplay air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan.</p> <p>Pasal 8 ayat (5)</p> <p>Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :</p> <p>a. meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan air minum sistem perpipaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di kawasan perkotaan.</p> <p>b. mengembangkan system</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pengelolaan persampahan dengan teknik dan metoda yang berwawasan lingkungan;</p> <p>c. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pengelolaan berbasis masyarakat melalui integrasi 3R dengan prinsip berkelanjutan, mandiri dan tuntas ditempat secara mandiri dan berkesinambungan;</p> <p>d. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan sampah;</p> <p>e. mengembangkan prasarana drainase;</p> <p>f. meningkatkan upaya mitigasi dalam mengantisipasi potensi bencana di Kabupaten.</p> <p>Pasal 8 ayat (6) Strategi peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :</p> <p>a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan dan merehabilitasi secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;</p> <p>Pasal 8 ayat (7)</p> <p>Strategi optimalisasi pendayagunaan kawasan budidaya secara sinergi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi :</p> <p>b. mempertahankan kawasan pertanian lahan basah dan/atau beririgasi teknis;</p> <p>c. mengendalikan alih fungsi</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>lahan basah sawah menjadi kegiatan budi daya lainnya;</p> <p>d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan hunian vertical bersubsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah di kawasan perkotaan untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh perkotaan;</p> <p>Pasal 12 ayat (6)</p> <p>Rencana pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b berupa pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;</p> <p>Pasal 17 ayat (3)</p> <p>Pengembangan jaringan air baku</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>untuk air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c meliputi :</p> <p>a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA), meliputi IPA Babelan, IPA Tegal Gede, IPA Sukatani, IPA Cabangbungin, IPA Cibirusah, IPA Cikarang Baru, IPA Cikarang Lippo, Deep Well Setu, Deep Well Lemahabang, IPA Tanah Baru, IPA Tambun Selatan, IPA Tambun Utara dan IPA Tambelang;</p> <p>b. peningkatan jangkauan distribusi pelayanan jaringan air minum dengan sistem perpipaan hingga enam puluh persen; dan</p> <p>c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 17 Ayat (4)</p> <p>Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. normalisasi sungai; b. pembangunan banjir kanal; c. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul); d. pembangunan dan pengembangan pintu air; e. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman; f. penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; g. penanaman pohon di sempadan sungai, situ, rawa dan lahan-lahan kritis. <p>Pasal 18</p> <p>(1) Rencana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana pengelolaan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>persampahan; b. prasarana pengelolaan limbah; c. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi; dan d. prasarana jaringan drainase.</p> <p>(2) Rencana prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <p>a. peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng Kecamatan Setu; b. peningkatan dan pembangunan Tempat Pemampungan Sementara (TPS) dengan pengelolaannya secara merata di setiap Kecamatan; c. penerapan 3R (Recycle, Reuse, Reduce) dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah (domestic, niaga, industry</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan lain-lain); dan</p> <p>d. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah tersendiri.</p> <p>(3) Rencana prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :</p> <p>a. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan industri;</p> <p>b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan;</p> <p>c. pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri B-3 dengan alternatif di Desa Bojongmangu Kecamatan Bojongmangu.</p> <p>(4) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalur evakuasi dari ancaman bencana</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>menuju ruang evakuasi meliputi :</p> <p>a. jalur evakuasi bencana alam gelombang pasang/abrasi di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana gelombang pasang/abrasi;</p> <p>b. jalur evakuasi bencana alam banjir menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi bencana meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Muaragembong 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan babelan; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kecamatan Cabangbungin; 5. Kecamatan Sukakarya; 6. Kecamatan Sukawang; 7. Kecamatan Cikarang Utara; 8. Kecamatan Cikarang Timur; 9. Kecamatan Pebayuran; 10. Kecamatan Kedungwaringin. <p>Pasal 20 ayat (1)</p> <p>Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 5.449 Ha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan kawasan hutan lindung; b. mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan; c. merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan hutan lindung; dan d. mengembangkan ekowisata 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan agroforestri.</p> <p>Pasal 22 ayat (3)</p> <p>Penetapan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 566 Ha tersebar di :</p> <p>a. Kecamatan Babelan;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Muaragembong.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c, terdapat di kawasan mangrove Kecamatan Muaragembong dengan luas kurang lebih 5.311 Ha atau sekitar kurang lebih 4 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten.</p> <p>Pasal 24</p> <p>Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <p>a. kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. kawasan rawan bencana banjir, yang terjadi di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan tambun Utara; 2. Kecamatan Tambun Selatan; 3. Kecamatan Tarumajaya; 4. Kecamatan Cibitung; 5. Kecamatan Cikarang Timur; 6. Kecamatan Cikarang Utara; 7. Kecamatan Cabangbungin; 8. Kecamatan Kedungwaringin; 9. Kecamatan Pebayuran; 10. Kecamatan Sukakarya; 11. Kecamatan Sukatani; 12. Kecamatan Sukawangi; 13. Kecamatan Tambelan; 14. Kecamatan babelan. <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>20 ayat (2) huruf e meliputi :</p> <p>a. Kawasan rawan bencana alam geologi abrasi di Kecamatan Muaragembong.</p> <p>b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.</p> <p>Pasal 30 ayat (2) dan (3)</p> <p>(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <p>a. Kecamatan tarumajaya;</p> <p>b. Kecamatan Babelan; dan</p> <p>c. Kecamatan Muaragembong.</p> <p>(3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Cikarang Pusat;</p> <p>d. Kecamatan Bojongmangu;</p> <p>e. Kecamatan Setu;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>f. Kecamatan Serang Baru; g. Kecamatan Cikarang Selatan; h. Kecamatan Sukakarya; i. Kecamatan Tambun Selatan.</p> <p>Pasal 31 ayat (2)</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertambangan minyak dan gas bumi meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Babelan; b. Kecamatan Cibitung; c. Kecamatan Tambun Utara; d. Kecamatan Tambun Selatan; e. Kecamatan Cikarang Timur; f. Kecamatan Cibarusah; g. Kecamatan Cabangbungin; h. Kecamatan Sukawang; i. Kecamatan Sukakarya; j. Kecamatan Cikarang Utara; k. Kecamatan Karang Bahagia.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 32 ayat (2)</p> <p>Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Cikarang Pusat; b. Kecamatan Cikarang Utara; c. Kecamatan Cikarang Selatan; d. Kecamatan Cikarang Timur; e. Kecamatan Cikarang Barat; f. Kecamatan Tarumajaya; g. Kecamatan Cabangbungin; h. Kecamatan Babelan; i. Kecamatan Sukawangi.</p> <p>Pasal 34 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf g meliputi :</p> <p>a. Lokasi kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 13.918 Ha; b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 42.815</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cibitung; 2. Kecamatan Karang Bahagia; 3. Kecamatan Tambun Utara; 4. Kecamatan Sukatani; 5. Kecamatan Sukawang'i; 6. Kecamatan Cikarang Timur; 7. Kecamatan Cikarang Pusat; 8. Kecamatan tambun Selatan; 9. Kecamatan Serang Baru; 10. Kecamatan Setu; 11. Kecamatan Cikarang Selatan; 12. Kecamatan Cikarang Barat. <p>c. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 4.060 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Babelan; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>2. Kecamatan Muaragembong;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kecamatan Cabangbungin; 4. Kecamatan Cibirusah; 5. Kecamatan Bojongmangu 6. Kecamatan Serang Baru. <p>(2) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan hunian vertikal berupa rusunami dan rusunawa dipertataan dan kawasan industri; b. pengembangan kawasan permukiman mandiri; dan c. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman. <p>(3) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan hunian 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>horizontal; dan</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Muaragembong;</p> <p>b. Kecamatan Tarumajaya;</p> <p>c. Kecamatan Babelan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan peruntukan pesisir dan laut meliputi:</p> <p>a. Pengembangan permukiman nelayan;</p> <p>b. Bisnis kelautan.</p> <p>(3) Pengembangan kawasan permukiman nelayan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Tarumajaya.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(4) Pengembangan kawasan bisnis kelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan di Muara Bendera Kecamatan Muaragembong; b. Pengembangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan. c. Pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Muaragembong; d. Pengembangan kawasan pertambangan migas di Kecamatan Muaragembong; e. Pembangunan terminal khusus Marunda Centre di Kecamatan Tarumajaya; dan f. Pengembangan prasarana pendukung industri 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pengolahan pertambangan.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf a.7</p> <p>Pembangunan prasarana transportasi laut meliputi:</p> <p>a) pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;</p> <p>b) pembangunan pelabuhan nelayan dan perumahan nelayan dengan sarana pendukungnya di Muara Bendera, Kecamatan Muaragembong;</p> <p>c) pembangunan kawasan pariwisata di pantai Sederhana-Pantai bahagia;</p> <p>d) pembangunan pusat pendidikan terapan dalam rangka menunjang perkembangan wilayah Pantai Utara seluas 20 Ha.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 41 ayat (1) huruf a.8 Pembangunan Bandar udara di Kecamatan Muaragembong.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf c Pembangunan prasarana sumberdaya air meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan pelayanan jaringan air bersih; 2. penyediaan air baku dengan peningkatan pengelolaan situ; 3. pembangunan prasarana pengendalian banjir. <p>Pasal 41 ayat (1) huruf e.4 Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP).</p> <p>Pasal 41 ayat (1) huruf e.5 Pengembangan pengolahan air limbah yang memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>system yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri secara terpusat terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri.</p> <p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi pada system jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) e, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas Negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Negara/provinsi yang berbatasan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</p> <p>b. Penyediaan sumur resapan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</p> <p>c. Penerapan zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;</p> <p>d. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;</p> <p>e. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;</p> <p>f. Mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;</p> <p>g. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>h. Pengolahan lahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.</p> <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dan berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;</p> <p>b. Melarang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dasar pantai;</p> <p>c. Mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;</p> <p>d. Pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti; Permukiman perkotaan dan pedesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;</p> <p>e. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;</p> <p>f. Bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>g. Pemanfaatan ruang untuk pantai; kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan filtrasi air laut kedalam tanah;</p> <p>h. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;</p> <p>i. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek wisata dan penelitian;</p> <p>j. Pengembangan fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;</p> <p>k. Inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove;</p> <p>l. Penunjukan, penatabatasan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;</p> <p>m. Rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;</p> <p>n. Perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;</p> <p>o. Pengembangan kawasan penati berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>p. Koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 %.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>a. Pemertahanan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;</p> <p>b. Pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;</p> <p>c. Pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;</p> <p>d. Melarang pembangunan limbah industri ke sungai;</p> <p>e. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p> <p>f. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>g. Perlindungan sekitar</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;</p> <p>h. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;</p> <p>i. Waduk yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;</p> <p>j. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;</p> <p>k. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;</p> <p>l. Pendirian bangunan dibatasi</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;</p> <p>m. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :</p> <p>a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;</p> <p>b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;</p> <p>c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>d. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>e. Ketentuan pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundangan;</p> <p>f. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.</p> <p>(9) Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan;</p> <p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;</p> <p>b. Melesterikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;</p> <p>c. Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;</p> <p>d. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;</p> <p>e. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</p> <p>f. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;</p> <p>g. Penetapan batas dataran banjir;</p> <p>h. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>rendah;</p> <p>i. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.</p> <p>(10) Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan;</p> <p>a. Pendekatan rekayasa struktur dengan cara system polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan;</p> <p>b. Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.</p> <p>Pasal 53</p> <p>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir dan laut</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah; b. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan energi; c. Pembatasan kawasan budaya tambak dengan atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan system tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan selain kegiatan konservasi, pendidikan, dan pelatihan; e. Ketentuan peningkatan 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah terpinggirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p> kualitas lingkungan permukiman serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di kawasan pesisir, serta penurunan luasan kawasan kumuh; </p> <p>f. Ketentuan penyediaan infrastruktur pendukung bagi bisnis kelautan dan wisata bahari;</p> <p>g. Ketentuan pengaturan dan penataan kawasan bisnis kelautan dan wisata bahari.</p>	

REKOMENDASI HASIL KLHS TELUK JAKARTA DALAM KRP PROVINSI DKI JAKARTA

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p>Kawasan Strategis Pantura</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Kawasan strategis Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu yang bersamasama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.</p> <p>(2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan kepelabuhanan, kepentingan kawasan berbudaya, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut</p>	<p>Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>A. Land Subsidence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian terhadap kondisi geologi di kawasan Pantura menunjukkan penurunan muka tanah rata-rata 3-5 cm/tahun atau 60 – 100 cm per 20 tahun (hasil studi JWRMS periode tahun 1970-1990 an). Oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan pengendalian hingga pelarangan penggunaan air tanah, sedangkan untuk penyediaan air bersih dilakukan melalui sistem perpipaan.

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan pantura.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Penyelenggaraan reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.</p> <p>(2) Penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem</p>	<p>B. 'Rob' dan Kenaikan Muka Air Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu perbaikan tanggul yang ada untuk mengatasi masalah 'rob' khususnya di daerah rawan banjir 'rob' • Adanya penurunan muka tanah 5-10 cm/tahun di pesisir (hasil studi JCDS tahun 2000-2010) sehingga perlu diantisipasi oleh pengembangan reklamasi memanfaatkan tanggul reklamasi sekaligus sebagai antisipasi banjir 'rob' di daratan <p>C. Banjir/ Genangan (Sistem Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditangani dan diprioritaskan penanganan masalah genangan air yang terjadi dan banjir • Perlu dilakukan pengoptimalan rumah pompa dan dalam pembuatan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.</p> <p>(3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura harus menjamin:</p> <p>a. terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut;</p> <p>b. pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum;</p> <p>c. kepentingan perikehidupan</p>	<p>tanggul perlu diperhitungkan kenaikan muka laut + 5 mm/tahun akibat pengaruh iklim global</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan banjir/genangan perlu terintegrasi dalam sistem makro Jakarta, dengan prinsip : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem tata air Jakarta 2030 (<i>upstream to downstream</i>) <p>Air ditahan di dataran tinggi (Puncak), disimpan dalam situ/waduk di kawasan Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan.</p> <p>Dari Banjir Kanal ke arah Utara menggunakan sistem polder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan rasio badan air (<i>water body ratio</i>) hingga lebih dari 5%. 3. Rencana teknis pengendalian banjir : <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan kapasitas

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. nelayan; kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah;</p> <p>e. kepentingan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanan negara;</p> <p>f. terselenggaranya pengembangan sistem prasarana sumber daya air secara terpadu;</p> <p>g. tidak memberikan tambahan resiko banjir di daerah hulunya baik akibat rob, kenaikan permukaan laut/sungai; dan</p> <p>h. terselenggara/berfungsinya objek/instalasi vital di kawasan Pantura dengan memperhatikan aspek-aspek ekologis lingkungan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek sebagai berikut:</p> <p>a. peningkatan fungsi Pelabuhan;</p>	<p>saluran makro</p> <p>b. Pembangunan Banjir Kanal Timur</p> <p>c. Pembangunan Cengkareng Drain</p> <p>d. Sodetan BKT-BKB</p> <p>e. Pengerukan dan pelebaran sungai</p> <p>f. Perbaikan pintu air</p> <p>g. Penambahan dan perbaikan sistem sub-makro</p> <p>h. Perbaikan sistem mikro</p> <p>i. Pengembangan sumur resapan</p> <p>j. Pembangunan bangunan penahan lumpur</p> <p>k. Pengembangan tanggungan setempat (OSD : on-site stormwater detention)</p> <p>l. Pembangunan Lubang Resapan Biopori</p> <p>4. Upaya non teknis pengendalian banjir :</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi;</p> <p>c. pengembangan areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk pusat wisata, pusat perdagangan/jasa, dan pelayanan rakyat secara terbatas;</p> <p>d. dilaksanakan serasi dengan penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu;</p> <p>e. pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan konservasi nilai budaya daerah dan bangsa serta kebutuhan wisata nasional dan internasional; dan</p> <p>f. didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura sebagaimana dimaksud</p>	<p>a. Basis wilayah aliran sungai (hulu/penahan – tengah/storage – hilir/penampungan)</p> <p>b. Pembatasan penggunaan airtanah</p> <p>c. Pengembangan situ dan waduk</p> <p>d. Pengembangan dan pemanfaatan bantaran sungai</p> <p>e. Redevelopment kawasan perumahan</p> <p>f. Pengendalian pembangunan limbah dan sampah ke dalam sungai dan laut</p> <p>g. Penertiban bangunan di atas aliran sungai</p> <p>h. Konservasi DAS</p> <p>D. Abrasi dan Kerusakan Pantai</p> <p>Perlu penanggulangan abrasi dan kerusakan pantai</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dalam Pasal 99, dibagi menjadi beberapa sub-kawasan dengan memperhatikan kondisi kawasan daratan Pantura dan perairan di sekitarnya.</p> <p>(2) Sub-kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan perencanaan yang dikembangkan dengan sistem infrastruktur terpadu.</p> <p>Pasal 101</p> <p>(1) Sistem prasarana sumber daya air di kawasan reklamasi Pantura merupakan bagian dari sistem prasarana sumber daya air makro dan jalur perpanjangan saluran dan sungai yang melalui kawasan daratan pantai.</p> <p>(2) Untuk mencegah banjir yang mungkin pengembangan kawasan Pantura harus</p>	<p>E. Degradasi Ekosistem Mangrove</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kebijakan yang jelas tentang peruntukkan dan rehabilitasi mangrove termasuk upaya pemeliharaan/perindungan serta lokasinya dengan memperhatikan karakteristik habitat mangrove di Pantura Jakarta • Perlu kebijakan pertanian mengingat banyaknya daerah hutan mangrove yang sudah tergerus (abrasi) mengakibatkan kemunduran garis pantai, dimana didaerah sekitarnya terdapat tanah milik masyarakat yang menimbulkan masalah pertanian/ bukti kepemilikan <p>F. Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih (Rencana Sistem</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>mengembangkan sistem jaringan drainase dan sistem pengendalian banjir yang direncanakan secara teknis termasuk waduk penampungan air dengan rasio minimal per pulauanya sebesar 5%.</p> <p>(3) Waduk penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai ruang terbuka.</p> <p>Pasal 102</p> <p>(1) Penyediaan air bersih di kawasan Pantura dilakukan dengan cara-cara ramah lingkungan dan mengarah kepada <i>sustainable solution</i> dengan memanfaatkan alternatif sumber air baku baru dan dilengkapi dengan sistem jaringan perpipaan secara terpadu.</p> <p>(2) Pengelolaan penyediaan air</p>	<p>dan Jaringan Air Bersih)</p> <p>Penyediaan air bersih DKI Jakarta sebagian besar didukung beberapa sumber air baku di luar Jakarta, yaitu Waduk Jatiluhur, terletak sekitar 60 km di sebelah Timur Jakarta, mata air Ciburial berlokasi sekitar 60 km di Selatan Jakarta, Sungai Ciliwung, Sungai Cilandak, Sungai Krukut, Sungai Pesanggrahan, dan air curah dari IPA Cisadane milik PDAM Kabupaten Tangerang yang berlokasi sekitar 30 km di sebelah Tenggara Jakarta. Air dari Waduk Jatiluhur yang dikelola Otorita Jatiluhur disalurkan ke IPA Buaran melalui Kanal Tarum Barat, IPA Cisadane dimiliki oleh Pemda Kabupaten Tangerang, dan mata air Ciburial dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bogor.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri dengan mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang ada dan/atau membangun sistem pengolahan teknologi yang baru.</p> <p>Pasal 103</p> <p>(1) Limbah cair rumah tangga dan/atau limbah cair yang bersumber dari kegiatan lain wajib memenuhi baku mutu limbah cair yang pengelolaannya dilakukan dengan cara modul dan/atau terpusat.</p> <p>(2) Limbah cair yang memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan ke saluran umum dan tidak berakibat pada penurunan kualitas air laut,</p>	<p>Penyediaan air bersih DKI Jakarta dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) bermitra dengan swasta, yaitu PT Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk wilayah Barat dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) yang kini menjadi PT Aetra Air Jakarta untuk wilayah Timur, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) hingga tahun 2023, sedangkan penyediaan air bersih wilayah Kota Pantai Utara direncanakan dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Peningkatkan pelayanan air bersih direncanakan seluruhnya dengan sistem perpipaan kota secara bertahap untuk membatasi penggunaan airtanah dalam guna menghindari amblesan tanah dan intrusi air laut. Penyediaan air bersih perpipaan direncanakan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 104</p> <p>(1) Pengembangan kawasan Pantura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana teknik reklamasi; b. rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi; c. rencana rancang bangun; d. rencana penyediaan prasarana dan sarana; e. analisis dampak lingkungan; f. rencana kelola lingkungan; g. rencana pemantauan lingkungan; h. rencana lokasi pengambilan bahan material; i. rencana pembiayaan; dan j. rencana pengelolaan air bersih 	<p>meningkat menjadi 80% pada tahun 2015 dan 100% pada akhir tahun rencana.</p> <p>Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka perlu :</p> <p>1. Arahkan pengembangan sistem dan jaringan air bersih meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sumber air permukaan sebagai air baku air bersih untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta dengan tingkat konsumsi sebesar 150 liter/orang/hari b. Pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan air bersih c. Akses pelayanan air bersih dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas produksi air bersih dari sumber air eksisting untuk memenuhi kebutuhan air

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan air limbah serta pengendalian banjir.</p> <p>(2) Pengembangan dan perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena kenaikan muka air laut, penurunan muka air tanah dan muka tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara serta persoalan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan dan air tanah;</p> <p>b. reklamasi dilakukan dalam bentuk pulau yang ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci dengan memperhitungkan masa perancangan, keadaan tanggul dan perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pada masa mendatang; • Optimalisasi pengoperasian jaringan distribusi baru pada instalasi pengolahan air yang ada dan yang akan dibangun; • Pembangunan waduk di bagian Selatan Jakarta sebagai pengendali banjir sekaligus pemasok air baku; dan • Pemanfaatan sumber-sumber alternatif air baku, seperti desalinisasi d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan jaringan distribusi di bagian Utara terkait pengembangan kawasan Pantura Jakarta dan kawasan Marunda; • Pengembangan jaringan distribusi air bersih ke

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pesisir, resiko banjir, dan tindakan mitigasi, perlindungan hutan bakau, serta jalur lalu lintas laut, pelayaran dan pelabuhan;</p> <p>c. dalam perencanaan reklamasi tercakup rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengendalian sungai/kanal;</p> <p>d. setiap pulau reklamasi menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau yang berfungsi sebagai penampungan air sementara ketika hujan, persediaan air untuk beberapa kebutuhan harian sumber air yang mungkin untuk di kembalikan ke dalam lapisan aquifer, tempat hidupnya beberapa flora dan fauna, serta untuk</p>	<p>wilayah Barat dan Timur DKI Jakarta untuk mendukung orientasi pengembangan kota; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan hidran umum pada bagian kota yang berpenduduk padat <p>2. Arahkan sistem konservasi sumber daya air meliputi :</p> <p>a. Rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berada di Kawasan Jabodetabekpunjur mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur</p> <p>b. Rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi didasarkan pada indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual</p> <p>c. Pola ruang DKI Jakarta didasarkan pada prinsip berikut:</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>e. rekreasi; dan ruang perairan di antara pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir;</p> <p>Pasal 105</p> <p>(1) Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan:</p> <p>a. relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi pemerintah sekitar; pemertintahan sekitar;</p> <p>b. revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah; dan</p> <p>c. perbaikan lingkungan, pemeliharaan kawasan permukiman dan kampung nelayan;</p> <p>d. peremajaan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan;</p> <p>e. peningkatan sistem pengendalian banjir dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi sumber daya air untuk memelihara keberlanjutan sumber daya air; • Pengendalian penurunan muka tanah melalui pengendalian penggunaan dan kerusakan tata airtanah; • Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; • Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ○ pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; ○ pengendalian

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pemeliharaan sungai untuk mengantisipasi banjir akibat rob dan meluapnya air sungai;</p> <p>f. perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan;</p> <p>g. relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun;</p> <p>h. pelestarian hutan bakau dan hutan lindung;</p> <p>i. perluasan dan peningkatan fungsi Pelabuhan; dan</p> <p>j. Pengembangan pantai untuk kepentingan umum.</p> <p>(2) Pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau dari hasil usaha pengelolaan tanah hasil reklamasi.</p>	<p>pemanfaatan sumber air;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ pengaturan daerah sempadan sumber air; ○ pengisian air pada sumber air; ○ perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan di sekitarnya <p>– Pengawetan air dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ menyimpan air yang berlebihan pada saat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan; ○ menghemat air dengan pemakaian yang efisien; ○ mengendalikan penggunaan airtanah <p>– Pengendalian pencemaran air serta pengaturan prasarana</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 106</p> <p>(1) Persebaran lokasi kawasan strategis sebagai dimaksud pada pasal 96 sampai dengan pasal 105, termuat pada Gambar 21 Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penataan ruang kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 105, diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur rencana rinci kawasan Pantura.</p>	<p>dan sarana sanitasi perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai <p>G. Sedimentasi</p> <p>-</p> <p>H. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri (Rencana Pengelolaan Air Limbah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada upaya perlindungan air permukaan dari berbagai polutan khususnya sampah. • Pengendalian pencemaran akibat limbah domestik perlu

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara</p> <p>Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah</p> <p>Pasal 118</p> <p>(1) Pusat kegiatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, di Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kantor Walikota Jakarta Utara sebagai pelayanan fungsi khusus;</p> <p>b. Kawasan Sunter sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran;</p> <p>c. Kawasan Pasar Koja sebagai fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkaan pelayanannya; dan</p> <p>.Kawasan Pasar Pluit sebagai pusat perdagangan, jasa dan perkantoran;</p>	<p>didasarkan pada rencana pengelolaan air limbah DKI Jakarta sesuai master plan air limbah yang disusun pada tahun 1991, diperbaiki pada tahun 2001 dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2009.</p> <p>1. Master Plan Air Limbah Jakarta Tahun 1991</p> <p>Dalam Master Plan Air Limbah DKI Jakarta tahun 1991, DKI Jakarta dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan sanitasi yang didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk, tinggi muka airtanah, permeabilitas tanah, kondisi sosial-ekonomi, dan lainnya.</p> <p>a. Sistem Pengolahan Setempat Sederhana (Daerah A) dengan kepadatan penduduk</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(2) Rencana pengembangan transportasi prasarana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>a. pembatasan lalu lintas melalui penerapan kebijakan kawasan terbatas lalu lintas (restricted zone) serta pengaturan parkir/parkiran pada kawasan yang termasuk dalam kawasan terbatas lalu lintas di kecamatan Pademangan</p> <p>b. pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal dan angkutan umum lainnya di kawasan Kota/Kampung Bandan dan di Tanjung Priok;</p> <p>c. pembangunan jaringan jalan lokal sebagai jalan tembus dan jalan sejajar sebagaimana terlampir dalam lampiran tabel 6;</p>	<p>kurang dari 100 jiwa/ha dengan luas wilayah 21.159 Ha (32%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah tangki septik</p> <p>b. Sistem Pengolahan Setempat Tingkat Tinggi (Daerah B) dengan tingkat kepadatan penduduk 100 - 300 jiwa/ha dengan luas wilayah 27.386 Ha (42%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah tangki septik atau sistem <i>sewerage</i> yang dimodifikasi sesuai kemampuan ekonomi masyarakat</p> <p>c. Sistem <i>sewerage</i> (Daerah C) dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa/ha dengan luas wilayah</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>d. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di perbatasan Kabupaten dan Kota Tangerang dan Bekasi;</p> <p>e. membangun gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum di kawasan Kampung Bandan dan lokasi yang memiliki potensi di Tanjung Priok;</p> <p>f. peningkatan manajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas serta fasilitas pejalan kaki di kawasan yang padat lalu lintas terutama di sekitar terminal bus dan stasiun kereta api; dan</p> <p>g. mengembangkan jaringan transportasi air.</p> <p>(3) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p>	<p>16.604 Ha (26%). Teknologi pengolahan yang diterapkan adalah <i>aerated lagoon</i> atau <i>activated sludge</i></p> <p>Untuk daerah pengembangan sanitasi dengan sistem <i>sewerage</i> di daerah C, sistem pengelolaan air limbah dibagi menjadi 6 (enam) zona, yang terkait dengan Pantura yaitu :</p> <p><u>Zona Pusat</u> Luas wilayah yang dilayani adalah 6.017 Ha, dimana 336 Ha atau 6% berlokasi di bagian Selatan dari zona yang tercakup dalam Jakarta Sewerage System Project. Luas wilayah sistem konvensional dan sistem interseptor adalah 3.422 Ha (57%) dan 2.595</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>a. pembangunan jaringan prasarana air limbah dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan sekitar waduk dan/atau kawasan reklamasi Pantura;</p> <p>b. pengembangan sistem prasarana air bersih melalui jaringan perpipaan pada tiap kecamatan;</p> <p>c. rehabilitasi Waduk Sunter, Don Bosco, Pluit, Muara Angke, Teluk Gong, dan Tol Sedyatmo dan pembangunan Waduk Marunda sebagai tempat penampungan air sementara;</p> <p>d. Pembangunan septictank komunal di kawasan permukiman padat sedang terutama di perumahan kumuh.</p> <p>(4) Rencana pengembangan prasarana pengendalian daya</p>	<p>Ha (42%). Air limbah yang tertampung akan dialirkan melalui pipa dengan panjang 10,2 km menuju tempat pengolahan, yaitu di Waduk Pluit dengan peningkatan kapasitas untuk menampung air limbah sebesar 529.000 m³/hari dengan luas waduk 80 Ha. Waduk berfungsi sebagai pengolah air limbah dan pengendali banjir.</p> <p><u>Zona Timurlaut</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 3.496 Ha, dimana 1.610 Ha (46%) dilayani sistem konvensional dan 1.886 Ha (54%) menggunakan sistem interceptor. Air limbah dialirkan melalui pipa pembawa dengan panjang 7,4 km menuju ke tempat pengolahan berupa kolam</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. normalisasi Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Sunter, Kali Ciliwung, Kali Kamal Muara, Kali Tanjungan, Kali Banglio, dan Kali Baru;</p> <p>b. memantapkan Banjir Kanal Timur sebagai prasarana pengendali banjir;</p> <p>c. pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air di kawasan Jalan Tol Sedyatmo, Kawasan Pluit, Kelapa Gading, Tugu Utara, Kebon Bawang, Rawa Badak,dan Pademangan;</p> <p>d. penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di kali Kamal, Banjir Kanal Barat, Kali Sunter, Kali</p>	<p><i>activated sludge</i> dengan kapasitas 261.000 m³/hari dan luas 14 Ha meliputi bagian Timur waduk Sunter dan kawasan hijau di Kelurahan Sunter Jaya.</p> <p><u>Zona Tanjung Priok</u></p> <p>Luas wilayah pelayanan adalah 1.502 Ha dengan cakupan sistem konvensional dan sistem interseptor masing-masing 700 Ha (47%) dan 802 Ha (53%). Air limbah dialirkan melalui pipa utama sepanjang 1,0 km menuju tempat pengolahan berupa <i>aerated lagoon</i> dengan kapasitas 120.000 m³/hari dan luas 36 Ha di kawasan hijau dan waduk Sunter Timur II di Kelurahan Semper Timur.</p> <p>2. Jakarta Wastewater Disposal Project tahun 2001</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Cakung dan Kali Ciliwung;</p> <p>e. pembangunan fisik diarahkan menhadap sungai (<i>river front development</i>);</p> <p>f. pembangunan sistem polder baru dan pemulihan sistem polder yang sudah ada di sistem polder terutama di Sunter Timur III, Kelapa Gading, Tunjungan, Yos Sudarso, Muara Angke, Pluit, Sunter Selatan, Sunter Timur I, Sunter Utara, Teluk Gong, Bimoli, Gaya Motor, Kapuk Muara;</p> <p>g. pemulihan Situ Rawa Kendal;</p> <p>h. pelarangan pembuangan sampah ke dalam sungai dan kanal dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan</p> <p>i. pengelolaan situ Sunter Barat, Sunter I, Sunter II, Teluk Gong dan Pluit</p> <p>Pasal 119</p> <p>Rencana Struktur Ruang</p>	<p>Beberapa perubahan terhadap master plan air limbah tahun 1991, khususnya rencana pengembangan <i>sewerage</i> di zona pusat antara lain :</p> <p>a. Rencana lokasi IPAL di waduk Pluit dipindahkan ke Muara Baru, yaitu pada lahan reklamasi.</p> <p>b. Rencana pengolahan air limbah dibagi menjadi 6 subsistem yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsistem Thamrin dilayani IPAL Waduk Setiabudi; • Subsistem Setiabudi Tebet dilayani IPAL Waduk Setiabudi; • Subsistem Gajahmada dilayani IPAL Muara Baru; • Subsistem Pantai Mutiara dilayani IPAL Muara Baru;

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara termuat pada Gambar 24 dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah</p> <p>Pasal 120</p> <p>Rencana kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), di Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi:</p> <p>a. kawasan terbuka hijau budi daya;</p> <p>b. kawasan perumahan dan fasilitasnya;</p> <p>c. kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa;</p> <p>d. kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Subsistem Kali Ancol dilayani IPAL Kali Ancol; • Subsistem Kali Grogol dilayani IPAL Grogol; • Subsistem Waduk Grogol dilayani IPAL Grogol; dan • Subsistem Siantar dilayani IPAL Muara baru. <p>Direncanakan pula 8 (delapan) <i>pumping station</i>, yaitu PS1 Krukut, PS2 Pasar Rumput, PS3 Abdul Muis, PS4 Pluit, PS5 Kali Grogol, PS6 Kali Grogol, PS7' Kali Ancol, dan PS8 Siantar.</p> <p>IPAL Muara Baru berlokasi di lahan reklamasi Teluk Muara Baru, yaitu di sebelah Utara pompa banjir Pluit, di sebelah Timur perumahan pantai Mutiara atau di sebelah Barat pasar</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>taman; e. kawasan pariwisata; f. kawasan pemerintahan daerah; g. kawasan terbuka biru; h. kawasan perikanan; dan i. kawasan industri dan perindustrian.</p> <p>Pasal 121</p> <p>(1) Rencana kawasan terbuka hijau budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, dengan cara :</p> <p>a. menata dan melestarikan hutan kota; b. mengembangkan jalur hijau; c. pengembangan kawasan taman kota; dan d. pengembangan kawasan terbuka hijau lain.</p> <p>(2) Rencana menata dan melestarikan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di</p>	<p>ikan seluas 40 Ha. Jenis pengolahan pada tahap I berupa <i>aerated lagoon</i> dan pada jangka panjang menggunakan <i>activated sludge</i>.</p> <p>3. Review Master Plan dan DED tahun 2009</p> <p>Rencana mencakup zona pusat bagian Utara dan tidak termasuk Setiabudi-Tebet, antara lain :</p> <p>a. IPAL Muara Baru dipindahkan ke Pluit Selatan untuk tahap I dan Pluit Utara untuk jangka panjang</p> <p>b. IPAL Pluit Selatan melayani subsistem Gajah Mada, Thamrin, Pantai Mutiara, Siantar, dan Kali Ancol dengan kapasitas 86.400 m³/hari</p> <p>c. IPAL Kali Ancol tidak dibangun dan dialihkan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sekitar Waduk Pluit, Waduk Sunter Barat, dan Waduk Sunter Timur, dan kawasan reklamasi pantura;</p> <p>(3) Rencana pengembangan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan di sepanjang pantai yang dipadukan dengan budidaya perikanan, jalur hijau jalan, tepian sungai dan kanal, jalur rel kereta api, jalur hijau pengaman rel kereta api atau saluran tegangan tinggi dan kawasan reklamasi pantura;</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. mengembangkan kawasan terbuka hijau di kawasan Kota Tua;</p> <p>b. mengembangkan dan</p>	<p>ke <i>main system</i> IPAL Muara Baru</p> <p>d. IPAL Grogol tetap melayani subsistem Kali Grogol dan Waduk Grogol</p> <p>e. Pengolahan air limbah dengan sistem <i>activated sludge</i> dan <i>membrane</i> untuk daur ulang</p> <p>f. Sistem pengumpulan air limbah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem Timur dan sistem Barat dengan batas Jl. Thamrin dan Jl. Gajahmada. Masing-masing sistem dilayani <i>main trunk</i> dengan diameter 1,8 m yang ditempatkan pada kedua jalur di sepanjang Jl. Thamrin dan Jl. Gajahmada/Hayam Wuruk hingga ke IPAL di Pluit Selatan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>c. mendorong penanaman pohon dan tanaman hias di halaman rumah, tepi dan median jalan, tepi sungai, dan jaringan pipa;</p> <p>d. menata dan memelihara jalur hijau pada tepi dan median Tol Sedyatmo, Cakung Cilincing dan tol pelabuhan;</p> <p>e. mendorong masyarakat untuk mengembangkan <i>roof garden</i> dan dinding hijau di kawasan permukiman dan perkantoran terutama di kawasan dengan KDB tinggi;</p> <p>f. penataan dan pemeliharaan taman;</p> <p>g. peruntukan lahan di kawasan RTH publik tidak dapat diubah; dan</p> <p>h. Peningkatan areal kawasan hijau yang salah satu bentuknya merupakan taman kota pada pengembangan kawasan reklamasi pantura</p>	<p>Selain itu, dibangun sistem <i>sewerage</i> di Setiabudi-Tebet sebagai pengembangan yang ada pada saat ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah <p>1. Kebijakan Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Kebijakan pengelolaan air limbah meliputi:</p> <p>a. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah <i>on site</i> dan <i>off site</i></p> <p>b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah kota</p> <p>c. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan penyelenggaraan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(5) Rencana pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. mempertahankan lahan pertanian yang ada di Cilincing, Marunda, Kamal dan Kamal Muara; dan</p> <p>b. mempertahankan lahan pemukiman di Kawasan Cilincing, Koja dan Tanjung Priok serta lapangan olahraga yang ada.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh</p>	<p>pengelolaan air limbah kota</p> <p>d. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah kota</p> <p>e. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah kota</p> <p>2. Strategi Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Strategi yang diterapkan adalah :</p> <p>a. Pemisahan sistem drainase dan perpipaan tertutup secara bertahap disertai dengan pengelolaan air limbah</p> <p>b. Sistem pengelolaan air limbah dikelompokkan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah industri • Limbah domestik

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>ringan dan sedang melalui program tribina;</p> <p>b. mengembangkan perumahan lingkungan perumahan kumuh berat;</p> <p>c. mendorong pengembangan kawasan permukiman vertikal dan memperkecil perpindahan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>d. mengembangkan perumahan menengah-atas di areal reklamasi Pantura;</p> <p>e. mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan;</p> <p>f. membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa sekaligus melestarikan lingkungan;</p>	<p>c. Pengelolaan air limbah industri dilakukan secara sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke lingkungan</p> <p>d. Prasarana pengelolaan air limbah domestik terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem komunal • Sistem komunal semi komunal/modular • Sistem individual <p>e. Pengembangan pengolahan air limbah diprioritaskan pada Zona Pusat.</p> <p>Pembagian daerah pelayanan pengolahan air limbah dilakukan dengan memperhatikan daerah layanan sistem polder.</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>g. mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwisata lingkungan di kawasan pantai lama;</p> <p>h. mempertahankan fungsi perumahan di kawasan mantap di Kota Tua, Kelapa Gading, dan Pluit;</p> <p>i. melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman horizontal;</p> <p>j. mengembangkan kawasan permukiman di Kawasan Pantai Lama;</p> <p>k. pengendalian pembangunan perumahan baru di Pademangan, Cilincing dan Penjaringan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>l. pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun sederhana di perumahan kumuh berat sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kalibaru,</p>	<p>l. Penanganan Sampah (Rencana Prasarana Persampahan)</p> <p>Sistem jaringan persampahan yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.</p> <p>Pengembangan pengelolaan persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dari sumbernya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah dan pengembangan prasarana sarana pengolahan sampah dengan teknologi tinggi</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjarangan dan melengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan sosial;</p> <p>m. pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, Kelapa Gading, dan Penjarangan yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir; dan</p> <p>n. Rencana pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan tingkat kepadatan lingkungan.</p> <p>Pasal 123</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, terdiri atas :</p> <p>a. rencana pengembangan</p>	<p>yang ramah lingkungan.</p> <p>Untuk menunjang penanganan sampah perlu pengembangan sistem prasarana persampahan meliputi :</p> <p>a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah Melalui penggalakan program 4R (<i>reuse, reduce, recycling, recovery</i>) pada setiap Rukun Warga dan menyediakan sarana pendukungnya.</p> <p>b. Peningkatan sistem pelayanan persampahan Pengembangan pelayanan persampahan di Jakarta dilaksanakan kedalam sistem multi simpul (multi nodal) terbagi dalam beberapa daerah pelayanan dimana setiap daerah pelayanan dilengkapi dengan TPS (Tempat Pembuangan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>kawasan perkantoran yang terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;</p> <p>b. rencana pengembangan kawasan perdagangan yang terdiri dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, ataupun bentuk kawasan perdagangan lainnya ;</p> <p>c. rencana pengembangan kawasan pelayanan umum dan sosial; dan</p> <p>d. rencana pengembangan kawasan campuran</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mengembangkan fasilitas perkantoran di kawasan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Sunter, dan Enggano.</p> <p>(3) Rencana pengembangan perdagangan kawasan</p>	<p>Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Sementara) dan ITF (<i>Intermediate Treatment Facility</i>) dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan.</p> <p>c. Pengembangan TPST di luar Jakarta</p> <p>Pengembangan kerja sama untuk penyediaan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dengan daerah lain dimungkinkan dengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial setempat.</p> <p>d. Pengembangan sistem pengendalian dan prasarana sampah B3</p> <p>Pengembangan sistem pengendalian dan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan; b. mengembangkan kawasan perdagangan di Pantura dengan pola pengembangan multifungsi atau super blok dengan fasilitas bertaraf internasional; c. menata fungsi kawasan kota tua untuk mendukung kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan pariwisata; d. mengembangkan kawasan perdagangan, jasa, dan perkantoran di Tanjung Priok dan sebagian Kelapa Gading; e. membatasi pengembangan perdagangan, jasa. dan perkantoran sepanjang jalan 	<p>pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Pengelolaan sampah dari drainase/sungai Penyediaan sarana pengelolaan sampah dari drainase/sungai dilakukan guna pencegahan banjir, meningkatkan kualitas air sungai dan estetika. f. Penanganan sampah/limbah di perairan laut. g. Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai, misalnya insinerator pada lokasi tertentu. <p>J. Pemanfaatan Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada penanganan bagian yang mengganggu alur pelayaran • Perlu ditampung/ diakomodir pelabuhan wisata

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>arteri primer dengan memperhatikan lalu lintas dan penyediaan parkir;</p> <p>f. pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum berdasarkan arahan penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Yos Sudarso untuk menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan</p> <p>g. mengembangkan pusat perdagangan dengan KDB rendah di Kamal, Kapuk, Pademangan, Ancol, Cilincing, dan sebagian Kelapa Gading.</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa taman dilaksanakan pada kawasan Marunda dengan penerapan intensitas rendah dan meningkatkan daya resap air pada kawasan terbangun.</p> <p>(5) Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Kawasan Strategis Pantura Jakarta meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian potensi kerusakan yang berwujud dalam fenomena penurunan muka air tanah dan muka tanah, perluasan daerah genangan, abrasi dan erosi, sedimentasi, intrusi air laut, polusi air dan udara, dan persoalan lingkungan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, air permukaan, dan air tanah; 2. Bentuk pulau reklamasi ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci; 3. Disain pulau reklamasi memperhitungkan masa perancangan, keandalan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir dan tindakan mitigasi, serta perlindungan hutan bakau;

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan; dan</p> <p>b. pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dengan prasarana dan sarana yang standar pelayanan minimal di setiap kecamatan</p> <p>c. pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal di setiap kecamatan.</p> <p>(6) Rencana pengembangan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan pengembangan kawasan campuran, perdagangan, dan jasa dengan perumahan vertikal</p>	<p>4. Dalam pelaksanaan reklamasi perlu dilakukan tindakan untuk keamanan dan resiko pencemaran dan sedimentasi;</p> <p>5. Dalam perencanaan reklamasi tercakup rencana pengelolaan secara mandiri prasarana pulau reklamasi yang meliputi prasarana tata air, air bersih, pengolahan limbah dan sampah, serta sistem pengangkutan muara sungai;</p> <p>6. Pengembangan reklamasi Pantura dilakukan dalam bentuk pulau-pulau dengan jarak 200 m pada pulau yang berada pada zona P2 dan P4 serta berjarak 300 m pada pulau yang berada pada zona P3 dihitung dari pantai eksisting pada saat muka air terendah;</p> <p>7. Tanggul laut diletakkan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tertinggal (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan horizontal terutama di kawasan sebagai berikut:</p> <p>a. Jalan Lodan; b. Jalan Martadinata; c. Jalan Yos Sudarso; d. Kawasan Cilincing; e. Kawasan Kelapa Gading; dan f. Kawasan Sunter.</p> <p>(7) Rencana pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman dilaksanakan di Kawasan Marunda dengan menerapkan intensitas rendah dan memperhatikan aspek fisik lingkungan yang ada</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d, diarahkan untuk pengembangan kawasan destinasi wisata pesisir.</p> <p>(2) Kawasan destinasi wisata</p>	<p>pada kedalaman -8 m untuk daerah Barat dan tengah sedangkan untuk bagian Timur tanggul berada dekat pantai eksisting. Di atas tanggul dimanfaatkan sebagai jalan penghubung Barat-Timur;</p> <p>8. Ketinggian dan kekuatan tanggul dan perlindungan pesisir didisain dengan kala ulang angin dan gelombang minimal 1.000 tahun. Ketinggian tanggul harus memperhatikan faktor ketinggian air laut pasang, <i>wave setup</i>, <i>storm surge</i>, gelombang, <i>land subsidence</i> (amblesan), <i>sea level rise</i> (kenaikan muka laut) dan konsolidasi sisa (<i>residual settlement</i>);</p> <p>9. Limpasan air yang melalui tanggul diperkenankan hingga batas maksimal 5</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Sentra Perikanan Muara Angke;</p> <p>c. Masjid dan Makam Luar Batang;</p> <p>d. Pelabuhan dan Kota Tua Sunda Kelapa;</p> <p>e. Pusat Perbelanjaan Mangga Dua;</p> <p>f. Taman Impian Jaya Ancol;</p> <p>g. Bahtera Jaya dan Yacht Club;</p> <p>h. Stasiun Tanjung Priok;</p> <p>i. Masjid Islamic Center;</p> <p>j. Gereja Tugu;</p> <p>k. Kampung Tugu;</p> <p>l. Cagar Budaya Rumah si Pitung;</p> <p>m. Masjid Al Alam; dan</p> <p>n. Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading,</p> <p>Pasal 125</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>l/s/m. Jika melampaui limpasan tersebut wajib meyediakan sistem <i>flood control</i> (penanggulangan banjir) lainnya, seperti pompa dan kolam retensi dengan kapasitas yang memadai untuk menanggulangi limpasan air yang terjadi;</p> <p>10. Pulau reklamasi dan tanggul laut didisain dengan siklus masa layanan (<i>design life cycle</i>) minimal 50 tahun;</p> <p>11. Untuk keamanan, level lantai dasar bangunan berada lebih tinggi dari muka air laut tertinggi;</p> <p>12. Selain membangun kanal dan saluran, setiap pulau reklamasi wajib menyediakan ruang terbuka biru untuk waduk dan danau;</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 120 huruf e, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:</p> <p>a. pelarangan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi pada tiap kecamatan yang berbatasan dan/atau memiliki kawasan perairan laut;</p> <p>b. pengembangan prasarana budi daya perikanan di Muara Baru dan Muara Angke sesuai dengan klasifikasinya; dan</p> <p>c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup pada tiap kecamatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui penataan kantor-kantor pemerintahan daerah dan lingkungan sekitarnya baik itu tingkat</p>	<p>13. Badan-badan air berupa waduk dan danau difungsikan sebagai :</p> <p>a. Penampungan air sementara ketika hujan;</p> <p>b. Persediaan air untuk kebutuhan harian;</p> <p>c. Sumber air yang mungkin untuk diresapkan ke dalam lapisan aquifer;</p> <p>d. Habitat flora dan fauna akuatik;</p> <p>e. Sarana rekreasi</p> <p>14. Ruang perairan antara pulau-pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir di Jakarta Utara;</p> <p>15. Untuk mengurangi dan selanjutnya menghentikan proses <i>land subsidence</i>, penyediaan air bersih untuk kawasan reklamasi Pantura tidak dipertimbangkan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan;</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan terbuka biru dilaksanakan untuk melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang dilaksanakan pada Sungai, Kali, Situ dan Waduk serta Pantai yang ada di Jakarta Utara</p> <p>Pasal 127</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan industri dan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f, meliputi:</p> <p>a. rencana pengembangan kawasan industri; dan</p> <p>b. rencana pengembangan</p>	<p>menggunakan airtanah;</p> <p>16. Penyediaan air bersih dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan mengarah kepada <i>sustainable solution</i> dengan memanfaatkan air tawar dari waduk dan perairan antara pulau-pulau dan proses desalinisasi;</p> <p>17. Pengolahan air limbah dilakukan secara mandiri pada masing-masing pulau;</p> <p>18. Pembangunan areal reklamasi baru diarahkan agar tidak menimbulkan peningkatan risiko banjir bagi kawasan di hulunya. Jika terdapat potensi kenaikan muka air di hulu sungai, maka harus dilakukan tindakan mitigasi berupa pengerukan muara sungai, pelebaran dan pengerukan kanal/ sungai,</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>kawasan perdagangan.</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. membatasi kegiatan industri di kawasan yang sudah ada di Penjarangan, Kelapa Gading, dan Cilincing;</p> <p>b. mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing; dan</p> <p>c. penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal</p> <p>(3) Pemanfaatan ruang kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan arahan:</p> <p>a. penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing</p>	<p>peninggian tanggul di kawasan yang berpotensi terjadi kenaikan muka air sungai, dan tindakan lain yang dipandang perlu;</p> <p>19. Pembangunan areal reklamasi baru diarahkan untuk meningkatkan fungsi mangrove sebagai habitat flora dan fauna akuatik dengan memperhatikan perlindungan terhadap erosi dan gelombang, salinitas, kualitas air, dan substrat lumpur (<i>mud</i>);</p> <p>20. Pemantauan kegiatan reklamasi dilakukan terhadap parameter perubahan morfologi, abrasi dan erosi, sedimentasi, muka airtanah, muka tanah, kuantitas pemompaan airtanah, tata guna lahan, dan kondisi sosial ekonomi</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan Kali baru; dan</p> <p>b. relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dari Ancol Barat, Marunda, dan Cilincing.</p> <p>Pasal 128</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b, dengan cara :</p> <p>a. mengembangkan kawasan pengembangan untuk mengatasi perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa;</p> <p>b. relokasi kawasan pengembangan dari Kawasan Kota Tua; dan</p> <p>c. penataan dan pengaturan lahan parkir dan pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer sehingga tidak menggunakan jalan lokal</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang untuk</p>	<p>masyarakat;</p> <p>21. Rencana dan skenario peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi massal publik yang sesuai dengan proyeksi pengembangan kawasan hunian dan area publik di lahan reklamasi. Tidak hanya bersandar pada rencana infrastruktur jalan raya. Konsep transit oriented development (TOD) pun harus diterapkan dalam kawasan pengembangan di atas lahan reklamasi;</p> <p>22. Harus diperjelas skenario peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur berbasis jalan raya atau berbasis rel bagi kelancaran arus rantai pasok barang dari dan ke kawasan industri strategis atau pun</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tertinggal (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>mengembangkan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan melalui penyediaan fasilitas perdagangan untuk menunjang perdagangan dan jasa yang dilaksanakan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjarangan, b. Koja; c. Kelapa Gading; dan d. Cilincing. <p>Pasal 129</p> <p>Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara termuat pada Gambar 25 dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini</p>	<p>sarana ekonomi strategis di lahan reklamasi, tidak hanya bersandar pada infrastruktur jalan raya yang sudah ada;</p> <p>23. Kawasan strategis pantura harus dikelola secara terpadu oleh satu manajemen pengelola dan mencakup juga bagian pesisir pantura yang ada sekarang, sehingga masalah pengelolaan sampah dan pengerukan sedimen, keamanan, ketertiban dapat dilakukan secara rutin dan terpadu;</p> <p>24. Setiap upaya revitalisasi kawasan pantura yang ada harus berupa memperbaiki keseimbangan zona sehingga dapat mengurangi koneksi frontal antara kawasan konservasi</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>langsung dengan kawasan hunian padat, kawasan hunian mewah langsung dengan kawasan hunian padat sederhana. Gradasi zona dan penerapan zona buffer perlu dipertimbangkan;</p> <p>25. Upaya konsolidasi lahan, peremajaan area pesisir kumuh Jakarta Utara dan pengentasan kemiskinan khususnya kaum nelayan harus dimaknai dan di selesaikan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi nelayan dan sektor industri perikanan secara terpadu dan progresif. Peluang kerjasama pembenahan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pendaratan ikan dan industri perikanan perlu dijaagi dengan daerah pesisir Tangerang</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Rencana Kawasan Lindung meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan pantai seluas 16,5 Ha berfungsi sebagai penahan abrasi, erosi, dan daya rusak laut 2. Suaka margasatwa Muara Angke seluas 25,02 Ha berfungsi sebagai habitat burung air yang dilindungi 3. Hutan lindung Kapuk Angke seluas 44,78 Ha 4. Taman wisata alam Kamal seluas 99,82 Ha 5. Kebun pembibitan mangrove di Taman Wisata Alam Kamal seluas 10,51 Ha 6. Kawasan Tegal Alur-Angke Kapuk berfungsi sebagai kawasan pengaman jalur tol • Arahan Rencana Pengembangan Kawasan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>Terbuka Biru meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada regulasi spesifik yang mengatur zona area yang berimpit dengan badan air (waterfront, seafont, lakeside, riverside, dsb) sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai area bernilai tambah tinggi. Sehingga pengembangan bernilai tambah tinggi lebih layak mendapat prioritas di zona tersebut. Hal ini diharapkan akan mengubah paradigma apresiasi terhadap badan air sehingga waterfront menjadi area muka bangunan bukan belakang bangunan. 2. Prioritas utama lain di area waterfront adalah untuk ruang terbuka publik, infrastruktur dan fasilitas

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>publik sehingga memberi publik akses lebih pada area waterfront.</p> <p>K. Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adaantisipasi isu future development • Perlu dikaji kembali misi DKI sebagai kota jasa, tidak hanya memikirkan untuk kelas menengah atas saja akan tetapi juga harus dipikirkan untuk masyarakat bawah • Perlu menjadikan lingkungan sebagai sumber kebijakan agar tidak terjadi ego sektoral • Perlu dijabarkan tujuan reklamasi adalah untuk perbaikan lingkungan pantai

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tertinggal (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>L. Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyusun KRP perlu mempertimbangkan perilaku masyarakat, bagaimana masalah sosial budaya yang harus ditangani • Dalam menyusun KRP perlu dilihat juga kondisi sosial di daerah tersebut, karena kerusakan fisik tersebut akibat kondisi masyarakat juga • Dalam rencana perbaikan fisik yang akan dilakukan perlu dipertimbangkan masalah manusianya, yaitu harus dipetakan perilaku masyarakatnya • Perlu dihilangkan pembiasaan pemberian sesuatu hal tanpa ada pencegahan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>M. Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu mulai dibudayakan “pemukiman vertical”, tetapi jangan dimulai dari kelas bawah, melainkan dari kelas menengah dengan “system land consolidation” untuk menghindari pengusutan. Perbaikan perumahan kelas bawah (kampung kumuh) yang tidak liar sebaiknya dilakukan dengan pendekatan “perbaikan kampung”, bukan “urban renewal” • Perlu penataan kembali perumahan kelas menengah secara vertical dengan cara “land consolidation”, sehingga penduduk lama tidak tergusur, tetapi penduduk baru bisa masuk ke daerah itu secara efisien. Perumahan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>vertical sebaiknya mulai dari kelas atas dan menengah, bukan dari kelas bawah, karena kemiskinan mereka masih sangat dalam, mereka belum siap untuk meng huni rumah susun</p> <p>N. Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial dan ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu kepastian hukum dalam berinvestasi dan perlu jaminan keamanan kelas atas • Perlu penjelasan apakah akan ada penertiban atau membiarkan adanya dinamika

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>kehidupan yang berbeda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu juga memikirkan ruang untuk masyarakat kelas bawah yang bisa tidak teralokasikan akan menyebabkan kesemrawutan pemanfaatan ruang • Perlu penanganan mobilitas kelas menengah dari pinggir kota ke pusat kota yang semakin mahal • Perlu ada perlindungan jaringan pengamanan sosial terhadap dampak kesenjangan kelas semakin tinggi • Masyarakat yang tidak mampu perlu ditampung pada jaringan pengamanan sosial • Perlu pemberdayaan masyarakat setempat, jadi hanya yang diutamakan hanya fisik saja, tetapi perlu pembangunan manusianya • Perlu dipikirkan alih profesi

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>seperti apa untuk mengatasi kekosongan kegiatan karena pada saat musim angin barat yaitu pada bulan September – Desember umumnya ombak besar sehingga nelayan tidak bisa melaut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu penyediaan ruang bagi masyarakat bawah • Perlu kejelasan mengenai pemukiman nelayan apakah tidak akan menambah permasalahan baru, karena dengan dilakukan pemukiman nelayan akan mengundang nelayan baru dari luar DKI • Terhadap nelayan jangan hanya perumahannya saja yang ditingkatkan, yang penting adalah bagaimana untuk meningkatkan ekonominya agar strata sosialnya meningkat. Jadi jangan keberadaannya yang dilindungi dengan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>menyediakan perumahan, memperbaiki sanitasi dsb, bila ekonominya tidak diperbaiki sama halnya dengan melestarikan kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dibutuhkan oleh kelas bawah bukanlah perbaikan pemukiman, perbaikan sanitasi, akan tetapi yang dibutuhkan adalah perbaikan ekonomi, peningkatan ketrampilan agar bisa meningkatkan strata sosialnya dari kelas bawah ke kelas menengah • Untuk mendekatkan kelas menengah dan atas dengan kelas bawah, perlu dimulai dengan mengembangkan fungsi ekonomi kelas bawah terhadap kelas menengah (misalnya berupa Pujasera), sehingga terjadi peningkatan penghasilan. Disamping itu juga perlu membuka akses ke

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>Pantai bagi masyarakat kelas bawah serta mengembangkan wisata Pantai bersama mereka (partisipasi ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kendali keberadaan nelayan yang berasal dari luar berusaha di Jakarta • Perlu diantisipasi urbanisasi dari daerah termasuk nelayan akibat kegiatan pembangunan di Jakarta • Perlu ditata kembali kegiatan arus urbanisasi dari daerah luar Jakarta termasuk nelayan yang ada di DKI kebanyakan pendatang karena adanya pembangunan di Jakarta • Perlu ditata kembali pelabuhan nelayan apakah sudah tepat pada tempatnya yang ada sekarang, karena daerah penangkapannya berada diluar Jakarta

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tertinggal (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menangani masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu diperhatikan urbanisasi yang terjadi, bagaimana mengendalikan penduduk Serang, Cirebon dsb agar tidak berduyun-duyun ke Jakarta. Perlu dikordinasikan oleh instansi yang lebih tinggi • Jakarta, Bekasi dan Tangerang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kekayaan wisata darat, tetapi bersama-sama mengembangkan wisata bahari dengan keperluan seribunya • Perlu ada kejelasan mengenai keberadaan pantai yang seharusnya milik publik, akan tetapi dari 32 km panjang pantai utara hanya 8 km yang dapat diakses oleh publik, selebihnya dikuasai oleh berbagai kepentingan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diangkat isu budaya. Ada budaya nelayan seperti nagrang/pesta laut. Akan tetapi tidak terlaksana dengan baik, karena dikaitkan dengan agama dan dikatakan perbuatan syirik. Sebenarnya Nagrang/pesta laut bisa dikaitkan dengan pesta wisata. Hal ini dapat mengangkat keterampilan para nelayan • Perlu kejelasan dalam pengembangan pantura, apakah diperuntukkan bagi kelas atas, menengah atau kelas bawah <p>O. Kemiskinan dan hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan masyarakat Jakarta Utara perlu dibantu dan perlu ditampilkan dalam

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>RPJMP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu proses perencanaan induk yang tidak bersifat parsial karena menyebabkan integrasi kawasan ekonomi dan social menjadi rendah • Sektor informal perlu diberdayakan dan ditata secara fisik • Perlu disediakan ruang untuk pedagang kaki lima • Perlu pemberdayaan masyarakat dalam menangani kesenjangan ekonomi • Masalah kemiskinan di kawasan ini perlu diselesaikan dulu mengenai masalah nelayan, karena mereka telah mengalami penurunan kapasitas dan mulai membutuhkan suatu perubahan profesi, kedua pengembangan UKM disertai pembangunan pemukiman dengan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>pendekatan Perbaikan Kampung sosial perlu ditampung pada PMKS</p> <p>CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi diatas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam KRP seperti RTRW, RDTR, RPJP dan RPJM atau KRP lainnya dimana pencapaian program perlu didukung dengan data dan pembahasan detail sehingga dapat disusun program yang lebih fokus khususnya mengenai penanganan isu lingkungan hidup bio fisik dan lingkungan hidup sosial ekonomi budaya • RUPSB dan RUPE perlu dihidupkan kembali dan diintegrasikan sebagai bagian dari KRP • Pembangunan Teluk Jakarta perlu dilihat secara sistemik

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 		<p>(antar wilayah) dengan orientasi keuntungan internasional</p>

**REKOMENDASI HASIL KLHS TELUK JAKARTA
DALAM KRP KABUPATEN TANGERANG**

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>RTRW 2010-2030</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kawasan Strategis Nasional, meliputi: Perpres 54 tahun 2008 Kabupaten Tangerang termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>(2) Kawasan Strategis Provinsi Banten, meliputi: Kawasan Strategis Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Tangerang meliputi : 1. Kawasan penyangga Bandara untuk kepentingan</p>	<p>Raperda RTRW Kabupaten Tangerang 2010 – 2030, khususnya didalam bagian Penjelasan agar dilengkapi dengan materi tersebut dibawah ini.</p> <p>Beberapa lokasi di Pantura masuk dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. Belum ada pengaturan lebih lanjut.</p> <p>A. Land Subsidence Dalam RTRW perlu ada pengendalian pemanfaatan air bawah tanah.</p> <p>B. Rob dan Kenaikan Muka Air Laut Perlu ada ketentuan mengenai strategi pengendalian rob/kenaikan muka air laut.</p> <p>C. Banjir/Genangan • Pasal 27 ayat (1) huruf b ditambahkan pembanguan</p>

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>daya dukung lingkungan.</p> <p>2. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) Balaraja untuk kepentingan ekonomi.</p> <p>3. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) Teluknaga untuk kepentingan ekonomi.</p> <p>4. PLTU Lontar untuk kepentingan teknologi tinggi.</p> <p>(3) Kawasan strategis di kabupaten, meliputi :</p> <p>1. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Keuntungan lingkungan hidup</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Balaraja dan Teluknaga</p> <p>c. Kegiatan Utama : Perdagangan dan jasa, industri, Perumahan, dan</p>	<p>tandon air di 8 Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah genangan direncanakan sebagai daerah tampungan air <p>D. Abrasi dan Kerusakan Pantai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan strategi tentang penanggulangan abrasi • Perlu ditambahkan strategi tentang penanggulangan kerusakan pantai akibat penambahan pasir • Perlu ditambahkan strategi tentang pengendalian penambahan pasir • Perlu diawali dengan penentuan garis pantai • Perlu ditambahkan ketentuan tentang kawasan yang berfungsi untuk pengendalian banjir, dan pengendalian rob, tidak dialih fungsikan <p>E. Degradasi Ekosistem Mangrove</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ditambahkan Kecamatan Mekar Baru • Perlu ditambahkan ketentuan

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p style="text-align: center;">perdagangan</p> <p>2. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</p> <p>b. Klasifikasi Kawasan</p> <p>Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>c. Lokasi : Kecamatan Tigaraksa dan Kronjo</p> <p>d. Kegiatan Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKL Tigaraksa : Pusat pemerintahan kabupaten, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa - PKL Kronjo : Pemerintahan kecamatan, permukiman, pertanian dan perikanan. <p>3. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)</p>	<p>tentang penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai</p> <p>F. Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan arahan mengenai water front city • Pasal 24 ayat (6) ditambahkan Kecamatan Mekar Baru <p>G.Sedimentasi</p> <p>Perlu ditambahkan strategi normalisasi muara sungai sebagai upaya penanggulangan sedimentasi.</p> <p>H.Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan strategi penanggulangan/penanganan sampah di perairan secara terintegrasi. • Perlu kebijakan pengawasan yang mengatur pencemaran perairan termasuk perilaku pencemarnya

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Mauk, Kosambi, Pasarkemis, Sepatan, Cikupa, Kelapadua dan Curug.</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pemerintahan kecamatan, Perkantoran, permukiman, industri, pertanian perdagangan dan jasa.</p> <p>4. Kawasan Strategis Dryport</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Jambe</p> <p>c. Kegiatan Utama : Transportasi dan Perdagangan</p>	<p>1. Penanganan Sampah (Perairan)</p> <p>Perlu ditambahkan strategi penanggulangan/penanganan sampah di perairan secara terintegrasi.</p> <p>1. Pemanfaatan Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 ayat (2) perlu ditambahkan dengan strategi untuk penanggulangan penurunan permukaan tanah, rob dan kenaikan muka air laut, banjir dan genangan, abrasi, erosi, sedimentasi, intrusi air laut, pengendalian pencemaran, kerawanan air bersih, pencemaran air, kerusakan pantai • Perlu ditambahkan Kecamatan Kemiri, perlu konfirmasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan mengenai Kecamatan Mauk • Pasal 38 ayat (3) a ditambahkan Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi (perlu konfirmasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan)

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>5. Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi</p> <p>b. Lokasi : Perluasan Bandara Soekarno Hatta</p> <p>c. Kegiatan Utama : Transportasi Udara dan Pergudangan</p> <p>6. Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Kecamatan Kosambi</p> <p>c. Kegiatan Utama : Perdagangan, industri, perdagangan dan jasa</p> <p>7. Kawasan Strategis PLTU Lontar</p> <p>a. Klasifikasi Kawasan</p>	<p>K. Kemungkinan Alih Fungsi Lahan di Daratan Pasca Reklamasi</p> <p>Perlu kebijakan pengawasan terhadap kemungkinan alih fungsi lahan mengingat pasca reklamasi, tanah daratan di sekitar Pantura diprediksi akan naik nilai jualnya sedangkan peruntukan lahan di daerah tersebut pada umumnya untuk pertanian/RTH.</p> <p>L. Sosial Ekonomi Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kebijakan perlindungan situs budaya mengingat di kawasan Pantura banyak situs budaya seperti Makam Panjang di Kampung Bahari, tempat ziarah orang Tionghoa di Tanjung Kait serta potensi wisata lainnya seperti di Pantai Tanjung Kait • Perlu kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada pembinaan sistem ekonomi nelayan khususnya dalam pengembangan kawasan minapolitan, sehingga potensi PAD

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan</p> <p>b. Lokasi : Desa Lontar Kecamatan Kemiri</p> <p>c. Kegiatan Utama : Pembangkit Listrik untuk Provinsi Banten dan DKI</p> <p>5. Kawasan Strategis Rencana Reklamasi Pantai</p> <p>a. Klasifikasi kawasan strategis : Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan wilayah pantai.</p> <p>b. Lokasi : Kawasan reklamasi seluas ± 9.000 ha</p> <p>berjarak 200 meter dari garis pantai utara Kabupaten Tangerang</p> <p>c. Kegiatan Utama: Perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.</p>	<p>Kab. Tangerang dari sektor nelayan dapat ditingkatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk mencegah disintegrasi sosial dan ekonomi sehingga dengan adanya kegiatan reklamasi maka kegiatan nelayan yang ada di sekitar areal reklamasi tidak terganggu mata pencahariannya • Perlu ada kebijakan perlindungan DAS (Daerah Aliran Sungai) mengingat sungai-sungai di Kab. Tangerang mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat • Pembangunan PLTU perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar areal proyek pengembangan PLTU agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat nelayan, serta pencemaran terhadap areal pertanian

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(4) Beberapa program yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis meliputi :</p> <p>a. Program penataan ruang</p> <p>b. Program pembangunan prasarana dasar dan transportasi</p> <p>c. Program pembangunan sarana pelayanan sosial ekonomi</p> <p>d. Program pengembangan usaha</p> <p>(5) Program pengembangan investasi</p> <p>(6) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kebijakan dan Strategi</p> <p>Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah, dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan ruang kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan b. Meningkatkan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri. 2. Pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fungsi kegiatan sekitarnya di seluruh wilayah kabupaten dilakukan dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur 	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian;</p> <p>b. Mewujudkan pusat-pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan kabupaten;</p> <p>c. Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya</p> <p>d. Meningkatkan intensitas pembangunan perumahan dan permukiman di tiap kecamatan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan</p> <p>e. Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten Tangerang;</p> <p>f. Menata dan mengembangkan kawasan wisata; dan</p> <p>g. Membuat rencana rinci kawasan permukiman.</p> <p>3. Pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura dilakukan dengan strategi:</p> <p>a. Melaksanakan reklamasi sepanjang pantai utara kabupaten yang berjarak kurang lebih 200 meter dari garis pantai.</p> <p>b. Menyiapkan regulasi operasional pelaksanaan reklamasi.</p> <p>c. Mengendalikan dampak penyelenggaraan reklamasi dan</p> <p>d. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dengan wilayah daratan kabupaten</p> <p>4. Pengembangan pertanian berkelanjutan di bagian utara wilayah dilakukan dengan strategi:</p> <p>a. Menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten.</p> <p>b. Menetapkan kawasan Minapolitan di kecamatan Kronjo dan kawasan Agropolitan di Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur dan</p> <p>c. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 23</p> <p>Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, meliputi sungai lintas provinsi dalam wilayah kabupaten, wilayah sungai kabupaten, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih, dan sistem pengendalian banjir.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air, meliputi:</p> <p>a. Sungai lintas provinsi terdiri dari Cisdane, Cidurian, dan Cimanceuri;</p> <p>b. Sungai lintas kabupaten/kota terdiri dari Cirarab, Kali Sabi, dan sungai kecil lainnya;</p> <p>(2) Sistem jaringan irigasi terdiri dari irigasi Cisdane dan Cidurian;</p> <p>Pengelolaan sumber daya air dan jaringan pengairan di</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Kabupaten Tangerang dikembangkan untuk:</p> <p>a. Pemeliharaan kawasan hulu sungai melalui kegiatan pelestarian kawasan, pengamanan kawasan penyangga, pengamanan sumber air dan pencegahan banjir;</p> <p>b. Pengelolaan irigasi strategis yakni prasarana irigasi yang terdapat pada sentra-sentra produksi pangan;</p> <p>c. Peningkatan koordinasi antar provinsi untuk sinkronisasi program sektoral maupun program bersama;</p> <p>d. Pengembangan struktur ruang dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas jaringan prasarana serta dengan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>dan penetapan sumberdaya air wilayah sungai;</p> <p>(3) Pemanfaatan sumber air diarahkan pada air permukaan dengan intake di sungai terdekat yang potensial;</p> <p>(4) Pada kawasan permukiman pusat kegiatan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai atau air permukaan;</p> <p>(5) Pada kawasan permukiman perdesaan dikembangkan sistem air bersih perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang ada meliputi mata air, air tanah dan air sungai dengan sistem jaringan air sederhana.</p> <p>(6) Rencana pengembangan sistem air bersih, meliputi:</p> <p>a. Zona Cibaja Utara melayani Kecamatan Cikupa, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Panongan dan Jambe;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. Zona Cibaja Selatan melayani Kecamatan Cisoka, Tigaraksa, Panongan dan Jambe;</p> <p>c. Zona Cipacul melayani Kecamatan Cisaug, Pagedangan, Curug dan Legok;</p> <p>d. Zona Sepatan Plus melayani Kecamatan Sepatan, Pasar Kemis dan Rajeg;</p> <p>e. Zona Pakumas melayani Kecamatan Pakuhaji, Mauk, dan Sukadiri;</p> <p>f. Zona Bojongered melayani Kecamatan Teluknaga, Kosambi; dan Zona IKK / Kejori melayani Kecamatan Kressek, Kronjo, dan Kemiri.</p> <p>Pasal 25 Ayat (1)</p> <p>Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, rencana pengelolaan sampah Kabupaten Tangerang sampai tahun 2030 meliputi :</p> <p>a. Menyiapkan akses dari kawasan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sumber penghasil sampah menuju lokasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang ada di setiap kawasan dengan kondisi sampah sudah terpilah antara sampah organik dan non organik.</p> <p>b. Penentuan daerah pelayanan setiap jenis alat angkutan sehingga tercipta suatu sistem pengumpulan sampah yang terhirarki dengan baik.</p> <p>c. Menyiapkan suatu pengelolaan dan pengumpulan yang terhirarki dengan baik.</p> <p>d. Pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah dengan menyiapkan armada angkut dari gerobak sampai truk.</p> <p>e. Penyediaan dan pengelolaan TPS dengan menyiapkan suatu TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah perkotaan yang akan meningkat seiring dengan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>peningkatan perkembangan fisik dan kegiatan perkotaan.</p> <p>f. Peningkatan kapasitas TPST Jatiwaringin di kecamatan Mauk; Pembangunan TPS secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan;</p> <p>h. Mewajibkan setiap pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus, umum, sosial lainnya menyediakan fasilitas penyediaan fasilitas pemilahan sampah;</p> <p>i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan</p> <p>j. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.</p> <p>k. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 25 Ayat (2)</p> <p>Rencana sistem persampahan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 26 Ayat (1)</p> <p>Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Tangerang secara lebih detail meliputi :</p> <p>a. Sosialisasi serta pemahaman atas pentingnya sarana sanitasi kepada masyarakat, sehingga ketergantungan akan sarana sanitasi bisa meningkat dan pencemaran limbah padat</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>maupun cair yang berasal dari domestik dapat dikurangi.</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas pelayanan IPLT Lebak wangi di Kecamatan Sepatan Timur.</p> <p>c. Mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik dan menggunakan sistem individu, berupa instalasi pembuangan tinja yang sehat atau tangki septik. Sedangkan untuk daerah yang padat perlu dikembangkan sistem komunal, namun sistem ini perlu didesain agar dapat disambungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk sistem terpusat di masa yang akan datang.</p> <p>d. Optimalisasi kemampuan instalasi pengolahan limbah yang sudah ada serta pengadaan dan pengelolaan truk tinja untuk meningkatkan pelayanan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>penanganan air limbah.</p> <p>e. Membangun instalasi pengolahan limbah tinja yang baru terutama di daerah padat penduduk di wilayah barat dan timur Kabupaten Tangerang. Karena pada umumnya prasarana yang dipergunakan di wilayah perencanaan adalah tangki septik dan cubluk, maka fasilitas pengolahan lumpur tinja dan sarana pembuangan sangat dibutuhkan yaitu dengan pengadaan dan pengelolaan IPLT. Untuk itu direncanakan dibangun IPLT di Kecamatan Cisauk Desa Suradita.</p> <p>f. Mewajibkan para developer untuk menyediakan / membangun fasilitas pengolahan limbah domestik secara komunal di kawasan perumahan yang akan dibangun.</p> <p>g. Untuk penanganan limbah non domestik yang berasal dari</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>industri diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air penerima.</p> <p>Teknik pengolahan tergantung jenis industri. Untuk itu perlu dibangun instalasi pengolahan industri secara bersama-sama antar beberapa industri . Untuk industri yang berdekatan dengan industri yang sama dapat membangun IPAL bersama sehingga dapat mereduksi biaya yang dikeluarkan. Instalasi pengolahan limbah diprioritaskan pada daerah yang diperuntukan sebagai kegiatan industri.</p> <p>h. Menyiapkan suatu mekanisme pengawasan terhadap pembuangan limbah industri untuk memastikan agar limbah yang dibuang ke saluran akhir telah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Terutama</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>penataan sistem pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk meminimalkan pencemaran udara, tanah dan sumber daya air serta meningkatkan kualitas lingkungan, dimana pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah serta dilakukan melalui kerjasama antar daerah, peran serta masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>i. Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah non domestik.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7 Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Sistem pengembangan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g meliputi :</p> <p>a. Penanganan Banjir</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>1. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar/ mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.</p> <p>2. Normalisasi sungai-sungai yang melewati kota, berupa pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.</p> <p>3. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien, terkait ketersediaan dana dan perlunya pelatihan yang cukup terhadap petugas yang bertanggung jawab serta memasyarakatkan upaya-upaya pemeliharaan kepada masyarakat umum.</p> <p>4. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Khususnya di lokasi banjir.</p> <p>5. Tingkat pelayanan, terkait dengan ketersediaan dana sehingga diperlukan upaya-upaya menanggulangi dana yang terbatas melalui upaya identifikasi terhadap sumber-sumber dana yang mungkin dan melakukan <i>cost recovery</i> semaksimal mungkin.</p> <p>6. Memudahkan operasi dan pemeliharaan serta pendataan setiap sungai</p> <p>7. Penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan menentukan otorisasi suatu instansi dalam pengelolaannya serta penetapan garis sempadan pantai, sungai, situ/danau :</p> <p>a. Pantai yaitu 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat;</p> <p>b. Situ/danau yaitu 50 m dari batas muka air tertinggi;</p> <p>c. Sungai besar yaitu 100 m dari</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>tepi sungai/pasang tertinggi;</p> <p>d. Sungai kecil yaitu 50 m dari tepi sungai/pasang tertinggi;</p> <p>e. Sungai Non pasang surut 3 - 100 m dari tepi sungai/pasang tertinggi.</p> <p>8. Pengendalian sungai agar tidak menjadi tempat buangan sampah oleh masyarakat sebab dapat mengakibatkan pendangkalan pada sungai tersebut.</p> <p>9. Hubungan dengan sektor-sektor lain dimana masalah pengendalian banjir harus terintegrasi penuh dengan sektor infrastruktur lainnya sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang tegas dan lugas.</p> <p>10. Pengembangan yang lain adalah peningkatan dan perbaikan kapasitas saluran drainase yang telah ada</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>di wilayah Kabupaten Tangerang.</p> <p>b. Pembangunan Tandon Air</p> <p>Pembangunan tandon air direncanakan di wilayah Kecamatan Sukadiri 1 buah</p> <p>Pasal 31</p> <p>Kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. kawasan hutan lindung;</p> <p>b. kawasan perlindungan setempat; dan</p> <p>c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jabar Banten-KPH Bogor seluas 1.591,98 ha tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri,</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Mauk, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kosambi.</p> <p>(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas :</p> <p>a. Sempadan Pantai;</p> <p>b. sempadan sungai;</p> <p>c. kawasan danau atau waduk; dan</p> <p>d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.</p> <p>Pasal 33</p> <p>Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a Kawasan ini terdapat di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang meliputi di Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Kosambi, Mauk, Kemiri dan Sukadiri, yang keseluruhannya mencakup areal seluas ± 510,00 Ha.</p> <p>(1) Pengelolaan kawasan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>sempadan pantai diarahkan melalui:</p> <p>a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai;</p> <p>b. pengendalian kegiatan disekitar sempadan pantai; dan pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi :</p> <p>a. Sungai besar adalah Cisdane dan Cidurian</p> <p>b. Sungai sedang adalah Cimanceuri, Cirarab, Cidadap, Cisabi, Tahang, Cipayauen, Cilaku, Cipasilian, Cilonar, Cileles, Cilarangan, Pecah, dan Kali Cigung;</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>b. Sungai kecil adalah anak-anak sungai baik sungai besar dan sungai sedang sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas.</p> <p>(2) Sempadan Sungai sesuai dengan lebar dan kedalaman sungai, sebagai berikut :</p> <p>a. Sungai besar paling kurang 30 meter;</p> <p>b. Sungai sedang paling kurang 10 meter; dan</p> <p>c. Sungai kecil paling kurang 5 meter.</p> <p>(3) Pengelolaan Sempadan Sungai ditujukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;</p> <p>(4) Pengelolaan sempadan sungai diarahkan melalui:</p> <p>a. pencegahan kegiatan budidaya</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;</p> <p>b. pengendalian kegiatan yang telah ada di sempadan sungai;</p> <p>c. pengamanan daerah aliran sungai; dan</p> <p>d. pembatasan daerah terbangun yang dapat merusak fungsi lindung daerah aliran sungai.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c adalah</p> <p>(1) Kawasan sempadan danau atau waduk yang berada di Kecamatan Pasar Kemis, Sepatan, Sepatan Timur, Kronjo, Kresek, Kelapa Dua, Pagedangan, Pakuhaji, Sindang Jaya, Balaraaja dan Mauk. Kawasan ini meliputi areal</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>seluas sekitar 880,07 Ha yang telah termasuk luas danau atau waduk didalamnya.</p> <p>(2) Tujuan pengelolaan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi utama danau atau waduk tersebut; dan</p> <p>(3) Pengelolaan kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:</p> <p>a. Penanaman tumbuhan sempadan danau atau waduk;</p> <p>b. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sempadan danau atau waduk; dan</p> <p>c. Penataan ruang sempadan danau atau waduk.</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Pasal 40 Ayat (8)</p> <p>(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. Kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Sindang Jaya bagian barat dan utara, Sepatan, Sepatan timur, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, Sukamulya, Gunungkaler, Kressek, Mauk, Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri dengan luas lahan lebih kurang 29.295,00 ha;</p> <p>b. Kawasan peternakan meliputi Kecamatan Teluknaga, Cisaug, Jambe, Cisoka, Mauk, dan Gunungkaler dengan luas lahan lebih kurang 200 ha.</p> <p>Pasal 38 Ayat (3)</p> <p>Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang diperuntukan bagi budidaya :</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>a. Perikanan tambak di Kecamatan Kronjo, Mekarbaru, dan Mauk dengan luas lahan lebih kurang 2.789 ha;</p> <p>Pasal 38 Ayat (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Industri besar Pasar Kemis, Cikupa, Jambé, dan Balaraja dengan luas ± 10.000 ha;</p> <p>b. Industri sedang di Kecamatan Curug, Kosambi, Jayanti, Tigaraksa, Sepatan, Legok, dan Panongan dengan luas ± 3.586 ha; dan</p> <p>c. Industri rumah tangga tersebar di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Curug dan Cisoka.</p> <p>d. Kawasan perdagangan dan industri terbatas berada di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan, dan Jambé. Pelabuhan kering</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>(<i>Dry Port</i>) disediakan di Kecamatan Jame.</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf c Pengembangan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai termasuk penyediaan prasarana pengelolaan limbah;</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf d Pengembangan industri diharuskan sejalan dengan struktur ruang wilayah Kabupaten Tangerang yang direncanakan sehingga antara pembangunan industri dengan perwujudan struktur ruang terjadi sinkronisasi;</p> <p>Pasal 38 Ayat (5) huruf f dan g f. Memanfaatkan semaksimal mungkin air baku (air tanah dangkal) untuk menekan proses intrusi air laut di kawasan</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pantai utara;</p> <p>g. Ditaatnya peraturan daerah mengenai baku mutu buangan limbah cair, padat, dan gas dengan jalan melengkapi instalasi pengolahan limbah yang memadai; dan</p> <p>Pasal 38 Ayat (7)</p> <p>Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :</p> <p>a. permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi dengan asumsi lebih dari 30 rumah/Ha dan kepadatan sedang dengan asumsi kepadatan rumah antara 20-30 rumah/Ha dengan luas lebih kurang 27.937 Ha, meliputi Kecamatan Pagedangan, Cisaik, Legok, Kelapadua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa, Panongan, Jambe, Cisoka, Solear, Jayanti, Teluknaga,</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kosambi dan Sindangjaya;</p> <p>b. Permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah dengan asumsi kurang dari 20 rumah/Ha luas lebih kurang 18.960 Ha, meliputi Kecamatan Kronjo, Mekarbaru, Gunungkaler, Kresak, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, dan Sukadiri.</p> <p>Pasal 38 Ayat (9)</p> <p>Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kawasan hasil kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut wilayah Utara mulai dari Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo, serta berjarak lebih kurang 200 meter dari garis pantai kearah laut dengan luas lebih kurang 9.000 ha diperuntukan sebagai</p>	

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN BIO FISIK DAN SOSEKBUD	KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM	REKOMENDASI
<ul style="list-style-type: none"> • Land Subsidence • Rob dan Kenaikan Muka Air Laut • Banjir/Genangan • Abrasi dan Kerusakan Pantai • Degradasi Ekosistem Mangrove • Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih • Sedimentasi • Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri • Penanganan Sampah • Pemanfaatan Ruang Laut • Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta • Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada • Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam permukiman horizontal • Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (fenomena urban sprawl), rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup • Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah 	<p>pengembangan kota pantai terpadu, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan permukiman perkotaan; b. Kawasan pelabuhan terpadu; c. Kawasan industri. d. Pariwisata dan e. Komersial 	